

12 LAPORAN UTAMA

Bea Cukai Genjot
Penerimaan Cukai

40 TRAVEL NOTES

WELCOME TO JORDAN,
THE HASHEMITE
KINGDOM!

55 FEATURE

Ketika Barang Impor dan
Eksport Harus Dilakukan Uji
Laboratorium



w a r t a **bea cukai**

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai



Realisasi Penerimaan
Bea Cukai Tahun 2016 Semester I

ZERO TOLERANCE FOR DRUG TRAFFICKER



COMMUNITY PROTECTOR



DITJEN BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

**Melindungi masyarakat Indonesia
dari bahaya Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor (NPP)**

Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbarui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

DARI REDAKSI

Genap sudah satu bulan seluruh umat muslim di dunia menjalani ibadah puasa. Setelah satu bulan melawati bulan suci Ramadhan, seluruh umat muslim di dunia menyambut kemenangan di hari raya Idul Fitri. Kami segenap redaksi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah. Semoga ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadhan dapat diterima dan menambah keimanan dan ketaqwaan kita.

Majalah WBC edisi Juli 2016 kembali hadir di tengah ruang baca Anda dengan berbagai rubrik yang menarik, di antaranya upaya Bea Cukai melakukan optimalisasi penerimaan di tahun 2016 ini. Bea Cukai ditugaskan bersama Pajak untuk mengisi kas negara dari segi penerimaan perpajakan. Dalam APBN 2016, Bea Cukai sendiri ditargetkan mengisi 186,53 Triliun atau sekitar 12,05% yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Usaha-usaha yang dilakukan Bea Cukai untuk memenuhi target ini akan dibahas dalam rubrik Laporan Utama.

Pernahkan Anda mendengar sekolah memanah? Memang olahraga memanah tidak setenar sepakbola. Bisa dibilang, kegiatan memanah merupakan hobi yang masih jarang dilakukan di Indonesia. Di Jakarta sendiri tercatat hanya ada satu tempat berlatih memanah. Pada rubrik Hobi dan Komunitas edisi ini, kami mengupas lebih jauh tentang komunitas memanah yang ada di *Semarang Archery School* (SAS).

Rubrik Travel Notes pada edisi kali ini menyuguhkan perjalanan menarik yang digambarkan secara detail ke negara Yordania. Anda diajak menyusuri berbagai tempat menarik di kota-kota yang ada di Yordania. Menyusuri kebun zaitun, mengunjungi *cave of the seven sleepers*, menjelajah kota Petra, dan mengunjungi Laut Mati merupakan sebagian rangkaian perjalanan yang diceritakan dalam rubrik Travel Notes edisi ini.

Selain rubrik-rubrik di atas masih banyak lagi rubrik lainnya yang menarik yang kami sajikan untuk Anda. Kami tetap menunggu kritik dan saran yang membangun dari Anda, juga kiriman foto dan artikel untuk dimuat dalam tiap edisi majalah ini.

Selamat Membaca!

Pimpinan Redaksi
Deni Surjantoro

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan majalah_wbc@yahoo.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur

Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822
e-Mail : majalah_wbc@yahoo.com dan majalah.wbc@customs.go.id.

Follow:  @Warta_BeaCukai  WartaBeaCukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LLM

PENASEHAT

SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI
Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN
Robi Toni, S.E., M.M.

DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
Drs. Marisi Zainudin Sihotang, SH, M.M.

DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN
Ir. Rahmat Subagio, M.A.

DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
Ir. B. Wijayanta Bektii Mukarta, M.A

DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL
Hendra Prasmono, S.H., M.IH

DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
Muhammad Sigit, Ak, MBA

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
Ir. Harry Mulya, M.Si

DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Dwijo Muryono

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI
Dwi Teguh Wibowo, S.E.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI
M. Agus Rofiqudin, S. Kom., M.M.

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI
Ir. Agus Hermawan , MA

PENGARAH
DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA
DR. Robert Leonard Marbun,SIP, MPA

PEMIMPIN REDAKSI
KASUBDIV KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI
Deni Surjantoro

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Muchamad Ardani, Imam Sarjono, Sudiro, Devid Yohannis Muhammad

REDAKTUR
Isro'ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Dara Rahmania, Sumardian Wahyudiatu, Muparrih, Jiwo Narendro P, Zulfaturrahmi

FOTOGRAFER
Abdur Razaq Aghni, Wahyu Valti Raja Monang, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira, Irfan Nur Ilman

REPORTER
Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahroni, Supriyadi Widjaya.

SEKRETARIAT
Indah Widaryati, Rudi Andrian

Daftar Isi

Juli 2016

■ Laporan Utama

- 6 Realisasi Penerimaan Bea Cukai Tahun 2016 Semester I
- 12 Bea Cukai Genjot Penerimaan Cukai
- 16 Optimalisasi Penerimaan Bea Cukai Tahun 2016

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Sugeng Apriyanto

■ Galeri Foto

- 20 Foto Bayangan



■ Opini

- 22 BARANG TIDAK DIKUASAI PASCA SPPB
(UPAYA MENURUNKAN ANGKA DWELL TIME)

Oleh : Rudi Aji Hermawan

■ Reportase



■ Profil Kantor

- 25 KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu
“PROFESIONAL”



- 30 BEA CUKAI HIBAHKAN PULUHAN RIBU KILO DAGING KE MASYARAKAT
- 31 Inisiatif KPK untuk Penguatan Sistem, Tugas dan Fungsi Bea Cukai
- 32 Bea Cukai Berantas Tekstil dan Produk Tekstil Ilegal
- 33 Workshop Pengelolaan Kepegawaian DJBC 2016



Sisi Pegawai

- 34 Berlari Mengejar Mimpi
Roy Maihendra Wijaya

36 Kicauan

37 Bea Cukai Menjawab

Travel Notes

- 38 Welcome to Jordan, The Hashemite Kingdom!



ENGLISH PAGE

THE MAIN REPORT

- 65 Realized Revenue of Customs and Excise for the First Semester of 2016



- 69 Directorate General Of Customs and Excise Boosts Excise Revenue

42 Ruang Kesehatan

44 Infografis

46 Event

Peraturan

- 48 Perdirjen BPIB (PER-22/BC/2016)

49 Berbagi Pengetahuan

Hobi dan Komunitas

- 51 Semarang Archery School (SAS)
Mendidik Karakter dari Kegiatan Memanah

Sejarah

- 54 Desa Pabean Indramayu-Jawa Barat

Feature

- 57 Ketika Barang Impor Dan Ekspor Harus Dilakukan Uji Laboratorium

Kebijakan

- 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk

72 Interview:

Sugeng Apriyanto,
Director of Revenue and Strategic Planning,
Optimizing Customs Revenue in 2016

OFFICE PROFILE

- 75 KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu PROFESSIONAL

TRAVEL NOTES

- 78 Welcome to Jordan, the Hashemite Kingdom!

THE EMPLOYEE

- 82 Run and Chase your Dream,
Roy Maihendra Wijaya

Realisasi Penerimaan BEA CUKAI Tahun 2016 Semester I

APBN tahun 2016 sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.

Jika ditelaah dari jenis-jenis penerimaan, realisasi penerimaan sektor cukai cukup tinggi, hanya saja karena untuk penerimaan dari sektor bea masuk dan bea keluar turun drastis sehingga tidak tertutupi. Hal tersebut diakibatkan dari berbagai faktor yang utamanya melemahnya ekonomi global.

Untuk tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menguat pada angka 3,6 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diharapkan meningkat menjadi 4,5 persen. Peningkatan ini bergantung dari perbaikan kondisi ekonomi di sejumlah negara yang tengah mengalami krisis, termasuk Rusia, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Kinerja perekonomian dunia tersebut diperkirakan masih akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016, termasuk Indonesia.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dunia diharapkan juga berpengaruh terhadap Indonesia sehingga roda-roda perekonomian yang sempat berjalan lambat bahkan berhenti bisa kembali aktif. Untuk tahun 2016 ini sampai dengan 31 Mei 2016, penerimaan kepabeanan dan cukai baru mencapai Rp 42,87 triliun atau sekitar 22,9%, yang terdiri dari Bea masuk sebesar Rp 13,4 T

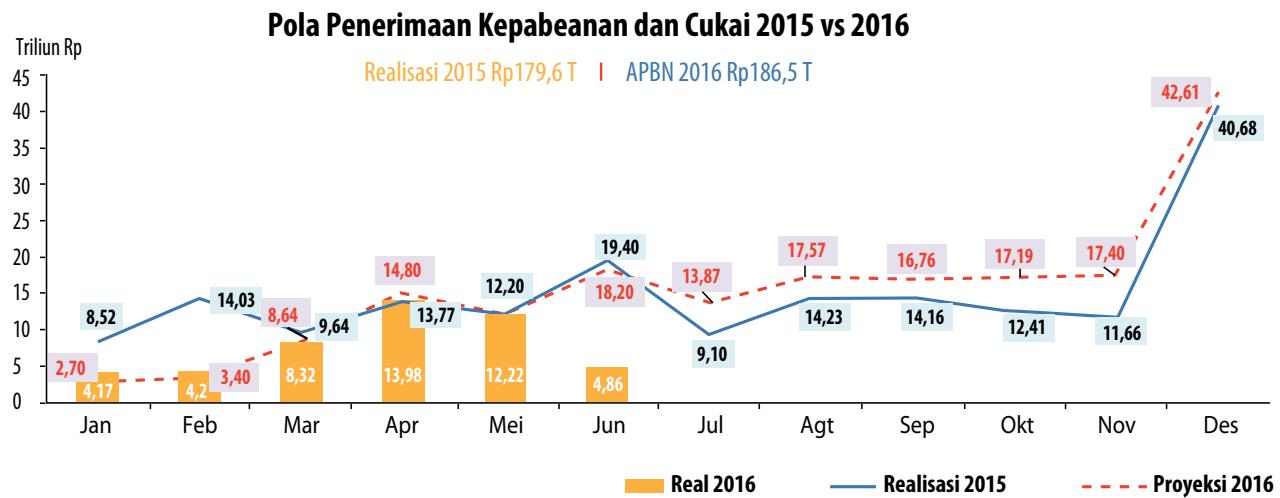
“

Pola penerimaan yang landai masih mungkin terjadi pada awal-awal tahun, karena belum ada sumber pemasukan dari bea maupun cukai yang lebih signifikan.

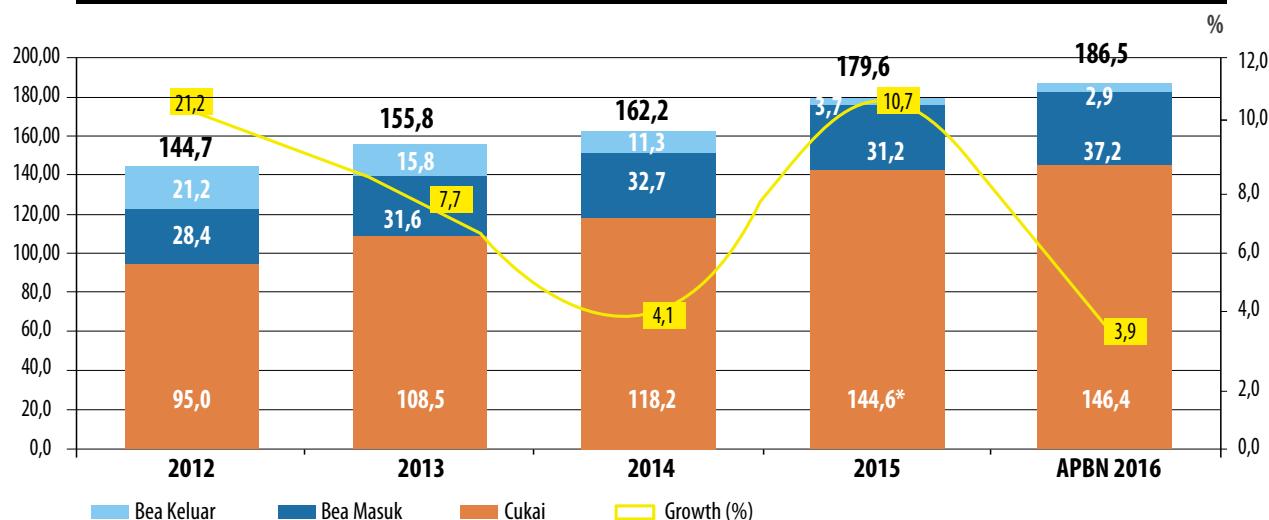
Heru Pambudi
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Dalam Postur APBN bea cukai merupakan salah satu unit yang mengisi Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546.664,6 miliar dan PNBP sebesar Rp273.849,4 miliar. Dalam penetapan APBN 2016, bea cukai ditargetkan oleh pemerintah untuk menyumbangkan penerimaan negara sebesar Rp. 186,53 Triliun. Jika dibandingkan tahun lalu, target penerimaan Bea Cukai tahun ini turun. Tahun 2015, Bea Cukai dibebani sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp 195 triliun dengan rincian Bea Masuk Rp 37,2 triliun, Bea Keluar Rp 12,1 triliun, dan cukai 145,7 triliun.

Tahun lalu realisasi penerimaan yang dicapai oleh bea cukai 92,5% dari total yang ditargetkan atau 180,4 T



Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2012 – 2016*



(36%), Cukai Rp 28,5 T (19,5 %) dan Bea Keluar Rp 0,9 T (31,4%).

Realisasi bea dan cukai tersebut rata-rata masih lebih rendah dari realisasi pada periode sama tahun 2015 yaitu Rp58,2 triliun yang terdiri atas penerimaan bea masuk Rp12,5 triliun, cukai Rp44,26 triliun dan bea keluar Rp1,4 triliun. Total penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Mei sebesar Rp 406,2 T, yang berarti bea dan cukai menyumbang **10,5 %**. Namun jika penerimaan PDRI (PPN impor, PPnBM Impor, dan PPh ps. 22 impor) dihitung sebagai bagian dari penerimaan

yang dikumpulkan DJBC, maka kontribusi penerimaan DJBC terhadap total penerimaan perpajakan sebesar **Rp 108,8 T (26,7%)**.

Di beberapa kali kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, **Heru Pambudi** dalam menanggapi realisasi sementara mengatakan pola penerimaan bea dan cukai pada periode awal tahun memang selalu rendah dan itu merupakan hal yang normal. Heru memperkirakan pola penerimaan yang landai masih mungkin terjadi pada awal-awal tahun, karena belum ada sumber pemasukan

dari bea maupun cukai yang lebih signifikan.

Begitupun Kasubdit Penerimaan, **Rudy Rahmaddi**, menjelaskan bahwa hal tersebut wajar karena penerimaan di awal tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pergerakan di semester kedua terutama sebagai dampak kebijakan PMK 20 Tahun 2015 yang merubah pola pembayaran cukai hasil tembakau. Penurunan tersebut juga sudah diprediksi sebelumnya karena adanya antisipasi kenaikan cukai 2016, banyak pengusaha yang memesan pita cukai di akhir tahun 2015



sehingga di awal tahun 2016 ini tidak banyak yang memesan pita cukai.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, penerimaan DJBC secara teknikal turun 26,4% (yoY). Hal ini khususnya dipengaruhi oleh penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 37,9% (yoY). Perlambatan kondisi perekonomian nasional dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok mengakibatkan penurunan produksi HT pada Semester I sebesar 3,9%.

Sebagaimana kita ketahui, kontribusi penerimaan CHT terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai sangat dominan mencapai 84%. Dengan demikian, fluktuasi penerimaan CHT secara otomatis akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai secara keseluruhan dan sejauh yang diamati penurunan penerimaan CHT ini masih dalam kondisi yang wajar mengingat terjadi perubahan pola

pembayaran akibat penerapan kebijakan pelunasan cukai Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 20 Tahun 2015, khususnya untuk penerimaan CHT dibulan Januari dan Februari. Namun demikian, untuk periode April dan Mei penerimaan CHT sudah kembali mendekati pola penerimaan alaminya.

“Kedepan, kami akan terus memantau kondisi fundamental penerimaan CHT dan kinerja fundamental penerimaan kepabeanan dan cukai lainnya dan mendorong optimalisasi penerimaan bekerja sama dengan unit-unit terkait di lingkungan DJBC,” ujar Rudy.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong penerimaan seperti:

1. Tiap-tiap kanwil didorong membentuk tim Optimalisasi Penerimaan dalam rangka menggali potensi-potensi penerimaan yang dimiliki oleh masing-masing satker, khususnya terkait penelitian ulang
2. Mengoptimalkan kegiatan penagihan piutang-piutang tidak lancer.
3. Meningkatkan kegiatan operasi penindakan di lokasi-lokasi yang rawan penyelundupan dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Operasi yang telah dilaksanakan antara lain Operasi Gerhana I dan II dll. Subdit Penerimaan juga mencoba untuk mengenali karakter penerimaan kepabeanan dan cukai seperti Bea Masuk, Cukai yang bisa dibagi lagi menjadi cukai hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol, dan cukai etil alkohol, serta Bea Keluar, berdasarkan aspek teknikal dan fundamentalnya. Menurut Rudy, selain mengetahui pergerakan penerimaan secara teknikal (tren dari waktu ke waktu), memahami fundamental penerimaan sangat penting untuk mengetahui seberapa sensitif kinerja dan pola penerimaan kita dipengaruhi oleh faktor

market/kondisi perekonomian dan kegiatan-kegiatan yang bersifat *extra effort* yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan (*compliance*) pembayaran penerimaan kepabeanan dan cukai. Dari sisi kinerja perekonomian misalnya, dengan memanfaatkan permodelan makro penerimaan yang ada saat ini, *ceteris paribus*, kita dapat mengetahui bahwa secara berturut-turut, setiap 1% perubahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan mempengaruhi penerimaan BM secara positif sebesar 0.1% dan secara negatif sebesar 0.3%, dan setiap perubahan 100 poin nilai tukar akan menyebabkan perubahan secara positif penerimaan BM sebesar 0.72%. Hal ini tentu sangat berguna dalam membuat perencanaan target penerimaan secara makro di dalam RAPBN. Namun demikian, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor perekonomian makro tersebut, penerimaan kepabeanan dan cukai dalam batas-batas tertentu itu juga dipengaruhi oleh *compliance level* atau tingkat kepatuhan dari pembayar pajak ini (importir-eksportir) dan pengusaha barang-barang cukai. Faktor inilah yang nantinya akan *di-explore* lebih lanjut bagaimana dan sejauh mana implikasinya terhadap penerimaan dan mitigasi kebijakan apa yang perlu dikembangkan untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai dari waktu ke waktu.

Untuk memastikan pencapaian hak-hak keuangan negara Subdit Penerimaan tengah mengembangkan satu *tools* untuk bisa memantau atau untuk bisa mengidentifikasi penerimaan atau pola penerimaan kepabeanan dan cukai yang dipengaruhi oleh kedua hal yang sudah disebutkan (*market-driven* dan *compliance-driven*). Faktor yang mempunyai implikasi kebijakan sangat signifikan adalah faktor-faktor

yang bersifat *compliance-driven*, karena faktor market bukanlah faktor yang bisa dikendalikan kondisi dan situasinya oleh DJBC.

“Tools tersebut sedang dibangun bekerja sama dengan unit-unit terkait di DJBC seperti P2-intelijen, Teknis dan Fasilitas Cukai dan IKC, dengan *feeding* data ke kami dan nantinya proses pemantauan, analisis penerimaan dan pemanfaatan informasinya dapat dilakukan secara mandiri maupun dapat bersama-sama di dalam tim. Misalkan, dengan Direktorat Audit untuk koordinasi dan sinergi upaya *extra effort*-nya dan dengan Tim Penagihan Piutang untuk upaya penagihan piutang tidak lancar, Diharapkan ke depan penggunaan informasi dan analisis penerimaan secara terpadu dan terintegrasi ini akan diperluas dengan melibatkan unit-unit terkait baik level pusat maupun vertikal di lingkungan DJBC khususnya yang menangani penerimaan sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas proses perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta diseminasi informasi di bidang penerimaan yang dilaksanakan oleh unit-unit terkait di Kantor Pusat maupun antara pusat dengan instansi vertikal” ungkap Rudy.

Rencananya salah satu ruangan di Subdit Penerimaan akan difungsikan sebagai semacam ruang monitoring room terpadu khusus penerimaan. Isi atau tujuan manajemen pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai yang ada di dalam monitoring room ini nantinya akan meliputi 4 hal: *revenue performance*, *cash management*, *revenue administration*, dan *receivables collection management*. Monitoring room serupa yang lazim di dunia perbankan dengan sebutan ‘Dealing Room’ ini di lingkungan Kemenkeu sudah ada dan telah lama didayagunakan



Apabila keempat aspek manajemen penerimaan (*revenue management*, *cash management*, *revenue administration management*, dan *receivables collection management*) tersebut terintegrasi dalam satu monitoring room maka analisis dan rekomendasi kebijakannya diharapkan dapat lebih komprehensif dalam waktu yang tepat

Rudy Rahmadi
Kasubdit Penerimaan

di Ditjen Perbendaharaan untuk menyajikan informasi terkait *Cash Management* dan di Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko untuk membantu mengelola pembiayaan negara (*financing management*).

Dalam penjelasan Rudy *revenue performance management* dirancang untuk melakukan, pengelolaan pencapaian target penerimaan termasuk menyempurnakan kualitas perencanaan, distribusi target, pemantauan dan evaluasi kinerja penerimaan. Sedangkan *cash management* untuk menyajikan informasi terkait kuantitas dan pola penerimaan kas harian hari ini, kemarin atau proyeksi penerimaannya bulan depan. Informasi ini akan menjadi *feeding* informasi yang berguna bagi rekan-rekan Ditjen Perbendaharaan untuk mengatur *intra-day cash* atau *intra-month cash management* dan rekan-

rekan DJPPR untuk melakukan perencanaan dan eksekusi upaya pembiayaan/pengelolaan utang (*financing management*).

“Contoh penggunaan *intraday* atau *intra-month cash management* ini berfaedah saat kita harus berkoordinasi dan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat diminta untuk mengamankan kas negara pada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu pada saat terjadi jatuh tempo pembayaran subsidi listrik dan BBM. Jadi misalkan kita tahu bahwa akan ada jatuh tempo pembayaran subsidi listrik dan BBM di hari tertentu di pagi hari maka penerimaan tersebut bisa disegerakan masuk kas untuk pagi harinya. Atau kalau kita tahu bahwa penerimaan baru akan direalisasikan pada siang atau sore hari maka pembayaran kewajiban subsidi gaji dan lain-lain akan dilaksanakan pada siang atau sore harinya setelah uangnya masuk. Analogi yang sama juga dilakukan untuk menutup kebutuhan penerimaan di bulan-bulan tertentu seperti menjelang lebaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan atau di triwulan tertentu untuk pembayaran subsidi listrik dan BBM dibandingkan kalau harus direalisasikan di akhir tahun atau akhir temponya. Di Rapat Pimpinan Kemenkeu beberapa waktu yang lalu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah bersepakat bersama-sama dengan Direktur Jenderal Pajak untuk bahu membahu saling menutup kebutuhan kas harian atau bulanan pemerintah dari penerimaan kepabeanan dan cukai serta penerimaan perpajakan berdasarkan informasi kas dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Yang demikian itu merupakan perwujudan sinergi di tingkat pimpinan Kemenkeu untuk bersama-sama mengamankan kas negara dari sisi

penerimaan”, lanjut Rudy.

Sama prinsipnya seperti di perusahaan dagang ada sales revenue (baik dalam bentuk *cash* maupun dalam bentuk *account receivables*), pengeluaran (*expenses*), dan utang (*financing*). *Cash management* berkaitan dengan hal bagaimana mengatur *cash flow*: *cash inflow* dan *cash outflow*. “Bea cukai karena hanya bicara sisi penerimaan jadi hanya melihat *cash inflow*-nya. Kita bisa memantau kuantitas dan pola deviasi dan fundamental penerimaan baik nasional maupun per satuan kerja (satker) di *cash management* ini.”

Isi ketiga yang ada dalam monitoring room terkait dengan administrasi penerimaan (revenue administration Management). Maksudnya adalah untuk memantau distribusi sebaran transaksi-transaksi yang *unmatched* di seluruh Indonesia, dari data antara MPO dan SPAN, antara SAI dan SAU, dan mengelola mitigasi proses rekonsiliasi (*matching*)-nya. Perbedaan muncul karena yang SPAN berdasarkan data yang sudah masuk kas rekening negara, sedangkan MPO berdasarkan dokumen. Memang dengan implementasi sistem pembayaran MPN-G2, permasalahan di seputar rekonsiliasi pembayaran dan dokumen layanan ini akan banyak berkurang. Namun demikian, masih terdapat transaksi-transaksi kepabeanan dan cukai di satker-satker DJBC yang masih belum terintegrasi dengan sistem layanan CEISA dan sistem pembayaran secara elektronik MPN-G2. Realita ini tentunya perlu dikelola manajemen pencatatan dan rekonsiliasi penerimanya

Antara kedua sistem tersebut selalu ada perbedaan, termasuk jika salah entri dan seterusnya. Monitoring room ini diharapkan bisa menjembatani hal tersebut. “Kita akan bisa mengetahui

sejak awal. Jadi bisa mendeteksi dini di satker-satker mana ada *unmatched* penerimaan sehingga dari sejak awal bisa didorong untuk melakukan rekonsiliasi tidak perlu menunggu 3 bulanan atau 6 bulanan saat melakukan evaluasi.” Dengan demikian, diharapkan dapat membantu dalam mendukung terwujudnya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah – DJBC.

Terakhir terkait *receivables collection management*, yaitu manajemen piutang atau penagihan piutang. Selama ini sistem aplikasinya ada di SAPP (Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian) tapi untuk saat ini pengelolaannya masih terpisah dengan manajemen penerimaan dan baru dari sisi admininstrasi pencatatan piutangnya saja, padahal aspek *collection*/penagihannya/pencairan dan evaluasinya bisa lebih didorong agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai dan evaluasi upaya *extra effort* di bidang penerimaan secara keseluruhan.

Jadi sebenarnya bukan membangun dari hal baru tetapi sebenarnya menyempurnakan proses analisisnya dan mengintegrasikan sistem informasi terkait penerimaan yang sudah ada di Bea Cukai, seperti kalau di level pimpinan ada EIS (*executive information system*) yang sudah berjalan. Kemudian ada sistem informasi kepabeanan yang beberapa sudah ada di intelijen itu juga di-share juga disini. Ada data SPAN, CEISA Perbendaharaan dan MPO. Semuanya sudah tersedia, namun penggunaan dan analisanya masih sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Sekarang disempurnakan dipadukan dan diintegrasikan dijadikan satu dalam 1 ruangan, ada dalam display yang terintegrasi sehingga kita bisa mengetahui secara

terpadu dan komprehensif terkait aspek teknikal dan fundamental penerimaan, baik yang bersifat *market-driven* (pertumbuhan ekonomi, kondisi industri, inflasi dan nilai tukar dll) maupun yang bersifat *compliance-driven* (kepatuhan pembayaran, pola produksi, *extra effort* dll.). Hasil informasinya nanti bisa digunakan oleh level pimpinan, para kepala satker maupun unit-unit lain di DJBC yang membutuhkan.

“Apabila keempat aspek manajemen penerimaan (*revenue management, cash management, revenue administration management*, dan *receivables collection management*) tersebut terintegrasi dalam satu monitoring room maka analisis dan rekomendasi kebijakannya diharapkan dapat lebih komprehensif dalam waktu yang tepat.”

Tools ini dapat memberikan alert/ peringatan apabila ada satu penerimaan yang drop

mana yang bisa diharapkan lebih, satker mana yang bisa didorong untuk menambal kekurangan tadi. Monitoring room merupakan program *ongoing* yang diharapkan nanti sudah bisa diimplementasikan pada saat selesai membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan.

Tim Optimalisasi Penerimaan itu sendiri hingga saat ini masih sedang dalam proses formulasi, sehingga begitu itu tim tersebut terbentuk diharapkan tools juga sudah berjalan. Diperkirakan dalam waktu 1-2 bulan kedepan sudah berjalan.

“Jadi saat tim itu nantinya berjalan atau sudah terbentuk maka tools dimaksud juga sudah siap digunakan untuk mendukung kerja tim optimalisasi penerimaan. Ibarat penerimaan itu adalah mesin, yang terdiri dari mesin bea masuk, mesin cukai dan mesin bea keluar, maka tools dalam bentuk monitoring room ini akan membantu untuk memantau

kinerja mesin-mesin tersebut yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikontrol (*compliance-driven*) maupun faktor-faktor yang di luar kontrol DJBC (*market-driven*). Untuk *hardware* sudah didrop jaringan sedang dalam proses penarikan, dan instalasi sedang terus dikerjakan. Seiring dengan hal tersebut, kami juga terus meningkatkan kesiapan tenaga-tenaga analis di bidang penerimaan untuk dapat mengoperasikan dan mengelola monitoring room tersebut. Secara umum *monitoring room* ini sering disebut *dealing room* di dunia perbankan atau industri keuangan tapi nanti mungkin kita sesuaikan namanya dengan konteks dan sifat kebeacukaian yang mencerminkan semangat dan karakteristik Bea Cukai sebagai salah satu aparatur fiskus yang bertanggung jawab mengamankan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai”, pungkas Rudy.

(Desi Prawita)



Barang bukti MMEA ilegal yang akan dimusnahkan.

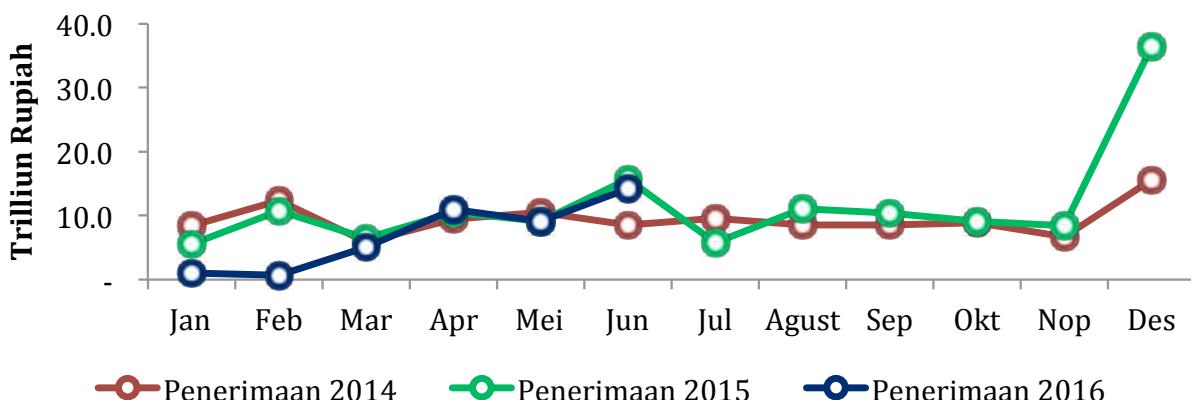


Cukai Hasil Tembakau yang selama ini menjadi penopang penerimaan DJBC.

Bea Cukai Genjot Penerimaan Cukai

Estimasi penerimaan cukai HT pada Semester I 2016 sebesar 40,8 T atau 29,2% dari target sedangkan pada periode yang sama tahun 2015 sebesar 58,3 T atau 41,9% dari target. Pada Semester I 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 karena dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2015 tanggal 2 Februari 2015 dimana pelunasan cukai atas pemesanan pita cukai tahun 2015 yang jatuh tempo pada bulan Januari dan Februari 2016 harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, sehingga penerimaan pada Januari dan Februari 2016 relatif kecil. Disamping faktor tersebut, perlambatan kondisi perekonomian nasional dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok mengakibatkan penurunan produksi HT pada Semester I sebesar 3,9%.

Tren Penerimaan Cukai Hasil Tembakau



Sektor cukai menjadi salah satu andalan untuk penerimaan bea dan cukai walaupun sejatinya cukai bukan untuk penerimaan, bahkan target terus meningkat. Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, **Marisi Zainudin S.**, mengatakan dengan porsi cukai yang mencapai 9,5% dari penerimaan perpajakan maka ketika target APBN dari sektor perpajakan meningkat terus guna membiayai belanja negara.

"Posisi cukai akan senantiasa diharapkan berkontribusi. Namun demikian, dalam prakteknya aspek lain tujuan pengenaan cukai yaitu pengendalian juga tetap dipertimbangkan, sejauh ini berdasarkan data yang ada upaya pengendalian telah berjalan sesuai yang diharapkan," tutur Marisi.

Secara umum faktor yang paling signifikan mempengaruhi penerimaan cukai adalah produksi dan tarif cukai. Yang mana dua faktor tersebut berperan langsung dalam penerimaan cukai. Namun demikian faktor-faktor turunan lainnya yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal, antara lain:

- Secara internal (*under control*): kebijakan di bidang cukai (kenaikan tarif dan HJE), adanya kondisi *forestalling* atas dampak diterbitkannya kebijakan tarif cukai HT, dan

intensitas penindakan di bidang cukai.

- Secara eksternal (*uncontrolled*): permintaan pasar, daya beli masyarakat, peredaran rokok ilegal, ketentuan di bidang kesehatan (PP 109 dan Permenkes 28), pertumbuhan ekonomi secara makro, dsb.

Pola penerimaan tahun 2014 relatif stabil, kenaikan penerimaan pada Desember 2014 lebih disebabkan karena faktor pergantian desain pita cukai dan kenaikan tarif yang mulai berlaku pada awal tahun berikutnya. Pola penerimaan tahun 2015 terlihat ada lonjakan yang signifikan pada bulan Desember karena pada tahun tersebut telah diberlakukan PMK-20, sehingga pelunasan atas pemesanan pita cukai tahun berjalan yang jatuh tempo pada tahun berikutnya harus sudah dilunasi maksimal tanggal 31 Desember 2015.

Pola yang sama juga akan terjadi pada akhir tahun 2016 ini, bedanya tahun 2016 dan 2015 hanya di awal tahun (Januari dan Februari) dimana pada tahun 2015 masih terdapat penerimaan atas pemesanan pita cukai tahun 2014, sedangkan pada awal tahun 2016 karena telah diberlakukan PMK-20, maka penerimaan bulan Januari dan Februari telah dibayarkan pada Desember 2015.

Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar, **Sunaryo**, menambahkan upaya yang akan ditempuh cukai untuk mencapai target penerimaan diantaranya penyempurnaan profilling pengusaha BKC, peningkatan pelayanan dan pengawasan dibidang cukai, dan penerbitan kebijakan tarif.

Upaya lain yang juga dilakukan dengan usulan perluasan objek barang kena cukai, yaitu kemasan plastik isi minuman. Berdasarkan hasil pembahasan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN 2016 agar dilakukan penggalian sumber-sumber pembiayaan negara dengan menambah barang kena cukai. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian oleh Tim Kemenkeu terhadap beberapa komoditi yang berpotensi dikenakan cukai, hasilnya mengerucut pada kemasan plastik berisi minuman/ makanan.

Adapun aspek Kebijakan Publik (*policy test*) yang dilakukan dalam penetapan objek cukai antara lain:

1. Legal
 - Undang-undang Cukai memberikan amanat untuk penambahan BKC baru
 - Penetapan jenis BKC baru ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - Penetapan penerimaan cukai atas BKC baru

dituangkan dalam APBN/P

2016

2. Filosofis

- Pengenaan cukai bertujuan untuk pengendalian (*instrument control*)
- Penggunaan kemasan plastik dapat berpengaruh negatif bagi lingkungan dan kesehatan
- Penggunaan plastik untuk kemasan minuman / makanan lebih dari 65% (Kemenperin)

3. Sosial Ekonomi

- Dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Rendahnya resistensi masyarakat atas praktek pemungutan retribusi oleh Pemda terhadap kantong plastik
- Penerapan penetapan BKC di indonesia masih sangat sedikit
- Dampak pengenaan cukai terhadap kemaan plastik minuman / makanan secara ekonomis tidak signifikan terhadap mempengaruhi inflasi, konsumsi dan PDB

4. Referensi (*Best Practice*)

- Penerapan cukai terhadap kemasan plastik oleh beberapa Negara (Inggris, India, Skotlandia, Hungaria, Irlandia, Ghana, Kenya)
- Pemungutan (retribusi) kantong plastik oleh beberapa Pemerintah Daerah (DKI Jakarta, Yogyakarta, dll)

5. Operasional

- Kelayakan administratif untuk pemungutan cukai kepada penanggung cukai

Sempat diberitakan di media bahwa Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap melakukan pembahasan usulan perluasan objek barang kena cukai bersama Kementerian Keuangan demi mengamankan penerimaan negara. Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia berpendapat,



Posisi cukai akan senantiasa diharapkan berkontribusi. Namun demikian, dalam prakteknya aspek lain tujuan pengenaan cukai yaitu pengendalian juga tetap dipertimbangkan, sejauh ini berdasarkan data yang ada upaya pengendalian telah berjalan sesuai yang diharapkan.

Marisi Zainudin Sitohang
Direktur Teknis dan fasilitas Cukai

Indonesia terlalu bergantung pada penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). Sementara penerimaan cukai dari minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol porsinya tidak terlalu besar menyumbang ke dompet negara.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, setoran cukai ditargetkan menyumbang Rp146,4 triliun atau 78 persen terhadap total target penerimaan cukai dan bea masuk tahun ini Rp186,5 triliun. Dari keseluruhan target penerimaan cukai, produk hasil tembakau ditargetkan menyumbang Rp139,8 triliun atau setara dengan 95 persen target cukai.

Menurutnya, pemerintah perlu memperluas basis cukai agar penerimaan negara bertambah. Segala bentuk penambahan penerimaan negara, tentu akan didukung. Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang lebih variatif

mengenakan objek cukai demi mengamankan penerimaan negara maupun melindungi warganya dari dampak negatif barang yang dikenakan cukai.

“Karena hanya ada tiga jenis objek cukai, pemerintah sangat bergantung kepada ketiganya. Padahal cukai ini tak hanya berpotensi menghasilkan pendapatan baru bagi pemerintah, tetapi juga menekan perilaku konsumsi barang yang tak baik di masyarakat,” katanya.

Rendahnya realisasi penerimaan perpajakan dan cukai dari target APBN 2016, mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain. Masalah ini, menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Tambudi dikarenakan oleh kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2016. “Pabrikan menarik pembelian ke akhir tahun 2015, sehingga pendapatan Januari – Februari 2016 kecil.”

Tahun ini telah ada perombakan organisasi pada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, salah satu perubahannya adalah penambahan Subdirektorat baru yaitu, Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai. Dengan adanya subdit baru ini, kami akan terus berupaya menggali objek cukai baru sehingga dapat menambah sumber penerimaan di bidang cukai.

Potensi dari ekstensifikasi masih sangat besar, perlu *political will* dari kementerian terkait untuk dapat meng-goalkan ekstensifikasi. Jika melihat *best practice* di negara lain, botol kemasan minuman, BBM, dan plastik sudah lazim dikenakan cukai. Perlu berbesar hati untuk menerima ini sebagai bagian dari upaya pengendalian dan sumber penerimaan.

Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha BKC, **Muh. Sutartib**, menjelaskan rencana kebijakan penambahan



“Ada upaya yang akan ditempuh cukai untuk mencapai target penerimaan.”

Sunaryo

Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar



“Asumsi pemberlakuan efektif dimulai pada 4 bulan terakhir, akan diperoleh sekitar Rp1 Triliun.”

Muh. Sutartib

Kasubdit Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha BKC



Penindakan di bidang cukai berkontribusi positif terhadap penerimaan cukai.

BKC dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan Pemerintah dan DPR pada Rapat APBN 2016 dalam rangka menggali sumber-sumber pembiayaan negara, dimana kajian mengerucut pada kemasan plastik berisi minuman dengan pertimbangan bahwa Kemasan plastik berisi minuman memenuhi sifat dan karakteristik untuk dikenakan cukai sesuai Pasal 2

ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai).

“Kebijakan cukai senantiasa berorientasi pada pengendalian, sebagaimana amanat Pasal 2 UU Cukai. Namun demikian, ketika ada kebijakan cukai yang baru maka penerimaan akan ikut naik, karena dalam prakteknya baik

pengendalian dan penerimaan berjalan paralel,” terang Sutartib

Penerapan cukai terhadap kemasan plastik telah diterapkan oleh beberapa negara, yaitu Inggris, India, Skotlandia, Hungaria, Irlandia, Ghana, dan Kenya. Di kawasan ASEAN memang belum ada negara yang menerapkannya, namun demikian Indonesia mencoba untuk menjadi pioneer.

Jika memang penerimaan cukai yang berasal dari kemasan plastik isi minuman ini ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan dalam kondisi normal dapat menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 2.6 sampai 3 triliun per tahun. Pada awal bergulirnya wacana pengenaan cukai terhadap kemasan plastik berisi minuman, DJBC dan BKF membuat kajian, termasuk simulasi potensi penerimaan dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Berdasarkan simulasi tersebut, dengan asumsi tarif cukai sekitar Rp50 s.d. Rp300 per buah (tergantung ukuran/volume kemasan) diperkirakan terdapat potensi cukai sekitar Rp2.67 Triliun per tahun. Asumsi pemberlakuan efektif dimulai pada 4 bulan terakhir, akan diperoleh sekitar Rp1 Triliun.

Dari sisi angka, penerimaan tersebut memang jauh dibandingkan dengan penerimaan cukai yang didapatkan dari Industri Rokok, namun pengenaan cukai terhadap kemasan plastik isi minuman tersebut memiliki efek lanjutan sebagai modalitas untuk ekstensifikasi cukai berikutnya meliputi kemasan plastik yang lebih luas maupun komoditas lain.

“Nilai ini memang tidak signifikan jika melihat penerimaan cukai sebesar Rp148 T, namun demikian akan menjadi pintu-pintu sumber penerimaan dari sektor lainnya seperti di negara lain.”

(Desi Prawita)

Optimalisasi Penerimaan Bea Cukai Tahun 2016

Sugeng Apriyanto, Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terus melakukan upaya-upaya untuk mencapai APBN 2016 telah ditetapkan oleh pemerintah di awal tahun. Tidak hanya Bea Cukai, tetapi bersama Pajak ditugaskan untuk mengisi kas negara dari segi penerimaan perpajakan. Dalam APBN 2016, Bea Cukai sendiri ditargetkan sekitar 186,53 Trilyun atau sekitar 12,05% yang terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai.

Tidak mudah untuk mencapainya karena banyak faktor yang mempengaruhinya seperti pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh ke ekspor-impor, nilai tukar rupiah dan lain sebagainya. Hingga saat ini atau pertengahan tahun, realisasi penerimaan baru mencapai 30% walaupun memang tren di awal tahun ada sedikit perlambatan. Maka dari itu, perlu adanya upaya-upaya lebih atau *extra effort*

yang harus dilakukan Bea Cukai.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana upaya yang dilakukan Bea Cukai untuk mencapai target APBN 2016 yang telah ditetapkan pemerintah, berikut penjelasan

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Sugeng Apriyanto, yang disampaikan secara tertulis kepada *WBC*;

Pemerintah telah menetapkan target untuk bea dan cukai sebesar 186.53 T. hingga pertengahan tahun ini berapa yang yang sudah terealisasi?

Sampai dengan 31 Mei 2016, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 42,87 Triliun (22,9%), yang terdiri dari Bea masuk sebesar Rp 13,4 T (36%), Cukai Rp 28,5 T (19,5 %) dan Bea Keluar Rp 0,9 T (31,4%).

Estimasi capaian penerimaan pada semester I 2016 sebesar 61.1 T (32.8%) dengan rincian Bea Masuk sebesar 16.45 T (44.2), Bea Keluar sebesar 1.21 T (42.2%) dan Cukai sebesar 43,4 T (29,7%).

Apakah realisasi penerimaan hingga saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan?

Secara angka, penerimaan kepabeanan sampai saat ini dinilai



masih cukup rendah, khususnya dari bea masuk dan bea keluar karena untuk CHT terjadi perubahan pola pembayaran. Sampai dengan Mei seharusnya penerimaan dari sektor ini dapat mencapai 42% karena pada dasarnya tidak ada kebijakan yang merubah pola pembayaran sebagaimana yang terjadi pada cukai HT. Secara keseluruhan, penerimaan negara pada umumnya kinerjanya di bawah perkiraan semula. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang meleset di bawah target. Pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,92% dari 5,3% yang diharapkan. perlambatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang rendah, akibatnya kinerja impor bahan baku dan barang modal yang menyumbang lebih dari >75% penerimaan juga mengalami perlambatan. Namun demikian, secara umum kinerja penerimaan BM Q1 masih ditopang oleh pertumbuhan impor barang konsumsi yang naik.

Kinerja penerimaan BK masih rendah lebih disebabkan realisasi ekspor mineral PT Freeport yang rendah, baru mencapai 30% (327 ribu MT) dari kuota yang berikan pada semester I 2016 sebesar 1 juta MT.

Namun demikian, kami masih optimis dengan extra effort yang akan dilakukan baik dari aspek kebijakan maupun pengawasan, penerimaan kepabeanan dan cukai akan meningkat pada semester kedua.

Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan?

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan untuk tiap jenis penerimaan antara lain:

1. Bea masuk:

- Kondisi perekonomian global dan domestik yang masih mengalami penurunan (realisasi pertumbuhan

ekonomi Q1 sebesar 4,92% yoy, meleset dari asumsi APBN 2016 sebesar 5,3%)

- Nilai devisa impor (Milyar US\$) masih mengalami penurunan (s/d Mei turun 20,4% yoy):

- Nilai 2014: **166,3** Milyar US\$; 2015: **128,2** Milyar US\$; 2016 Jan s.d Mei sebesar 44,1 Milyar US\$
- Impor non migas turun 8,37% yoy

- Penggunaan fasilitas FTA yang mencapai 26,7% PIB, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang hanya 23%.

- Impor barang modal tercatat turun 11,4% dan impor bahan baku dan pendukung industry turun 9,7%. Secara umum impor barang modal, bahan baku dan barang penolong berkontribusi >75% terhadap penerimaan bea masuk.

- Namun demikian terdapat faktor-faktor positif sehingga penerimaan bea masuk saat ini sedikit lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2015, yaitu:

- Kenaikan kurs rata-rata dari Rp12.851/USD menjadi Rp13.473/USD
- Kenaikan tarif efektif rata-rata dari 1,79% menjadi 2,26%
- Peningkatan impor dengan tariff spesifik yang bersifat short phenomenon (beras)
- Impor barang konsumsi yang masih stabil dan cenderung meningkat menjelang hari raya

2. Bea keluar:

- Harga komoditas ekspor yang rendah. Harga CPO < 750 USD sehingga tariff BK CPO masih 0%.
- Penerimaan BK hanya berasal dari komoditas bungkil kepala sawit, Kakao, Kayu dan Kulit

yang nilainya relatif kecil serta dari komoditas konsentrat mineral;

- BK dari ekspor konsentrat mineral hanya berasal dari 2 Perusahaan yaitu Newmont dan Freeport, dengan jumlah kuota ekspor yang ditentuan dari K/L terkait.
- Rendahnya realisasi ekspor mineral PT Freeport, mencapai 30% (327 ribu MT) dari kuota yang berikan pada semester I 2016 sebesar 1 juta MT.

3. Cukai:

- produksi dan tarif cukai
- Peningkatan produksi MMEA akibat rencana kenaikan tarif cukai MMEA impor pada semester II 2016
- Perubahan pola pembayaran cukai (dampak PMK 20 tahun 2015)
- faktor-faktor turunan lainnya yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal, antara lain:

- Secara internal (under control): kebijakan di bidang cukai (kenaikan tarif dan HJE), adanya kondisi forestalling atas dampak diterbitkannya kebijakan tarif cukai HT, dan intensitas penindakan di bidang cukai.
- Secara eksternal (uncontrolled): permintaan pasar, daya beli masyarakat, peredaran rokok ilegal, ketentuan di bidang kesehatan (PP 109 dan Permenkes 28), pertumbuhan ekonomi secara makro, dsb.

Apakah di semester kedua tahun ini akan ada perubahan target? Seperti apa?

Berdasarkan capaian

penerimaan s/d Mei 2016 dan pembahasan di internal Kementerian Keuangan, DJBC memang mengusulkan perubahan perubahan target penerimaan dalam APBN-P 2016, khususnya penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian global dan domestik yang belum membaik, bahkan jika dilihat dari devisa impor sampai dengan Mei 2016 turun signifikan (-20.4%) dibanding tahun 2015.

Dan mengacu mengacu pada hasil rapat bersama Banggar DPR RI pada tanggal 8 Juni 2016, target penerimaan cukai dinaikkan dari Rp146,4T menjadi Rp148,1T, dimana didalamnya telah mencakup penambahan objek cukai baru.

Apa usulan bea dan cukai untuk perubahannya?

Perubahan yang diusulkan adalah mengkoreksi target penerimaan bea masuk dari 37,2 T menjadi 33,37 Trilliun, dan target bea keluar dari 2,88 T menjadi 2,5 T. Adapun untuk cukai diusulkan

mengalami peningkatan dari 146,4 T menjadi 148,1 T, dimana tambahan 1 T diperhitungkan dari ekstensifikasi cukai (botol plastik berisi minuman).

Perubahan lain adlah kenaikan tarif cukai MMEA yang diselaraskan dengan kebijakan tarif bea masuk impor MMEA, serta upaya peningkatan intensitas pengawasan baik untuk BKC berupa MMEA maupun HT. Terkait penambahan BKC baru Bea Cukai berharap sinergi para *stakeholder* guna mempercepat pemberlakuan kebijakan ekstensifikasi cukai.

Adakah kebijakan baru bea dan cukai untuk mendorong penerimaan terutama untuk komponen bea masuk dan bea keluar yang semakin lama semakin menurun?

Secara umum kebijakan kepabeanan dan cukai untuk mendorong pencapaian target penerimaan 2016 adalah sebagai berikut:

Khusus untuk bea masuk dan bea keluar, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- Faktor diluar kontrol bea dan cukai (*market driven*), dimana kebijakan yang dapat dilakukan adalah memantau dan memprediksi (harga komoditas, perkembangan ekonomi, kurs)
- Faktor dikontrol oleh bea dan cukai, dimana kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan *compliance* (kepatuhan), baik melalui kegiatan rutin (sosialisasi dan penyuluhan) maupun dalam bentuk *extra effort* (notul, penul, audit).

Sektor cukai menjadi salah satu andalan untuk penerimaan bea dan cukai walaupun sejatinya cukai bukan untuk penerimaan, bahkan target terus meningkat. Bagaimana tanggapan Bapak?

Pada dasarnya tujuan pengenaan cukai adalah :

- Membatasi beredarnya barang-barang yang dianggap *immoral* atau *unhealthy*.
- Menghindari terjadinya externalitas yang negatif

1. Kebijakan Tarif

- Intensifikasi melalui penyesuaian tarif cukai dengan tetap memperhatikan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok

2. Penyesuaian Tarif Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Impor

3. Peningkatan Implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window*) dan Indonesia Single Risk Management

4. Pembentukan Pusat Logistik Berikat

5. Penurunan Dwelling Time

- Pada Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan besar lain

6. Implementasi Penuh Sistem Pembayaran Penerimaan Negara melalui Billing System Modul Penerimaan Negara Generasi 2

7. Sinergi dengan Ditjen Pajak

- Integrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pertukaran data

8. Penegakan Hukum di Bidang Cukai

- Khususnya terkait rokok dan minuman mengandung etil alcohol ilegal

9. Intensifikasi penindakan pelanggaran kepabeanan dengan patroli laut

10. Optimalisasi pengawasan ekspor

- Melalui pengawasan modus antar pulau, penguatan fungsi laboratorium dan audit eksportir



- (to internalize external diseconomies).
- Mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah.
 - Efisiensi penggunaan sumber daya alam.
 - Penerimaan negara (government revenue)
- Pada tahun 2015 perlambatan pertumbuhan produksi rokok sudah terjadi dan diprediksi akan terus berlanjut pada tahun berikutnya. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh instrumen kenaikan tarif yang diberlakukan untuk cukai hasil tembakau. Perlambatan pertumbuhan produksi rokok tersebut sesuai dengan *Roadmap Industri Hasil Tembakau* tahun 2015-2020 yang memberikan prioritas lebih tinggi pada aspek kesehatan masyarakat melebihi aspek tenaga kerja dan penerimaan negara.

Adapun peningkatan target penerimaan cukai merupakan arah kebijakan umum perpajakan

pada tahun 2016 dan 2017, dimana kebijakan perpajakan diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan *negative externality*. Kebijakan ini terutama dilakukan dengan cara:

1. Melakukan tindakan penegakan hukum terutama terkait dengan rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal;
 2. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau; dan
 3. Penambahan objek cukai (barang kena cukai) baru.
- Belakangan ini bea dan cukai gencar melakukan penindakan terhadap barang-barang ilegal/ barang selundupan. Apakah ada pengaruhnya terhadap penerimaan dan seberapa besar?

Operasi Penindakan yang dilakukan secara serentak melalui operasi Gerhana I dan II maupun operasi lain pada masing-masing satker tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai melalui 2 transmisi, yaitu: (a) mengurangi

barang-barang ilegal yang beredar sehingga dapat diisi oleh barang-barang legal yang membayar bea masuk dan cukai. (b) meningkatkan kepatuhan (*compliance*) pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepabeanan dan cukai, sehingga pada akhirnya dapat menambah penerimaan DJBC.

Berdasarkan hasil penelitian oleh PSEKP Universitas Gajah Mada tahun 2015, penindakan di bidang cukai berkontribusi positif terhadap penerimaan cukai sebesar 0,3% dan berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi sebesar 5,3%

Apakah bapak optimis mencapai target penerimaan tahun 2016 ini? Untuk kedepannya (tahun 2017) kira-kira akan seperti apa target penerimaan bea cukai?

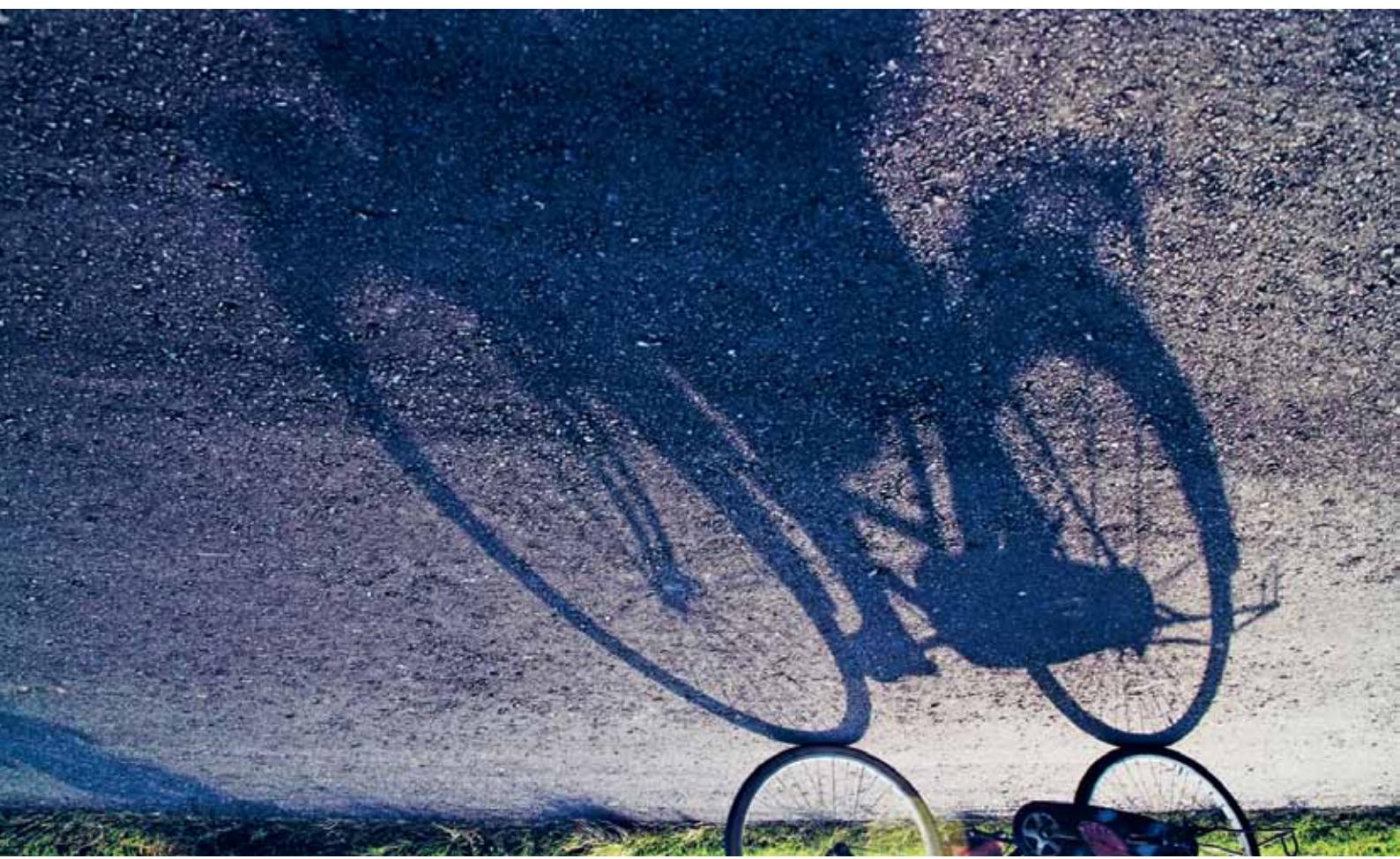
DJBC sangat optimis target penerimaan tahun 2016 (sesuai usulan RAPBN-P 2016) dapat tercapai, dan DJBC akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai target yang dibebankan.

Untuk tahun 2017, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik diprediksi penerimaan kepabeanan dan cukai juga akan meningkat. Peningkatan penerimaan diperkirakan akan terjadi pada sektor Bea Masuk dan Cukai seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian. Untuk bea keluar penerimaan tahun 2017 diprediksi akan semakin kecil, mengingat mulai tahun 2017 ekspor konsentrat mineral tidak lagi diijinkan oleh pemerintah, sehingga BK hanya mengandalkan dari komoditas bungkil, kakao, kayu dan kulit dengan potensi penerimaan hanya sebesar 350 miliar rupiah.

Bea Cukai dan BKF saat ini sedang mengkaji format kebijakan yang berkesinambungan sehingga penetapan target dari tahun ke tahun menacu pada kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

(DesiPrawita)

GALERI FOTO



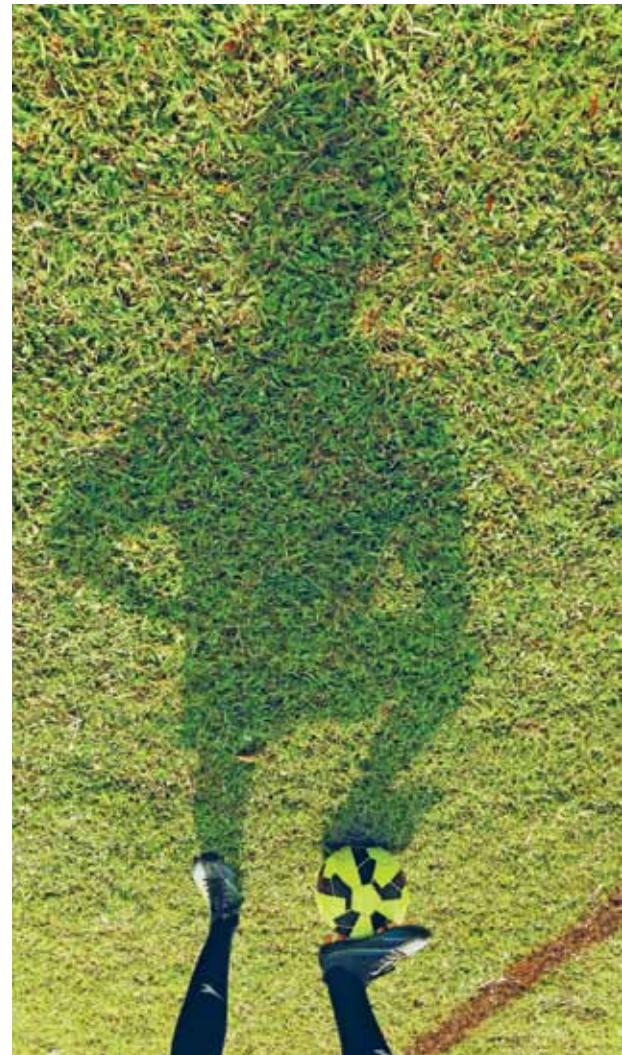
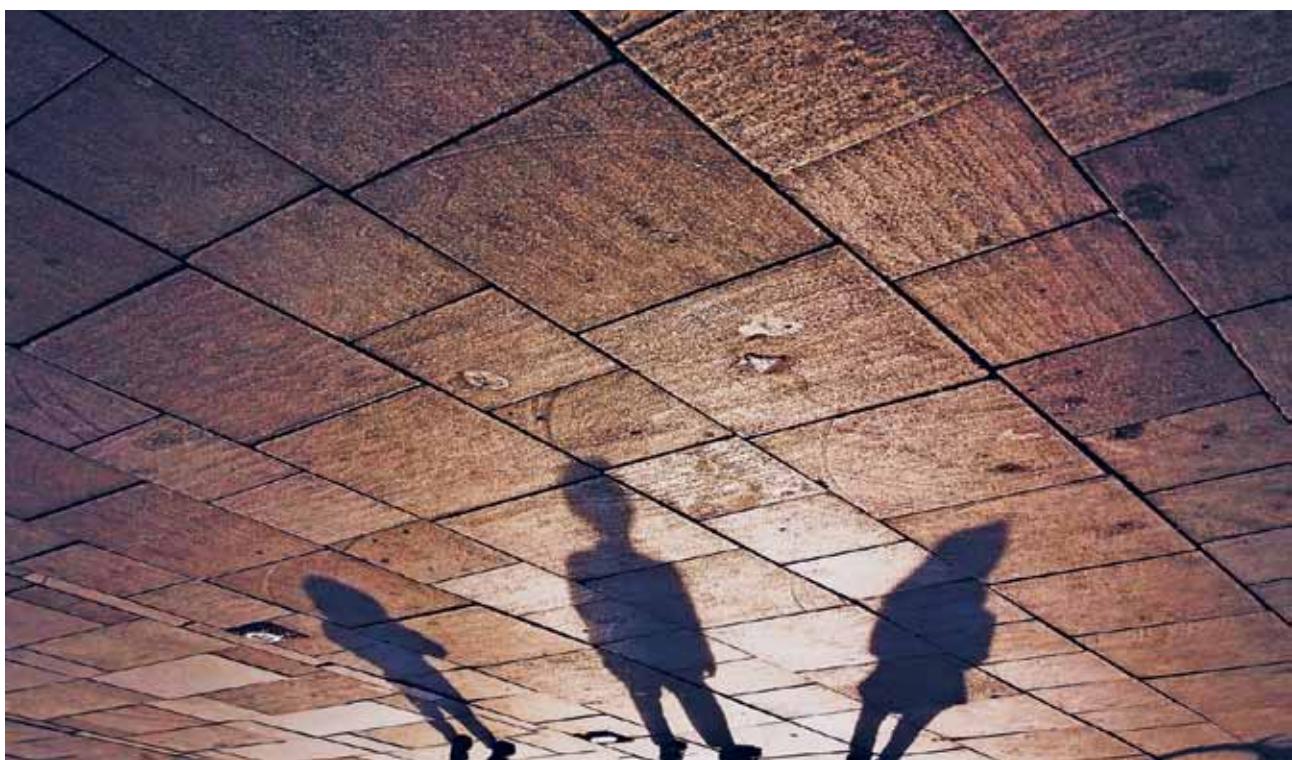


Foto Bayangan

FOTOGRAFER: NUR IMAN



BARANG TIDAK DIKUASAI PASCA SPPB

(UPAYA MENURUNKAN ANGKA DWELL TIME)

Oleh : **Rudi Aji Hermawan**, Kasi PKC 1 Tanjung Emas, Semarang



PROLOG: Suatu hari di bulan Oktober 2015, dalam kesempatan koordinasi rutin dengan komunitas pelabuhan Tanjung Emas Semarang, penulis didekati pimpinan TPKS (Terminal Peti Kemas Semarang) dan terlibat diskusi terkait dengan kelancaran lalu lintas peti kemas. Beliau bertanya, "Apakah bea dan cukai bisa membantu mengeluarkan kontainer yang sudah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) tetapi sudah berbulan-bulan belum dikeluarkan dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) pelabuhan oleh importir?" Kala itu penulis menjawab bahwa bukankah justru pihak TPKS merasa senang, karena semakin banyak *revenue* dari biaya timbun. Secara tidak terduga dijawabnya "tidak", bahkan justru merasa terganggu dengan adanya tumpukan kontainer yang sudah berbulan-bulan di lapangan penimbunan dengan status sudah SPPB. Sepanjang importir bayar sewa timbun, pengusaha TPS dalam hal ini pimpinan TPKS, tidak bisa berbuat banyak. Waktu itu penulis berpendapat bahwa bea dan cukai tidak ada sangkut pautnya lagi karena sudah SPPB, namun itu hanya di dalam hati saja. Penulis tidak tega mengatakannya, karena sejatinya beliau hendak mencari solusi. Dialog ini sangat mengganggu penulis. Benarkah bea dan cukai, instansi besar yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang

untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor, tidak bisa berbuat apa-apa terkait permasalahan ini? Terlebih lagi ini juga terkait *trending topic* saat ini yaitu *dwelling time*, mengingat posisi barang masih di dalam TPS pelabuhan.

Kejadian sebagaimana diuraikan dalam prolog, membuat penulis membuka dan mengingat-ingat kembali perkuliahan kepabeanan era 90-an saat belajar Ordonansi Bea dengan lampiran Reglement A dan Reglement B. Barang yang Tidak Dikuasai (BTD), sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda melalui Ordonansi Bea dan diajarkan dalam perkuliahan Prodi III Spesialisasi Bea dan Cukai kala itu. Hal yang membentuk mindset dan melekat kuat dalam memori sampai Oktober 2015 bahwa pemahaman BTD adalah "barang yang tidak diurus oleh importir lewat 30 hari agar tidak kongesti". Itulah pemahaman yang penulis jadikan pedoman sejak 1990 s.d. 2015, setidaknya selama berdinias. Untuk menguatkan hal ini, penulis bertanya kepada beberapa kolega mengenai pemahaman BTD, dan narasumber yang penulis datangi, menjawab sama persis dengan pemahaman penulis, bahwa BTD itu ya... barang yang tidak diurus importir lewat 30 hari. Kalau sudah SPPB, kan artinya sudah diurus, jadi bea dan cukai sudah tidak bisa apa-apa lagi, itu urusan importir dengan pihak TPS.

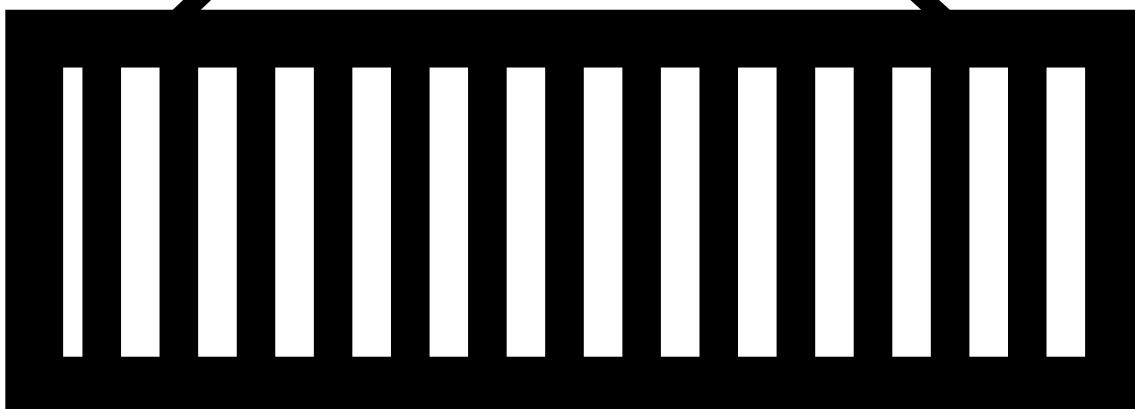
Apa iya... seperti itu

pemahaman BTD? Apa iya... institusi pemerintah sebesar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan penyelesaiannya kepada pengusaha TPS, padahal pengusaha TPS sendiri justru malah meminta bantuan bea dan cukai. Ataukah pemahaman penulis selama ini keliru, faktanya justru terjadi status quo dan tidak terselesaikan.

hari sejak penimbunannya”.

Untuk memahami Pasal 43 ayat (2) dengan baik, harus dilihat juga penjelasan pasalnya, agar memperoleh pemahaman utuh mengenai maksud pasal tersebut. Berikut penulis kutip penjelasan Pasal 43 ayat (2) sebagai berikut:

“Mengingat penyediaan TPS dimaksudkan untuk menimbun barang untuk sementara waktu, perlu adanya pembatasan jangka waktu penimbunan barang”



Kejadian ini membuat penulis melakukan review dan membebaskan diri dari pemahaman BTD yang selama ini terpatri kuat dalam memori. Cara yang paling pas menurut penulis, karena ini menyangkut tindakan hukum, maka harus kembali ke sumbernya yaitu hukum itu sendiri. BTD dalam konteks kepabeanan itu spesifik dan tidak multi tafsir serta hanya ada satu rujukan yaitu Undang-Undang Kepabeanan (UUK) No. 10 tahun 1995 jo. No. 17 tahun 2006 yang dalam operasional pelaksanaannya dilakukan melalui peraturan menteri keuangan.

Apa itu BTD? Terminologi ini ada sejak zaman Belanda. Apakah memang benar pemahaman BTD saat ini relevan dengan apa yang diajarkan dosen di perkuliahan kepabeanan era 90-an? Definisi/batasan terminologi BTD dalam konteks TPS pelabuhan, secara eksplisit dan jelas diatur dalam

Pasal 65 ayat (1) huruf a UUK. Berikut penulis kutip langsung bunyi Pasal 65 ayat (1) huruf a dimaksud dari UUK sebagai berikut:

“Barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai adalah: a. Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)”.

Redaksi pasal ini lugas dan tidak ada multi tafsir sehingga di dalam penjelasan pasalnya pun dikatakan “cukup jelas”. Ketentuan ini memberikan dasar hukum kapan suatu barang berubah status menjadi BTD, yaitu saat “ditimbun” di TPS melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana Pasal 43 ayat (2).

Sekarang penulis kutip bunyi Pasal 43 ayat (2) UUK sebagai berikut:

“Dalam hal barang ditimbun di TPS, jangka waktu penimbunan barang paling lama tiga puluh

barang di dalamnya. Jangka waktu tiga puluh hari yang disediakan dianggap cukup untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan agar segera mengeluarkan barangnya dari TPS, juga agar tidak mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan (kongesti)”.

Dari penjelasan pasal ini, diperoleh pemahaman maksud dari si pembuat UUK terkait dengan penimbunan barang di TPS pelabuhan bahwa terdapat 4 pokok pikiran maksud dibatasinya penimbunan di TPS pelabuhan sekaligus tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Penimbunan barang sifatnya sementara waktu;
2. Lama waktu penimbunan tiga puluh hari;
3. Segera mengeluarkan barang dari TPS;
4. Agar tidak kongesti

Uraian pasal terkait di UUK

sebagaimana di atas, membuat penulis terperanjat. Ternyata UUK kita sudah mengakomodir ketentuan Ordonansi Bea, bahkan cakupannya lebih luas dan tidak hanya berbicara “barang yang tidak diurus importer”, melainkan menembus dimensi kekinian yaitu berbicara “penimbunan” dengan keharusan “segera mengeluarkan”. Maksud yang hendak dicapai juga jelas agar bisa dikeluarkan “paksa” dari TPS, sehingga tidak mengganggu kelancaran arus barang (*istilah trend saat ini adalah mengurangi angka Dwelling Time*).

Apabila ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (2) dikorelasikan, maka akan diperoleh rumusan BTD sebagai berikut:

“BTD adalah barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu tiga puluh hari”. Artinya adalah bahwa barang impor tersebut “TIDAK DIKELUARKAN” (masih ditimbun) di TPS dan melebihi jangka waktu 30 hari.

Lantas bagaimana dengan tataran operasional pelaksanaan di lapangan melalui peraturan menteri keuangan-nya? Mekanisme BTD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan ini memberikan definisi BTD dalam Pasal 1 ayat 2 huruf a, sebagai berikut:

“Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang selanjutnya disebut dengan BTD adalah: a. barang yang tidak dikeluarkan dari TPS yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunnya”.

Definsi BTD di peraturan menteri keuangan ini lebih lugas

dengan menggunakan terminologi “BARANG YANG TIDAK DIKELUARKAN”. Terminologi ini *kongruen* dan selaras dengan UUK. Kepentingan/tujuan BTD sebagaimana amanat UUK, adalah kelancaran arus barang guna mencegah kongesti/menurunkan angka dwelling time, TIDAK ada kepentingan lain, sehingga atas hal tersebut, semestinya tidak perlu memandang apakah barang impor tersebut sudah dibayar atau belum dibayar, sudah diurus atau belum diurus, sudah SPPB ataukah belum SPPB. Semua diperlakukan sama. Manakala kedapatan barang tidak dikeluarkan (masih ditimbun) di area TPS pelabuhan lebih dari 30 hari, maka sesuai hukum barang tersebut harus berubah status menjadi BTD.

BTD sangat penting, sehingga sampai harus diatur tersendiri dalam pasal di UUK. Dengan status BTD, maka dimungkinkan bagi bea dan cukai melakukan tindakan hukum secara sepihak atas barang impor tanpa perlu mendapatkan persetujuan pemilik barang, melakukan relokasi/memindahkan barang secara “paksa” dari TPS pelabuhan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) sebagaimana Pasal 65 ayat (2) dengan segala resiko/biaya yang ditanggung si pemilik barang (keluar dari TPS pelabuhan). Memahami BTD dalam format baru sesuai UUK dan PMK 62/2011, membuat penulis sejak November 2015 berubah mindset 180 derajat dan memandang bea dan cukai memiliki peran sentral dalam menentukan kelancaran arus barang, yang tentu saja atas barang yang tidak dikeluarkan dari TPS pelabuhan lebih dari 30 hari sesuai regulasi yang berlaku. Tidak ada tempat bagi siapa saja yang barangnya berlama-lama di TPS pelabuhan melewati 30

hari, termasuk yang sudah SPPB sekalipun demi kelancaran arus barang.

Lantas bagaimana penyelesaian BTD pasca SPPB, sebagai kelanjutan pasal 65, yaitu pasal 66 sampai dengan pasal 73? Tentunya dilihat di sini bahwa status SPPB artinya pungutan negara yang terhutang sudah dibayar/diselesaikan. Bea dan cukai tidak lagi melakukan pengawasan ketat mengingat hak keuangan negara telah terpenuhi. Selanjutnya kewajiban pemilik barang hanyalah terkait biaya2 di luar Bea Masuk dan PDRI, yaitu biaya timbun di pelabuhan, biaya relokasi, dan biaya timbun di TPP lini 2. Tidak ada batas waktu penimbunan di sini. Dalam skema BTD pasca SPPB, tidak pernah ada status Barang BTD menuju ke arah BMN. Kenapa...? Karena hak keuangan negara berupa Bea Masuk dan PDRI sudah diselesaikan.

Konsep ini bisa dijadikan salah satu terapi kelancaran arus barang apabila dalam kondisi tertentu memang ada penumpukan yang tinggi pasca SPPB dan lebih dari 30 hari masih berada di TPS pelabuhan. Dalam tahap ini tidak akan pernah lagi bea dan cukai dalam posisi menghimbau, meminta tolong, meminta kesadaran pemilik barang, tetapi langsung bisa mengeksekusi sebagai suatu upaya paksa untuk kelancaran arus barang dan sah secara hukum.

Demikian tulisan singkat terkait pembahasan BTD. Tak ada gading yang tak retak, dan tentunya tulisan ini masih perlu banyak penyempurnaan dan bisa jadi masih sulit diterima oleh sebagian kolega/teman. Penulis terbuka menerima saran, dengan harapan tulisan ini bermanfaat, serta semoga kita semua penulis dan pembaca senantiasa dalam lindungan-Nya. (*)



KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu

“ PROFESIONAL ”

MEDAN! Jika orang Indonesia diminta untuk menyebutkan kota di P. Sumatera pasti akan teringat dengan ibukota propinsi Sumatera Utara ini. Sebagai salah satu kota besar destinasi wisata dan bisnis tentu kemudahan sarana penghubung diperlukan seperti bandar udara internasional. Dahulu Bandar Udara Internasional di Sumatera Utara bernama Bandar Udara Internasional Polonia. Seiring dengan kemajuan perekonomian dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 1997 mulai mencanangkan untuk mendirikan bandar udara yang baru yakni Bandar Udara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang yang lebih memadai dan *representative*, akan tetapi terhenti pembangunannya akibat krisis

moneter tahun 1998.

Pembangunan bandar udara yang baru dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2006 dan selesai pembangunannya serta diresmikan pada tanggal 27 Maret 2013. Akan tetapi Bandar Udara Internasional Kuala Namu baru mulai beroperasi secara normal sejak 25 Juli 2013 menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia di Medan.

Bandar Udara Internasional Kualanamu diproyeksikan sebagai hub airport (penghubung) Indonesia bagian Barat dengan wilayah Negara lain dan Hub regional di Asia tenggara dalam rangka menghadapi ASEAN Open Sky. Sejak dioperasikannya Bandar Udara Internasional Kualanamu jumlah arus penumpang masuk-keluar Bandar Udara ini mengalami peningkatakan baik dari dalam rangka kunjungan bisnis, pariwisata, sosial budaya, konvensi, pendidikan dan kesehatan.



“ Semangat, pengalaman, kepedulian dan inovasi serta memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan yang membuat kantor ini bisa mencapai kesuksesan bersama.

Ade Zirwan
Kepala Sub Bagian Umum

Dengan peningkatan dan kompleksitas Bandar Udara Internasional Kualanamu maka peran DJBC sangat dibutuhkan untuk dapat menunjang kelancaran arus kedatangan/

■ PROFIL KANTOR

keberangkatan penumpang internasional, barang dan dokumen kepabeanan serta mengoptimalkan pengawasan yang selektif dan terukur terhadap upaya pemasukan dan pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan serta dapat mengoptimalkan penerimaan Negara. Dengan mempertimbangkan kompleksitas hal ini, maka perlu adanya Kantor Bea Cukai khusus yang menangani Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Berdasarkan PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC yang salah satunya mengamanatkan pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Kuala Namu. Sedangkan pembentukan KPPBC TMP B Kuala Namu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/2015 tanggal 01 April 2015, dan sejak tanggal 01 Juli 2015 telah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Kuala Namu.

Sejarah KPPBC TMP B atau Kantor Bea Cukai Kuala Namu erat kaitannya dan tak bisa dilepaskan keberadaannya dari Kantor Bea dan Cukai Medan (d/h Polonia). Seperti dijelaskan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Kuala Namu, Zaky Firmansyah, bahwa sejak beroperasinya Bandar Udara Internasional Kuala Namu (menggantikan fungsi Bandar Udara Internasional Polonia) kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan masih dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Medan, tepatnya 25 Juli 2013 hingga 30 Juni 2015.



Pengawasan bandara menjadi salah satu tugas pokok Kantor Bea Cukai Kuala Namu.



“Baru sejak 1 Juli 2015 sebagian wilayah kerja Kantor Bea Cukai Medan di Bandar Udara Internasional Kualanamu beralih kewenangannya ke Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu. Sampai saat ini kami masih berbenah untuk administrasi 30-40% dari medan,” ujar Zaky.

Kantor yang berlokasi di Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Kualanamu ini mempunyai moto “P R O F E S I O N A L”. Mengandung arti bahwa semua kegiatan pelayanan, pengawasan dan administrasi dilakukan dengan pengetahuan,

keahlian dan kompetensi yang tinggi serta mengedepankan kepedulian hati dalam mencapai kepuasan pengguna jasa dan keteguhan hati dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Dalam wawancara yang dilakukan di kantornya, Zaky mengakui dalam tahap awal tentunya belum dapat meng-*claim* keunggulan dari kantor ini dikarenakan kantor ini masih relatif baru, masih banyak hal yang perlu disempurnakan seperti penyempurnaan infrastruktur dan fasilitas kantor agar berkualifikasi kantor modern,

baik berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan; Penyempurnaan proses bisnis dan sistem prosedur kegiatan kantor, baik menyempurnakan SOP, Standar waktu layanan dan inovasi yang telah kami hasilkan; dan Pemberdayaan SDM.

"Kami yakin di awal berdirinya suatu kantor, harus dibuat *blue print* perencanaan yang matang dan melihat pengalaman sebelum-sebelumnya serta diperlukan usaha yang jauh luar biasa sehingga akselerasi kantor ini menjadi kantor modern dapat segera terwujud secara baik dan dapat meningkatkan citra DJBC."

Walaupun begitu Kantor Bea Cukai Kuala Namu terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Beberapa inovasi yang dilakukan adalah:

Inovasi sistem Aplikasi yang tergabung dalam HORAS Kuala Namu (Home of Revolution Application System) dimana terdapat sub aplikasi seperti PIBK-Off Line, Sistem Aplikasi Rush Handling (SARH) Sistem

Aplikasi Arsip, dan Sistem Aplikasi TPP.

Inovasi sistem pengawasan yang bernama SI-POPAI (Sistem Aplikasi Pemeriksaan & Pelaporan Maskapai) dimana sistem aplikasi ini dapat digunakan sebagai sistem pelaporan dan analisa dari penumpang yang datang dari luar negeri ke Kuala Namu.

Official website Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu, dalam website ini ada hal yang unik dimana terdapat rubrik Sumatera Utara yang menampilkan segala sesuatu keunikan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini kami buat karena Bandar Udara Internasional Kualanamu sebagai salah satu pintu masuk utama destinasi wisata di Indonesia.

Ada beberapa layanan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Kuala Namu seperti pelayanan Impor dan ekspor barang cargo di TPS Area Pergudangan Bandar Udara Kualanamu dan sekitarnya, pelayanan penumpang di Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Bandar Udara Internasional Kuala Namu, pelayanan administrasi

kepabeanan yang dilakukan di Kantor Bea Cukai Kuala Namu, dan pelayanan penyelesaian barang di TPP, Pelayanan Kepabeanan Toko Bebas Bea.

Sarana pengangkut yang menjadi domain pengawasan di Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu adalah pesawat udara. Tentunya ada bentuk pengawasan diantaranya, sebelum kedatangan sarana pengangkut, saat kedatangan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran dan penimbunan barang impor, pengawasan fisik barang impor dan ekspor, dan pengawasan penumpang dan barang bawaan penumpang.

Tentu tugas dan fungsi DJBC juga diterapkan di Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu seperti *Trade Facilitation* dengan bekerja sama dengan Pihak Pengelola TPS terkait pelayanan sampai dengan pesawat terakhir (tengah malam) agar sebagai bentuk memfasilitasi perdagangan. Untuk sektor ekspor, Bea Cukai Kuala namu mendorong UMKM di Sumatera Utara yang berorientasi ekspor terutama hasil laut dan hasil pertanian.

Segi *Industrial Assistance*, Banyak Pengusaha KB dan non KB di Sumatera Utara dan Riau mengirim barang impor (terutama spare part) melalui Bandar udara Internasional Kuala Namu, peran kami memberikan kecepatan pelayanan. Industri Pariwisata sudah mulai meningkatkan karena Danau Toba, Nias dan Sabang menjadi salah satu destinasi wisata di Sumatera sehingga peranan Kantor Bea Cukai dalam memberikan respon yang baik kepada penumpang dalam hal keramahan sangat dibutuhkan.

Melindungi masyarakat juga menjadi bagian dari tugas dan fungsi DJBC (*Community Protector*). Bea Cukai Kuala Namu selama tahun 2015 (Juli-Des) telah menghasilkan 32 Kali penindakan dengan jenis barang yang dominan produk kecantikan,



Layanan Pabean di bandara.



Semua kegiatan pelayanan, pengawasan dan administrasi dilakukan dengan pengetahuan, keahlian dan kompetensi yang tinggi serta mengedepankan kepedulian hati.

obat-obatan/ suplemen, Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP). Dan periode tahun 2016 yang sedang berjalan ini telah menghasilkan 36 kali penindakan dengan jenis barang NPP, produk kecantikan, obat-obatan/ suplemen, Kepiting, Ikan Cupang, Handphone bekas alat kesehatan, sarang burung wallet, MMEA dan hasil tembakau, dll

Sebagai fungsi *Revenue Collector*, Selama tahun 2015 (Juli-Des), Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu dibebankan target penerimaan Bea Masuk Sebesar Rp 10,260 Miliar dengan realisasi penerimaan Bea Masuk yang berhasil dicapai sebesar Rp 13,135M atau tingkat capaian sebesar 125,75 %. Di tahun 2016, Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu diberikan target penerimaan bea masuk sebesar Rp. 28,924M dan realisasi hingga 31 Mei 2016 sebesar Rp. 11,825M atau 40,88%.

“Kami yakin sampai dengan akhir tahun akan mencapai target penerimaan bea masuk yang dibebankan dengan

mengoptimalkan sumber-sumber yang dapat menghasilkan penerimaan bea masuk,” kata Zaky.

Bila melihat dari wilayah Bandar Udara Internasional Kualanamu saat ini yang cukup luas dan rencana pengembangan Bandara selanjutnya, dibandingkan dengan volume dari penumpang dan cargo yang saat ini sebesar 30-40% dari kapasitas yang terpasang, Zaky yakin Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Hub Airport di wilayah Indonesia bagian barat akan jauh lebih berkembang lagi. “Sebagai antisipasi kami telah melakukan dan akan terus meningkatkan komunikasi kepada pihak maskapai, AP II, *Airfreight Forwarding*, Perhotelan, *tourist agency*, Universitas, konsulat yang berada di Medan, dan Pemerintah daerah.”

Kehadiran Kantor Bea dan Cukai Kualanamu tentunya disambut baik oleh masyarakat dan *stake holder* karena akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan bisnis. Bila

melihat perkembangan bisnis *courier service* di Bandar Udara Internasional Kuala Namu sejak berdiri kantor ini mengalami trend pengkatan hingga 20%.

Keluhan masyarakat masih terjadi terkait barang penumpang karena ketentuan lartas dan kewajiban pembayaran BM dan PDRi untuk yang wajib bea. Untuk itu Kantor Bea Cukai Kuala Namu terus lakukan kegiatan kehumasan baik di radio, *greeting passenger*, dan lain-lain agar informasi Kepabeanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diterima dengan baik.

Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu sebagai anggota dari komite FAL Kebandarudaraan, bagian dari komunitasi instansi yang berada di Bandar udara tentunya selalu aktif dalam memberikan saran dan pendapat tentang kebandarudaraan di Kualanamu, terkait pelayanan yang terbaik bagi kedatangan dan keberangkatan penumpang Kualanamu dalam meningkatkan peran hub airport ke luar negeri dan dalam negeri.

Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu memainkan peran yang dominan sebagai motor penggerak agar tersedianya fasilitas Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) yang memadai dan terpenuhinya peraturan CIQ di Bandar udara Internasional Kualanamu. Dalam sinergitas penegakan hukum khususnya *interdiction*, Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu telah bekerja sama aktif dengan pihak BNN, BNNP, POLDA dan Polres Deli Serdang serta Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum penindakan Narkotika, Prekursor dan Psikotropika. Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu juga menyediakan ruangan khusus sebagai *interdiction room* yang digunakan bersama oleh para penegak hukum di bidang pemberantasan dan penindakan narkotika.

Kepala Sub Bagian Umum, **Ade Zirwan**, menambahkan bahwa Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu memiliki gedung utama sebagai pusat pemberian pelayanan publik kepada pengguna jasa dan saat ini terus dilakukan penyempurnaan agar terpenuhinya konsep kantor modern, selain itu juga telah dilengkapnya dan beroperasinya ruang arsip, Tempat Penimbunan Pabean yang dikelola secara mandiri, ruang makan khusus, dan ruang ibadah.

Di sisi pelayanan kepada pegawai, disediakan layanan poliklinik, koperasi dan layanan pangkas rambut atau barber shop untuk kerapihan fisik performance pegawai dalam memberikan pelayanan. Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu juga telah dilengkapi mess pegawai yang dapat memuat 20 pegawai yang digunakan sebagai tempat istirahat bagi pegawai yang berdinass malam atau berdinass posko dan kandang Anjing Pelacak Narkotika.

“Sumber Daya Manusia yang kami miliki sebanyak 121 orang pegawai dimana komposisinya 60%

berusia muda di bawah 45 tahun dan 40% didominasi pegawai senior. Saya menginstruksikan agar kolaborasi antara pegawai senior dan junior dengan mengedepankan keunggulan yang dimiliki masing-masing pegawai dan tidak mempermasalahkan kelemahan diantara mereka. Semangat, pengalaman, kepedulian dan inovasi serta memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan yang membuat kantor ini bisa mencapai kesuksesan bersama,” imbuh Ade

Kegiatan kepada pihak eksternal kepada masyarakat tentunya terus dilakukan dikarenakan Kantor Bea Cukai Kuala Namu perlu memperkenalkan diri sebagai entitas baru dan tersebarnya informasi Bea dan Cukai dengan baik, “Bentuk kegiatan yang telah kami lakukan adalah publikasi kepada dunia pendidikan baik Sekolah Menengah Atas dan Universitas, kegiatan kunjungan ke media massa besar di Provinsi Sumatera Utara, bergabung dalam mengikuti kegiatan pameran yang diadakan oleh pemerintah daerah.”

Kegiatan kebersamaan juga dilakukan diantara sesama pegawai tapi masih difokuskan kepada kekompakan, penambahan ketampilan pegawai, kerohanian dan olahraga. Bentuk kegiatan yang telah dilakukan yakni English Club, ceramah agama dan motivasi, olahraga bersama.

“Puncak dari kegiatan eksternal dan internal telah kami proyeksikan di Hari Kepabeanan Internasional di tahun ini. Kami rencanakan setiap tahun ada dua moment bertemuanya kegiatan internal dan eksternal selain tusi yang kami emban di moment Hari Ulang Tahun Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu dan Hari Kepabeanan Internasional,” tambah Ade

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, penyempurnaan terus dilakukan seperti untuk bidang

layanan dengan menyempurnakan layout dan fasilitas penunjang yang reprenstatif di terminal kedatangan internasional, mengaktifkan kasir dan mesin EDC di terminal kedatangan Bandar Udara Internasional Kuala Namu dan mengaplikasikan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008 sebagai jaminan standar pelayanan publik. Untuk bidang pengawasan dengan membangun sistem pelayanan intelijen yang baik dan mengembangkan aplikasi SI-POPAI.

Harapan ke DJBC terkait Kantor Bea dan Cukai Kuala Namu, Zaky ingin fungsi pelayanan dan pengawasan di Bandar udara mendapatkan perhatian lebih terutama untuk penyempurnaan peraturan barang kiriman dan ketentuan barang penumpang serta standar baku penanganan barang penumpang masih sangat minim sehingga butuh standar yang seragam di setiap bandara dan Database Nilai Pabean untuk penetapan Nilai Pabean oleh Kasi PKC (*official assessment*) perlu dibuat.

Tuntutan pengguna jasa dan masyarakat yang tinggi akan kecepatan pelayanan dan sikap petugas merupakan hal yang dominan di Bandar udara, satuan waktu hari tidak berlaku dibandar udara tetapi cukup jam terhadap barang cargo bahkan menit saja.

“Saya mengajak agar semangat dan motivasi yang telah diberikan saat ini diteruskan, saya juga tekankan mari kita mulai berbuat yang terbaik untuk kantor ini dan jangan takut membuat inovasi positif untuk menghilangkan hambatan yang ada, inovasi membuat yang tidak ada menjadi ada, dari yang telah ada disempurnakan terus menurut untuk hasil yang lebih baik. Ubah hambatan menjadi peluang untuk maju, jadikan pekerjaan menjadi sesuatu yang asyik untuk dinikmati,” tutup Zaky.

(Desi Prawita)

BEA CUKAI HIBAHKAN PULUHAN RIBU KILO DAGING KE MASYARAKAT



Menkeu didampingi Menko PMK dan Dirjen BC menunjukkan daging yang dihibahkan.

Menghadapi Hari Raya Idul Fitri, konsumsi sejumlah kebutuhan pokok mengalami peningkatan, termasuk di antaranya konsumsi daging sapi. Mengatasi hal ini, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin terpenuhinya pasokan daging sapi untuk menjaga kestabilan stok di pasaran.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah tersebut dan melaksanakan arahan Presiden, hari ini Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menghibahkan 21.847,22 kg daging sapi kepada fakir miskin di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko PMK yaitu mengkoordinasikan pengelolaan semua bentuk bantuan sosial dan bantuan pangan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Daging sapi ini merupakan

daging sapi asal Australia yang ditegah oleh Bea Cukai Tanjung Priok pada tanggal 30 dan 31 Mei 2016, dikarenakan PT SNJ dan PT ABU sebagai importir melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan sebagaimana tertera pada lampiran III dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang karkas, daging, dan/atau olahan lainnya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Di mana dalam importasi tersebut ditemukan produk hewan yang termasuk dalam jenis yang tidak diperbolehkan untuk diimpor, yaitu berupa 14.400 kg frozen boneless beef trimmings, 5.596,5 kg beef offal "a" neck bones, dan 1.850,72 kg bone in beef tendon.

Barang hasil penindakan ini merupakan barang yang termasuk larangan dan pembatasan yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar di pemberitahuan pabean, sehingga

ditetapkan menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN), yang selanjutnya ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Kemudian peruntukannya dapat dilelang, dihibahkan, atau dimusnahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Untuk diketahui bahwa sebelumnya Bea Cukai Tanjung Priok juga telah melakukan penegahan terhadap 7 kontainer berisi 163 ton daging sapi pada 21 Mei 2016. Dimana saat ini tindak lanjut penanganan barangnya telah ditetapkan untuk dilelang.

Bea Cukai memiliki komitmen kepada rakyat dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, sehingga kegiatan ini merupakan langkah taktis sebagai bentuk tanggung jawab moral Bea Cukai kepada masyarakat agar kebutuhan pasokan daging menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat terpenuhi. (*)



Dirjen BC berikan keterangan usai pertemuan dengan KPK.

Inisiatif KPK untuk Penguatan Sistem, Tugas dan Fungsi Bea Cukai

Bea Cukai dituntut untuk selalu melakukan upaya penguatan sistem dan tata kelola pelayanan dan pengawasan serta upaya-upaya pencegahan tindakan-tindakan yang mengganggu pendapatan pendapatan keuangan negara. Dan sesuai dengan arahan Presiden RI dalam menjalankan tuntutan tersebut, bea cukai berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait. Bentuk koordinasi salah satunya pertemuan yang diinisiatifkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Selasa, 7 Juni 2016 di Gedung KPK.

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Deputi Pencegahan, Pahala Nainggolan, dan beberapa direktur terkait. Kemudian dari Bea Cukai hadir Dirjen Bea Cukai, Heru Pembudi dengan didampingi oleh beberapa Direktur Teknis seperti Direktur Penidakan dan Penyidikan, Harry Mulya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Marisi Z. Sihotang, Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai, M. Sigit, Direktur Kepatuhan Internal,

Hendra Pramono, Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Sugeng Apriyanto, dan Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Robert Marbun. Pertemuan yang dilanjutkan dengan diskusi ini yang dimoderatori oleh Direktur Gratifikasi, Giri Suprapdiono.

Dalam pertemuan ketiga kali ini, dilakukan untuk membahas beberapa hal. Seperti disampaikan oleh Pahala, *pertama*, KPK ingin mengamankan penerimaan negara yang kemudian akan dibentuk tim penerimaan negara salah satunya Bea Cukai, termasuk juga tim Pajak dan PNBP. "Penerimaan ini misalnya yang seharusnya bayar bea masuk tapi tidak bayar jadi penyelundupan," ujar Pahala.

Kedua, KPK ingin bantu Bea cukai untuk penguatan pencegahan mekanisme internal, contoh bila ada temuan dari inspektorat, atau kepatuhan internal supaya diperkuat KPK dan bisa diimplementasikan segera. *Ketiga*, kita ingin membantu Bea Cukai apabila ada intervensi dari luar, misalnya untuk proses pengadaan pita

cukai. Kita akan kirim sinyal yang kuat kepada pihak-pihak luar dan membantu Bea Cukai untuk proses pengadaan yang *proper* atau yang tepat dan sesuai dengan aturan," tegas Pahala.

Ketigal hal tersebut akan dirangkum dalam bentuk korsup (koordinasi dan supervisi). Hasil pertemuan akan segera ditindaklanjuti dan minggu depan akan langsung dibentuk tim bea cukai dan lainnya yang relevan dan berkaitan.

Heru menambahkan akan ada pertemuan rutin antara Bea Cukai dengan KPK dan siap menindaklanjuti rahan-arahannya yang disampaikan pada pertemuan. Dicontohkan Heru, Presiden sedang memberikan perhatian masalah kebutuhan bahan pangan menjelang lebaran bea cukai siap dengan membuat kebijakan dan penindakan terhadap barang-barang ilegal yang masuk tidak sesuai aturan seperti kasus tertangkapnya 7 kontainer daging impor yang tidak diberitahukan sebagai daging tetapi sebagai monosodium phosphate. "Kita merasa terbantu karena akan adanya atensi dari KPK terhadap penindakan dan pengawasan impor barang-barang yang ilegal," tambahnya.

(Desi Prawita)

Bea Cukai Berantas Tekstil dan Produk Tekstil Ilegal

Menindaklanjuti instruksi presiden untuk melakukan operasi pemberantasan penyelundupan tekstil, Bea Cukai terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha yang diwakilkan oleh asosiasi.

Pada 9 Juni 2016 kemarin, Bea Cukai bertemu dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), DAN Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia untuk meriview situasi pasar dalam negeri, meng-update masyarakat tentang kinerja Bea Cukai sekaligus untuk menghimpun informasi mengenai kondisi dan perkembangan pasar dari pelaku industri tekstil dan produk tekstil, sepatu, dan pelaku industri serat dan benang.

Sebagai bukti keseriusan dalam melindungi tekstil dan produk tekstil baru-baru ini Bea Cukai melakukan Patroli Laut Gabungan dengan nama sandi ‘Operasi Gerhana’ yang berlangsung dari 7 April sampai dengan 6 Mei 2016

Unsur satuan tugas patroli laut yang dilibatkan adalah Kanwil Bea Cukai di seluruh pulau Sumatera dan didukung oleh Pangkalan Kapal Tanjung Balai Karimun dan Batam. Selain menangkap penyelundupan pakaian bekas, Operasi Gerhana berhasil mengungkap penyelundupan bawang, dan berbagai jenis barang lainnya.

Selain itu, untuk memperkuat Operasi Gerhana, Bea Cukai juga melakukan “Operasi Batik” yang berlangsung 23 Mei sampai

dengan 4 Juni 2016 di Pelabuhan Pesisir Timur Sumatera (Tanjung Balai Asahan, Dumai, Tembilahan, Pekanbaru, Jambi), Pelabuhan Utama (Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, Merak, Palembang, Bandar Lampung), Bandar Udara Utama (Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, Kualanamu, Halim), dan Dry Port (Cikarang, Bandung).

Dirjen Bea Cukai, Heru Pembudi mengungkapkan kasus penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat yang juga berhasil ditertibkan oleh Bea Cukai di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Modusnya komoditas tekstil tidak dimasukkan ke dalam kawasan berikat namun dipindah tanggalkan ke pihak lain dan menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

“Dari kasus tersebut, 11 orang dijadikan tersangka dan 4 orang sudah divonis dan sisanya sedang ditinjau dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan,” ujarnya, kepada wartawan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis, 9 Juni 2016.

Penindakan terhadap komoditas tekstil dan produk tekstil menunjukkan tren kenaikan. Pada periode 1 Januari sampai dengan 08 Juni 2016 terdapat 216 jumlah penindakan komoditas tekstil dan produk tekstil. Sedangkan, penindakan terhadap pakaian bekas juga menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 2.563 bales di tahun 2014, 5.938 bales di tahun 2015, dan 6.814 bales di tahun 2016.

“Koordinasi Bea Cukai dengan asosiasi dan para pelaku usaha di bidang tekstil dan produk tekstil akan terus dilakukan dan sudah menjadi komitmen Bea Cukai untuk mendorong dan melindungi industri dalam negeri serta memfasilitasi perdagangan,” tegas Heru.

Dalam kesempatan ini, Heru juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak membeli barang selundupan dan selalu mengutamakan produk-produk dalam negeri.

“Apabila masyarakat kita menggunakan, apalagi, sampai membeli barang impor artinya tanda kemunduran untuk bangsa kita,” ujarnya.

Ade Sudrajat Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang ikut hadir bersama Dirjen mengatakan operasi telah berdampak positif bagi perkembangan tekstil dalam negeri. Jika sebelumnya tekstil dan produk tekstil nasional penuh dalam gudang alias tidak laku. Tapi setelah Bea dan Cukai melakukan operasi seperti cuci gudang.

Penasehat API Beny Sutrisno mengakui operasi BC berdampak positif bagi tekstil nasional tapi karena TPT sub sektornya banyak seperti serat dan lain lain operasi tersebut masih belum menyentuh semua subsektor. “Dalam kontek usaha teman-teman Bea Cukai sudah memberikan dampak full utilisasi. Saya mengimbau kepada teman-industri untuk sadar dalam hal kinerja. Kita juga harus supot beliau-beliau ini agar kinerjanya dapat berjalan dengan baik,” timpalnya.

(DesiPrawita)

Workshop Pengelolaan Kepegawaian DJBC 2016

Proses kenaikan pangkat (UKP) merupakan kegiatan rutin setiap enam bulan sekali yang berlangsung pada bulan April dan Oktober. Namun Urusan Kenaikan Pangkat (UKP) meski sudah menjadi kegiatan rutin tetapi diakui dalam prakteknya baik teknis maupun non teknis di lapangan masih ditemui kendala dan permasalahan. Melalui workshop ini kendala dan permasalahan tersebut akan disamakan persepsinya mengenai hal-hal apa saja yang menjadi urusan kenaikan pangkat.

Pada prinsipnya untuk waktu mendatang terkait dengan UKP khususnya di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan memberdayakan sistem aplikasi. Demikian disampaikan Kepala Subbagian Mutasi Kepegawaian dan Bagian Administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sumarna.

Lebih lanjut Sumarna menyatakan, jika mencermati data jumlah berkas yang terdapat pada bulan April 2014 memang jumlahnya cukup besar mencapai 1112 berkas, pada saat itu pengurusannya masih dengan menggunakan hardcopy, mengirimkan data dan prosesnya masih secara manual.

Kemudian pada Oktober 2014 datanya mulai menurun tinggal 356 berkas. Selanjutnya pada April 2015 naik lagi menjadi 924 berkas dan pada Oktober 2015 jumlah berkas relatif semakin kecil, jumlahnya separuh dari jumlah berkas sebelumnya. Dan secara proses di internal kepegawaian Kantor DJBC, sudah membuat sistem bernama SITALIK, Sistem Tata Administrasi Layanan

Informasi Kepegawaian. Di April 2016, SITALIK ini sifatnya masih merupakan aplikasi yang tersendiri tetapi akan diupayakan pada periode Oktober 2016, SITALIK ini diharapkan sudah bisa di kloning, di insert ke SIMPEG DJBC. Sehingga proses pengajuan UKP di DJBC sudah bisa melalui SIMPEG.

“Ini perkembangan sejak 2014 hingga saat ini. Mudah-mudahan semakin baik dan memang dalam prakteknya sistem dan kondisi yang semakin baik akan semakin mempercepat proses. Untuk Oktober 2016 disamping karena jumlah sedikit mudah-mudahan kendala dan permasalahan yang kita alami bisa diminimalisir,” lanjut Sumarna.

Selanjutnya materi mengenai proses pemanfaatan sistem SITALIK Ver.2 dijelaskan kepada para peserta workshop yang notabene adalah para pegawai dan pejabat pengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dari seluruh Kantor Bea dan Cukai di Indonesia mulai dari Kantor Wilayah DJBC Aceh sampai Kantor Wilayah DJBC MPPB.

Disamping itu sebagai pembicara tentang Kepangkatan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) disampaikan oleh Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian, **Soeharto** dan Kasi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian, **Sujarwoto**, yang menyampaikan materi tentang Kenaikan Pangkat PNS dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Sedangkan dari Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan disampaikan oleh Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan, Erma Zulaichah yang menyampaikan mengenai Rapat Hasil Evaluasi Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016 dan Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2016 yang berlangsung pada tanggal 2 Juni 2016 lalu di Biro SDM, Gedung Juanda, Kementerian keuangan.

Erma juga menegaskan mengenai batas waktu usul kenaikan pangkat untuk diajukan oleh Bagian Kepegawaian DJBC periode kedua (Oktober) tahun ini sampai ke Biro SDM tanggal 29 Juli 2016, karena batas waktu yang diberikan BKN adalah 31 Agustus 2016. Acara yang berlangsung selama dua hari , 23-24 Juni 2016, dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Bea dan Cukai, **Azis Syamsu**.

Disamping kedua materi tersebut, pada hari pertama disampaikan materi tentang kepangkatan dari Tim Pangkat, Bagian Administrasi Kepegawaian menyajikan materi tentang Monitoring UKP Periode 1 Oktober 2016, dilanjutkan dengan Sosialisasi PER-55/BC/2010 (Penghargaan Pegawai) dan Sosialisasi PER-5/BC/2015 tentang SIMPEG.

Pada hari kedua materi yang disampaikan adalah Sosialisasi Program Pengembangan Kepegawaian oleh Bagian Pengembangan Pegawai. Dilanjutkan dengan Sosialisasi PER-31/BC/2014 (Pola Mutasi) oleh Bagian Administrasi Kepegawaian. Setelah sesi tanya jawab, Sekditjen Bea dan Cukai, **Kushari Suprianto** menutup acara setelah sebelumnya memberikan sambutan kepada para peserta workshop.

(Ariessuryantini)

Berlari Mengejar Mimpi

Roy Maihendra Wijaya

Olahraga lari seperti sudah mendarah daging baginya. Menurut lajang kelahiran Malang Jawa Timur 32 tahun silam, ini lari bukan hanya urusan melempar kaki ke depan, akan tetapi usaha menjaga semangat dan konsistensi. Perubahan kecil pada setiap langkah akan berdampak besar di garis akhir

Bagi Roy tak ada yang menggembirakan hatinya selain berlari. Semasa kecil, ketika semua anak seusianya gandrung akan sepakbola, Roy bergeming, ia tetap memilih lari. Cabang olahraga yang konon tertua di dunia itu mulai dicintai dan digelutinya ketika ia masih berseragam sekolah dasar di Malang.

Lulusan STAN angkatan 2006 ini awalnya mengaku iseng berlari, karena sebelumnya sempat menekuni olahraga renang. Namun, Roy kecil lama kelamaan ketagihan berlari. "Untuk lari sendiri iseng, olahraga yang gak terlalu mikir. Walaupun sekarang saya baru tahu bahwa lari banyak teknik-tekniknya, jadi tidak sesimpel itu," ujarnya.

Pertama kali event yang diikutinya adalah Mandiri Run 2014. Hasilnya cukup lumayan, ia



masuk 10 besar dan berhak mengikuti gratis Jakarta Marathon 21 Kilometer. "Dari mulai itu saya jadi keterusan. Di kantor Halim (KPPBC Jakarta) ada kegiatan rutin Customs Jakarta Runner, setiap Rabu pagi lari," imbuhnya.

Dari puluhan event yang pernah diikutinya, Roy berhasil naik podium sebagai jawara sebanyak

tiga kali ketika Marine Customs Run 2015, ajang serupa di 2016 di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, dan Samosir Lake Toba Ultra di Sumatera Utara di kelas 25 Kilometer. Di Marine Customs Run 2015 kategori Pegawai Bea Cukai, Roy berhasil menyabet juara pertama mengalahkan juara tahun sebelumnya, Khaerul



Syah. Waktu terbaiknya di event 10 Kilometer itu selama 40 menit 27 detik.

Roy sadar sebagai pegawai Bea Cukai harus mampu membagi waktu antara pekerjaan dan hobinya berlari. Ia pun sadar bahwa dirinya bukanlah seorang pelari profesional. "Setiap hari saya tetap bekerja seperti biasa, jadi waktu latihan disempatkan se bisa mungkin. Kadang pagi, sore, atau malam hari saya tetap berlari."

Sekilas dari fisiknya, kemampuan Roy sempat dipertanyakan banyak orang. Rekan-rekan sekantornya sempat berkelakar, "emang si Roy bisa lari..?" Setelah menang di Marine Customs Run di 2015, ia sempat *underpressure*. Beban juara yang telah diraihnya membuat orang di kantor selalu bertanya, "dapat gak si Roy?" atau "juara berapa si Roy?"

Hampir setiap *event* lari *trail* yang pastinya di pegunungan Roy sempat 'nyasar' atau salah mengambil jalur. Bahkan pada *event* lari *trail* di lereng Gunung Lawu, Roy sempat 'nyasar' di tempat di mana tidak ada yang 'nyasar' di tempat itu. Namun bagi Roy itu semua adalah bagian dari proses untuk mencapai garis akhir. Pada *event* Bromo Tengger Semeru 30 Kilometer tahun 2015, Roy terus melaju dan menjadi WNI keempat yang *finish* di *event* tersebut. Sepertinya tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Selama masih bisa berlari, ia akan terus berlari.

Mengenai latihan, menurut Roy setiap latihan memiliki fungsi masing-masing. Ada saatnya untuk melatih kecepatan, ada saatnya untuk melatih daya tahan, dan ada juga saatnya



berlari untuk memulihkan kondisi (*recovery run*). Ada waktunya untuk berlari setiap hari dalam satu pecan, dan ada juga saatnya ketika harus istirahat dari lari satu minggu penuh.

Anak kedua dari empat bersaudara ini mengaku berambisi menuntaskan marathon *road run* dengan capaian waktu 3,5 jam atau dibawahnya. "Selama ini catatan waktu saya masih 4 jam," ujarnya. Untuk mengasah kemampuan lariinya, Roy selalu mengikuti lomba lari internasional. Ia pernah mengikuti *Trail Run* di Vietnam dan Singapura pada 2015 lalu.

Ia juga pernah ikut Lintas Sumbawa 100 Kilometer, lintas Gunung Merapi, Gunung Bromo-Tengger-Semeru, Gunung Salak, Gunung Sibayat, Gunung Pangrango. Dan, dalam tempo dekat ia berencana mengikuti *event* Rinjani Ultra di Pulau Lombok. "Sekalian jalan-jalan ke tempat baru, berolahraga, dan bonusnya lumayan," tambah Roy.

"Sebenarnya saya tak tahu gunung. Saya bukan anak gunung. Saya anak tengah kota yang tahunya hanya mall," kelakarnya. Sekadar berbagi tips, menurut Roy sebagai seorang pelari pastinya membutuhkan nutrisi yang cukup yang dibutuhkan tubuh, dan yang paling penting baginya adalah istirahat. "Karena bagi saya mendingan kehausan daripada kurang tidur," ujar pria kalem penggemar semua jenis kuliner nusantara ini.

(pomo)





- Esther ButetSiahaan** Selamat Bea Cukai RI khususnya @bea_cukai Soekarno Hatta, yang telah berhasil menangkap sabu...
62kg bukan jumlah yang sedikit.Ratusan Ribu nyawa yang kalian selamatkan. Mungkin salah-satu nya bisa saya sendiri atau mungkin orang2 yg saya cintai... Bravo buat @Bea Cukai RI !
- Bea Cukai RI semakin lebih baik!!!
Like · Reply · Message · 13 hrs
- Apendi Crb-jbr** Mantaaaaap
Like · Reply · Message · 13 hrs
- Rachmatul Iksan** Kita bangga punya pasukan yg bisa menghentikan obat potaka
- Like · Reply · Message · 2 hrs
- Kukuh Sawani Hanggra** Ingin rasanya bergabung dengan team bea&cukai untuk menjaga anak bangsa sukses buat BC Indonesia sukses selalu
- Like · Reply · Message · 10 hrs
- Amir Hasan A** Salah satu tugas dan fungsi DJBC sudah dilaksanakan dan masih terbatas pada daerah tertentu yg sudah memiliki KB/PDKB. kami mendukung dan mengucapkan selamat atas keberhasilan ini sebagai salah satu kontribusi kita pada NKRI
- Like · Reply · Message · 1 July 16 at 7:51am · Edited
- Achmad Bachrudin Qorib** Penjaga Gerbang NKRI wilayah kepabeanan.. selaras dgn kerja2 TNI Goodluck Always for Customs Officers
- Like · Reply · Message · July 2 at 9:58pm
- Rido Fadila** Apalagi dari bea cukai yang menjaga perbatasan tidak mengenal libur. Bea cukai makin baik!!!!
- Like · Reply · Message · 1 July 3 at 8:54am
- Santoso Nugroho** Good job.bravo customs
- Like · Reply · Message · 17 mins
- Lisa Galung** Mantap tim sukses bea cukai . Bravo :-)
- Like · Reply · Message · 4 hrs

- Ridwan** jika saya beli 2 barang berbeda masing masing 30\$ dari toko yang berbeda dan di hari yang berbeda, tapi ketebulan nyampe beacukai di hari yang sama, apa kena pajak kira diaanggap diafas 50\$?
Like · Reply · Message · July 22 at 3:15am
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** Selamat pagi, Sdr. Ridwan.
- Jika dokumen pabean PP22A (PT Pos Indonesia) atau PIBK (Perusahaan Jasa Tilitan) diajukan secara bersamaan maka terhadap barang kiriman dengan nama dan/atau alamat tujuan yang sama dimungkinkan nilai pabean-nya akan digabungkan. Kewenangan penetapan nilai pabean oleh Pejabat Bea Cukai yang memerluka barang kiriman Anda.
- Info selanjutnya silakan hubungi Bravo Bea Cukai 1500225 atau email ke info@customs.go.id.
- Terima kasih.

- Rahma Indra Wardani** Sejauh mana masyarakat umum dikutsertakan dalam mengidentifikasi dan melaporkan rokok ilegal, Pak?
- Apakah ada mekanisme pelaporan melalui aplikasi telepon pintar yang dapat dipergunakan dengan mudah oleh masyarakat seperti yang dikembangkan di Filipina?
- Like · Reply · Message · July 11 at 10:36pm
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** Selamat pagi, Sdr. Rahma Indra Wardani.
- Jika Anda mengetahui dugaan pelanggaran disiplin pegawai dan/atau dugaan tindak pidana Kepabeanan dan cukai dapat mengirimkan informasi dimalsud beserta data pendukung melalui laman <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau hubungi Bravo Bea Cukai dengan nomor telepon 1500225 dan surel info@customs.go.id.
- Terima kasih.

- Ardian Maulana** bravo,,, zero for crime
- Like · Reply · Message · 10 hrs
- Ichsan Arsid** Mantap jaya
- Like · Reply · Message · Yesterday at 1:32pm
- Usman Abu Atha** Beacukai makin baik
- Like · Reply · Message · 22 hrs





Pembelian Barang Elektronik dari Luar Negeri

PERTANYAAN:

Dear CS,

Saya mau membeli 1 (satu) buah handphone/telepon seluler google yang tidak dipasarkan di Indonesia seharga \$300 dan ongkos kirim \$13 via FedEx. Barang dikirimkan dari US. Mohon informasinya tentang:

1. Apakah pembelian telepon seluler untuk pribadi masih bisa/dijinkan?
 2. Kira-kira berapa estimasi bea masuk dan pajak yang akan dikenakan/dibayarkan?
- Terima kasih.

-Yudhi-

JAWABAN

Yth. Sdr. Yudhi

Terima kasih telah menghubungi info@customs.go.id.

Terkait dengan pertanyaan Saudara mengenai pembelian telepon seluler dari luar negeri melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), kami sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendag 82/2012 jo Permendag 38/2013 terhadap impor Telepon Seluler (8517.12.00.00) melalui barang kiriman Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman;
2. Terhadap barang kiriman melalui PJT diberikan pembebasan Bea Masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan PMK 188/2010;
3. Untuk mengestimasi besar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, Saudara dapat mengakses secara *online* aplikasi Kalkulator Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dalam tautan <http://bctemas.beacukai.go.id/kalkulator/>. Saudara dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui *Google Playstore*.

Demikian kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Bravo Bea Cukai 1500225 atau membalsas email ini.

Salam

Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi

Welcome to Jordan, The Hashemite Kingdom!



Tenda-tenda putih gading dengan atap berbentuk lancip itu tampak begitu menawan. Aku memandanginya beberapa saat sebelum memasuki Air Arabia dari atas tangga pintu belakang. "Aku pasti merindukan negeri ini," gumamku dalam hati.

Seorang pemuda berhidung mancung dan beralis tebal menyapa kami dengan ramah. Ia menuturkan kalau dirinya berdarah Palestina. Hanya saja ia tidak pernah kembali ke Palestina, meskipun ia begitu merindukan negeri asalnya itu. Kini ia telah menetap dan menjadi warga

negara Yordania. Bersama seorang pramugari, ia dengan tangkas melaksanakan tugasnya sebagai pramugara.

Entah mengapa orang-orang yang kami jumpai di sini semuanya ramah-ramah. Sebelumnya, di dalam bus yang membawa kami dari ruang tunggu menuju pesawat, kami juga bertemu seorang perempuan berdarah Palestina. Ia berasal dari Jerusalem, namun tinggal di Amman karena suaminya berkewarganegaraan Yordania. Sesekali ia menyempatkan diri berkunjung ke tanah kelahirannya untuk menemui kerabatnya. Dalam Bahasa Inggris ia

menjelaskan mengapa ia mudah keluar masuk Palestina padahal harus melewati pemeriksaan ketat tentara Israel, "Karena saya wanita. Kalau pemuda, apalagi berjenggot, maka dia sulit untuk masuk Palestina."

"Bagaimana dengan kami? Sebagian kami mempunyai jenggot," tanya salah seorang teman.

"Tidak ada masalah. Aman kok. Kalian bisa masuk Jerusalem karena kalian tidak berdarah Palestina."

Layar-layar monitor membuka di sisi kanan dan kiri kabin di atas tempat duduk kami. Beberapa anak laki-laki dan perempuan



yang sangat imut muncul pada layar. Dengan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris mereka terlibat percakapan kecil tentang bagaimana mengenakan *seat belt*, bagaimana menggunakan pelampung, dan bagaimana menggunakan alat bantu pernafasan jika terjadi *force majeur*. Tampilan monitor diakhiri dengan tuntunan doa sebelum melakukan perjalanan (safar). Tak lama kemudian pesawat yang kami tumpangi lepas landas meninggalkan King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi, menuju Queen Alia International Airport, Amman, Jordania.

Tepat ketika ‘adzan zhuhur berkumandang, kami tiba di Amman. Semilir angin dalam suhu 13 °C dengan lembut menyambut kulit-kulit kami. Mahdi Yanes menuntun kami untuk mengawali perjalanan dengan membaca doa safar. Dalam Bahasa Indonesia yang cukup lancar, pria keturunan Italia itu memperkenalkan Jordania kepada kami pada banyak sisinya; letak geografis, komposisi penduduk, potensi alam, dan kehidupannya. Ia bercerita 20 (dua puluh) tahun yang lalu



pernah ke Indonesia. Maka demi cinta dan rindunya kepada Indonesia serta kebahagiaannya bertemu orang-orang Indonesia, Mahdi dengan ramah membagi-bagi *barazek*, kue renyah khas Suriah yang konturnya berbalut panggang wijen, madu, dan pistachio. Bersama Ali Abu Shakra, Mahdi menjadi *guide* kami selama di Jordania.

“Jordan tidak punya minyak bumi, tapi kaya dengan minyak zaitun. Ekonomi Jordan bergantung pada semen, potassium, dan sulfat. Hujan Cuma 10 (sepuluh) kali dalam setahun di Jordan. 95% penduduk Jordan muslim sunni. Sisanya Kristen Ortodoks dan Yahudi,” kata Mahdi.

Benar apa yang dikatakan Mahdi. Sepanjang jalan dari bandara menuju pusat Kota Amman kami melihat banyak kebun zaitun menghampar luas. Pemandangan itu membuatku teringat salah satu ayat Al Quran, “*Wat tini waz zaitun*, Demi buah tin dan zaitun.”

Kami sholat jama’ zhuhur dan ‘ashar di Masjid Ahlul Kahfi, Amman. Siang itu matahari cukup terik, tetapi angin berhembus sangat dingin. Brrrrr... seperti

air es rasanya ketika tangan dan kaki kami basuh untuk berwudhu. Sebenarnya kran di tempat wudhu bisa *di-setting* untuk *hot or cold water*, namun sayangnya sedang tidak berfungsi.

Masjid Ahlul Kahfi memiliki sebuah menara dengan kubah di atasnya. Halamannya bersih dan luas. Terdapat beberapa kran yang mengalirkan air siap minum di halaman. Ruang sholat antara laki-laki (*men prayer*) dan perempuan (*women prayer*) dipisah sehingga tidak saling melihat. Di samping masjid terdapat sebuah bukit dengan pepohonan hijau. Ada banyak goa yang dibangun dengan gaya aristekturn Romawi di bukit itu. Salah satunya *Cave of the Seven Sleepers* atau Goa Ash-habul Kahfi yang kisahnya diabadikan dalam Al Quran Surat Al Kahfi.

Sebagian orang berpendapat Goa Ash-habul Kahfi berada di Efesus, Anatolia, Turki dan jasad para pemuda kahfinya berada di Suriah. Namun, ahli sejarah sepakat bahwa Goa Ash-habul Kahfi yang asli adalah yang berada di Amman, tempat yang kami kunjungi ini.

Goa Ash-habul Kahfi menjadi saksi keimanan 7 (tujuh) orang pemuda dalam menyelamatkan tauhidnya dari kezhaliman raja pada masa itu. Mereka ditemani seekor anjing yang bernama Qithmir. Para pemuda kahfi Allah tidurkan di dalam goa selama 309 tahun sebagai bukti keagungan Allah. Ketika terbangun, anjingnya telah menjadi tulang belulang. Karena merasa lapar, salah seorang dari mereka keluar goa untuk membeli makanan ke pasar yang tidak jauh dari situ. Ternyata uang yang mereka miliki sudah tidak berlaku. Pemuda itu pun kembali ke goa untuk mengabarkan hal itu kepada teman-temannya. Sesampainya di goa, Allah wafatkan mereka semua.

Guide kami, Ali Abu Shakra

menjelaskan, "Sekitar 100 tahun yang lalu arkeolog menemukan tulang belulang manusia yang diduga sebagai tulang para pemuda kahfi dan tulang anjing di dalam goa ini. Tulang-tulang manusia tersebut dikuburkan di dalam goa ini, sedangkan tulang anjing disimpan di salah satu museum Yordania. Arkeolog juga menemukan pasar yang tertimbun di dalam tanah tidak jauh dari lokasi goa ini. Di pasar itu ditemukan uang-uang koin pada masa lalu dan bentuk bangunan menyerupai pasar."

Seusai dari goa, kami singgah ke Tawaheen al-Hawa Restaurant, sebuah restoran Libanon yang menyajikan menu Timur Tengah. Mahdi menerangkan, masyarakat Yordania biasa makan siang sekitar pukul 3-4 sore. Maka tidak mengherankan ketika kami memasuki lantai dua restoran itu sudah sangat ramai. Ada banyak meja di ruangan yang cukup luas itu dimana satu meja diperuntukkan bagi 8 (delapan) orang. Di tengah-tengah ruangan terdapat lampu kristal yang sangat indah. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan kanvas yang artistik. Seorang pelayan laki-laki berbaju putih lengan panjang dengan rompi hitam dan dasi kupu-kupu hilir mudik melayani pengunjung. Dari aneka makanan yang dihidangkan, tidak ada secuil pun yang namanya nasi! Per orang dikenai biaya USD 20 untuk makan siang hari itu.

Gerimis kecil yang berpadu dengan suhu dingin malam itu membuat badan kami menggigil. Kami menginap di Arena Space Hotel, sebuah hotel bintang empat di tengah Kota Amman. Foto King Abdullah dan istri beliau yang berdarah Palestina, Rania, terpajang di lobi. Ali dan Mahdi memberitahukan jadwal *dinner* pukul 8 dan *breakfast* pukul 6. Tidak ada nasi dalam menu yang disajikan. Adanya tomat, mentimun, zaitun, keju,

aneka kue basah dan kering, telur rebus, telur dadar, wortel, sayuran segar, biji-bijian, melon, pepaya, dan beberapa jenis minuman; air mineral, susu, teh, dan jus jeruk.

Selesai sarapan kami meneruskan perjalanan ke Petra yang ditempuh selama 5 (lima) jam dari Amman. Kalau Amman terletak di Yordania Utara yang berkontur perbukitan hijau subur, maka Petra terletak di Yordania Selatan yang gersang. Gurun Arab menghampar sejauh mata memandang di sebelah kanan dan kiri. Di tengah perjalanan kami singgah ke toko souvenir Abu Shakra untuk menumpang sholat, buang air, dan membeli oleh-oleh.

Petra yang juga disebut Wadi Musa, dalam Bahasa Yunani berarti batu. Dalam Bahasa Arab disebut Al Batra. Petra terkenal karena di dalamnya terdapat 800 patung individu disertai dengan bangunan-bangunan, makam, pemandian, kuil, gerbang melengkung dan jalanan yang beratap yang kebanyakan dipahat dari batu pasir. Di sekitar Petra ada banyak penginapan. Ketika bus yang kami tumpangi memasuki parkiran, belasan gadis remaja Yordania seusia SMA melambai-lambaikan tangan sambil tersenyum ceria kepada kami. Dengan ramah mereka menyapa kami, "Halo, Indonesia! Welcome to Jordan!"

Menurut catatan sejarah, Petra adalah ibukota Kerajaan Nabatean pada masa sebelum Masehi. Mereka memahat bangunan dan goa-goa pada batu-batu raksasa di tempat itu. Salah satunya yang paling indah dan besar disebut *Treasury*, sebuah pahatan bangunan menyerupai istana. Menurut informasi dari Mahdi, bangsa Nabatean memahat *Treasury* dari atas ke bawah agar pahatannya tidak hancur karena batu-batu di lokasi itu sejatinya hanya batu pasir yang memadat. Pada masanya, Petra dikenal sebagai kota modern

yang mempunyai pertahanan kuat, bangunan indah, dan sistem pengairan yang rumit atau canggih. Ali menjelaskan, "Ada yang menerangkan bahwa goa-goa itu digunakan untuk menguburkan mayat. Semakin bagus dan rumit pahatannya menunjukkan semakin tinggi strata sosialnya. Dan yang paling megah pahatannya adalah *Treasury*."

Di sekitar *Treasury* ada banyak penjual souvenir berupa gelang perak berukir dengan harga USD 1 per gelang, penyewaan kereta kuda dengan tarif USD 30, dan ada juga warga yang menyewakan onta untuk dinaiki pengunjung.

Menjelang senja, kami sampai Wadi Rum (dibaca: Wadi Ram). Wadi berarti lembah, sedangkan Rum adalah nama suku yang mendiami kawasan itu. Wadi Rum merupakan kawasan padang pasir yang sangat cantik yang dihiasi bukti-bukti batu yang eksotis. Pada musim semi, bunga nasional Yordania, Irish Hitam, tumbuh di kawasan ini. Film The Martian yang dibintangi Matt Damon, yang berkisah tentang ekspedisi Planet Mars, lokasi syutingnya juga di Wadi Rum karena pasir merahnya terlihat mirip dengan permukaan Mars.

Kami bermalam di Sun City Camp. Kemah-kemah kami sedikit agak jauh dari tenda utama. Tenda utama digunakan sebagai tempat makan bersama. Setiap kemah ditempati 2-3 orang. Jalan antara satu kemah dengan kemah yang lain dan tenda utama dihubungkan dengan jembatan kayu pendek yang mengingatkanku ketika melintasi jembatan kayu di atas Sungai Kapuas, Pontianak. Di dalam kemah terdapat 2-3 tempat tidur yang sangat empuk dengan selimut tebal seumpama di hotel berbintang. Di dalam kemah terdapat kamar mandi dan toilet yang dilengkapi *hot and cold water*.

Di tengah dinginnya padang

pasir kami disuguh atraksi memasak makanan berupa nasi, kentang, dan daging domba dengan cara dipendam di dalam pasir. Sensasi rasanya pun luar biasa. Disajikan oleh chef muda bergamis putih dan bersurban merah layaknya orang Arab. Setelah makan malam, kami menghangatkan badan di dekat api unggul yang kami buat di dekat tenda utama.

"Grup ini *really the first one* yang mengunjungi Wadi Rum dari Indonesia. Orang kalau ke Jordan seringnya *nyebut* Petra-Petra-Petra. Sun City Camp ini adalah camp termahal di Wadi Rum karena kamar mandinya di dalam camp. Di camp lain tidak ada seperti itu. *It is small thing, but important,*" terang Mahdi.

Suhu saat itu mencapai 8 °C. Setelah sholat shubuh, saya dan beberapa teman naik ke atas bukit batu demi melihat *sunrise*, sementara beberapa teman yang lainnya asyik bermain pasir dan berfoto. Setelah selesai sarapan, acara kami lanjutkan dengan tour padang pasir menggunakan jeep yang memiliki bak terbuka. Setiap mobil diisi maksimal 6 (enam) penumpang. Jantung kami berdegup kencang ketika jeep yang kami tumpangi dengan laju kencang tiba-tiba menuruni

lembah Wadi Rum. Sensasinya serasa naik *roller coaster!* Kami ibarat sebutir pasir di tengah hamparan padang pasir yang luasnya tak terkira itu. Entah apa jadinya kalau kami ditinggal sendirian di situ.

Hari itu hari terakhir kunjungan kami di Yordania, negeri dimakamkannya Nabi Yusya' bin Nun dan Nabi Syu'aib serta beberapa shahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di negeri ini pula sampai hari ini masih hidup shahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berupa sebuah pohon yang diberi nama pohon shahabi atau *as-syajarah al-mubarakah* atau pohon yang diberkati yang tumbuh di tengah-tengah padang pasir bernama Buqa'awiyya. Diantara ulama terkemuka abad ini yang berasal dari Yordania diantaranya Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali dan Syaikh Ali bin Hasan 'Abdul Hamid Al-Halabi, murid Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, ahli hadits abad ini.

Sebelum meninggalkan Yordania, kami singgah ke *Dead Sea* (Laut Mati) yang berada

pada 400 m di bawah permukaan air laut, sebuah tempat yang menjadi titik terendah di dunia. Meski dinamai "laut", sebenarnya *Dead Sea* adalah danau. Kadar garam *Dead Sea* mencapai 30% lebih, jauh berbeda dengan kadar garam laut pada umumnya yang hanya sekitar 3%. Demi alasan keamanan, pengunjung tidak diperkenankan berenang atau pun menyelam di *Dead Sea*, tetapi diperbolehkan telentang di atas *Dead Sea*. Jangan khawatir tenggelam! Tingginya kadar garam membuat pengunjung otomatis mengambang. Oleh-oleh yang wajib dibawa dari sini adalah lumpur *Dead Sea* yang banyak diolah untuk produk kosmetik.

Guide kami, Ali dan Mahdi, melepas kami di King Hussein Border (Allenby), perbatasan wilayah Yordania dan Palestina. Ya, dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, malam itu kami akan melanjutkan safar ke Masjidil Aqsho, Jerusalem, Palestina, sebuah negeri yang terletak di sisi barat *Dead Sea*. Yordania, aku pasti merindukanmu. Suatu hari insya Allah aku akan berkunjung lagi.

(Shiddiq Gandhi)

Pelaksana pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai



SAKIT KEPALA

dr Sang Anggapratiwi, MKes. Poliklinik KPDJBC



Siapa yang belum pernah merasakan sakit kepala? Hampir separuh populasi dewasa pernah menderita sakit kepala setidaknya sekali dalam setahun. WHO mencatat prevalensi sakit kepala pada orang dewasa sekitar 47%. Sakit kepala merupakan gangguan pada sistem saraf yang paling sering dikeluhkan pasien. Bisa sebagai keluhan tunggal atau bersama dengan keluhan lainnya.

Umumnya sakit kepala dirasakan mulai dari bagian kepala atau atas leher, dan sumber nyeri berasal dari jaringan dan struktur sekitar otak. Otak sendiri tidak memiliki serabut saraf nyeri yang menyebabkan sensasi nyeri. Gangguan organ

dan jaringan sekitar otak yang dapat menyebabkan sakit kepala misalnya bila ada peradangan atau iritasi pada periosteum (bagian terluar tulang), otot, sinus, mata, telinga, selaput otak, saraf tulang belakang, arteri, vena, dan lainnya. Rasa sakit dapat berupa nyeri yang tumpul, tajam, menusuk, berdenyut secara konstan atau ringan atau nyeri yang terus menerus.

Diagnosis sakit kepala menurut International Headache Society dikelompokkan menjadi 3 kategori mayor berdasarkan sumber nyeri :

1. Sakit kepala primer
2. Sakit kepala skunder
3. Neuralgia kranial, nyeri wajah, dan sakit kepala lainnya.

Sakit kepala primer

Yang tergolong dalam sakit kepala primer adalah : sakit kepala menekan (*tension headache*), migren dan sakit kepala kluster (*cluster headache*). Sakit kepala primer umumnya tidak berbahaya, sebagian orang yang mengalaminya dapat sembuh dengan cepat namun sebagian lainnya merasakan sangat berat sehingga mempengaruhi kualitas hidup.

Migren

Jenis sakit kepala primer yang paling sering dan paling berat adalah migren dengan prevalensi 10% pada pria dan 22%

pada wanita. Bias terjadi sejak usia pubertas tetapi terbanyak pada rentang usia 35 – 45 tahun. Gejala migren bilateral (dua sisi kepala) dialami oleh 40% pasien, sedangkan 60 % sisanya terjadi unilateral (satu sisi). Rasa berdenut dirasakan oleh 50% pasien dan sisanya tidak. Sedangkan gejala muntah dialami oleh 33% penderita. Migren terjadi akibat proses inflamasi sekitar saraf otak dan pembuluh darah otak sehingga menyebabkan rasa nyeri dan seringkali disertai rasa berdenut.

Tension headache

Rasa sakit kepala seperti tertekan atau tertindih benda berat juga termasuk jenis yang cukup sering dijumpai, namun gejalanya tidak seberat migren, dialami 80% wanita dan 67% pria. Nyeri dapat bilateral atau unilateral dengan karakteristik rasa tertekan atau rasa tegang. Intensitas mulai dari ringan hingga sedang dan tanpa rasa mual (*nausea*).

Tension headache dipicu oleh stres dan menyebabkan musculoskeletal (otot dan jaringan pendukungnya) pada area leher dan kepala bagian bawah ikut mengalami stress. Selanjutnya area ini akan mengalami inflamasi dan spasme/tegang, sehingga menimbulkan rasa nyeri yang dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari.

Cluster headache

Jenis ini tidak terlalu sering terjadi. Gejala sakit kepala kluster adalah rasa nyeri di sekitar mata, pelipis atau bahkan sampai ke dalam mata. Terjadi 1 diantara 1000 orang dewasa dan lebih sering pada pria dibandingkan pada wanita.

Sakit kepala skunder

Dikatakan sebagai sakit kepala skunder karena rasa sakit yang timbul adalah akibat dari penyakit atau gangguan diluar kepala lainnya. Sumber penyebab sakit kepala skunder umumnya adalah gangguan padakepala dan leher, tetapi bisa juga disebabkan oleh nyeri yang berasal dari gigi, infeksi sinus dan infeksi atau perdarahan otak (encefalitis). Salah satu jenis sakit kepala skunder yang paling sering dijumpai adalah *medication overuse headache* (MOH), sebagai akibat penggunaan obat-obatan yang berlebihan atau berkepanjangan untuk terapi sakit kepala.

Kapan sakit kepala harus diperiksa lebih seksama?

Tidak semua keluhan sakit kepala memerlukan pemeriksaan

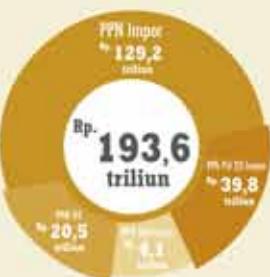
lebih lanjut. Misalnya sakit kepala primer yang bisa hilang dengan minum obat sakit kepala, maka tidak perlu dikhawatirkan. Obat pereda sakit kepala banyak dijual bebas di apotik seperti aspirin, asetaminofen (paracetamol) dan ibuprofen. Pada sakit kepala yang lebih berat, misalnya disertai rasa mual dan sensitive terhadap sinar atau suara bising bahkan terkadang disertai aura (seperti ada sesuatu yang melayang didalam mata) maka perlu dikonsultasikan ke dokter. Pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter biasanya adalah pemeriksaan neurologi. Jika tidak ditemukan kelainan neurologis, dokter akan memberikan obat sesuai diagnosis yang ditegakkan. Dan jika didapatkan kelainan neurologis, pasien akan dirujuk untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Semoga bermanfaat



REALISASI**PENERIMAAN****BEA CUKAI****TAHUN
2016**
(semester 1)PENERIMAAN
2015

+



+



387,6
= triliun
30,3%

REALISASI PERPAJAKAN
Rp. 1.235,8 triliun**APBN
2016*******
TARGET PENERIMAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Rp. **186,53**
triliun

**TARGET
PENERIMAAN
2015 ➔ 2016
MENURUN****PENERIMAAN
KEPABEANAN DAN CUKAI**

Rp. **42,87***
triliun (22,9%)

BEA MASUK sebesar Rp.13,4 Triliun (36%)

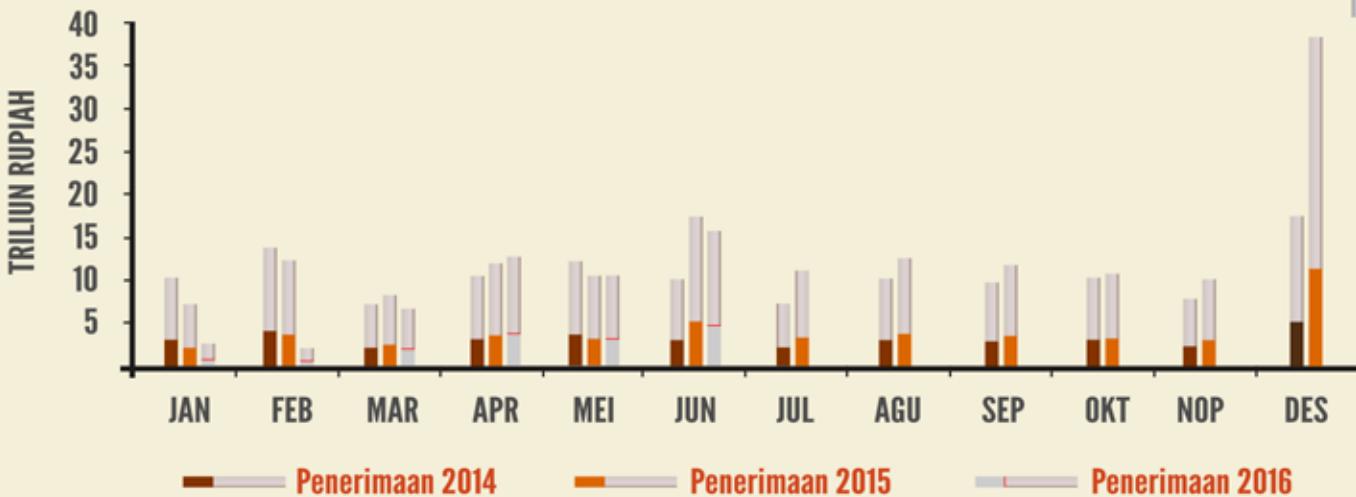
BEA KELUAR sebesar Rp.0,9 Triliun (31,4%)

CUKAI sebesar Rp.28,5 Triliun (19,5%)

**RATA-RATA
MASIH LEBIH
RENDAH**

REALISASI PENERIMAAN
KEPABEANAN DAN CUKAI
PERIODE SAMA
TAHUN 2015*penerimaan sampai dengan
31 Mei 2016

TREN PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU



HASIL PEMBAHASAN PEMERINTAH DAN DPR DALAM PEMBAHASAN APBN 2016

- ★ Melakukan penggalian sumber-sumber pembiayaan negara dengan menambah barang kena cukai
- ★ Tim Kementerian Keuangan telah melakukan kajian terhadap beberapa komoditi yang berpotensi dikenakan cukai, hasilnya mengerucut pada kemasan plastik berisi minuman/makanan

KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY TEST) DALAM PENETAPAN OBJEK CUKAI

★ LEGAL

- Undang-undang Cukai memberikan amanat untuk penambahan BKC baru
- Penetapan jenis BKC baru ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Penetapan penerimaan cukai atas BKC baru dituangkan dalam APBN/P 2016



★ FILOSOFIS

- Pengenaan cukai bertujuan untuk pengendalian (*instrument control*)
- Penggunaan kemasan plastik dapat berpengaruh negatif bagi lingkungan dan kesehatan
- Penggunaan plastik untuk kemasan minuman / makanan lebih dari 65% (Kemenperin)



★ SOSIAL EKONOMI

- Dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Rendahnya resistensi masyarakat atas praktik pemungutan retribusi oleh Pemda terhadap kantong plastik
- Penerapan penetapan BKC di Indonesia masih sangat sedikit
- Dampak pengenaan cukai terhadap kemasan plastik minuman / makanan secara ekonomis tidak signifikan terhadap mempengaruhi inflasi, konsumsi dan PDB

★ REFERENSI (BEST PRACTICE)

- Penerapan cukai terhadap kemasan plastik oleh beberapa Negara (Inggris, India, Skotlandia, Hungaria, Irlandia, Ghana, Kenya)
- Pemungutan (retribusi) kantong plastik oleh beberapa Pemerintah Daerah (DKI Jakarta, Yogyakarta, dll)

★ OPERASIONAL

- Kelayakan administratif untuk pemungutan cukai kepada penanggung cukai

BEA CUKAI BANDAR LAMPUNG MENGUDARA DI RRI PRO DUA FM

BANDAR LAMPUNG – Bea Cukai Bandar Lampung melaksanakan talkshow dengan tema “Customs Automation” pada acara Intermezzo pagi di radio Pro Dua RRI 92.5 FM. Pada kegiatan ini bukan hanya Bea Cukai yang diundang sebagai pembicara namun juga didatangkan Ketua Persatuan Wartawan Provinsi Lampung, Umar Bakti, untuk memberikan opini mengenai penilaian pers terhadap kinerja Bea Cukai khususnya di Bandar Lampung. Kepala Seksi PKC II, Agus Eko Prasetyo, menjelaskan mengenai pelayanan kepabeanan dan cukai serta contoh kegiatan otomasi yang telah dilakukan Bea Cukai, seperti penggunaan Pertukaran Data Elektronik (PDE) untuk penyerahan dokumen pemberitahuan barang impor maupun ekspor, pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai. Terkait pengawasan, Umar Bakti memberi pujian terhadap kinerja Bea Cukai. “Sebagai institusi pemerintahan, keterbukaan Bea Cukai Bandar Lampung patut diacungi jempol. Tidak sekalipun pers kesulitan untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan Bea Cukai dan wartawan sangat puas dengan kerja sama ini” tukasnya.

BEA CUKAI TANJUNG PERAK TERIMA KUNJUNGAN KOMISI XI DPR RI

SURABAYA – Bea Cukai Tanjung Perak menjadi tuan rumah Kunjungan Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI, pada Kamis (02/06). Tujuan kunjungan tersebut ialah untuk membahas kebijakan strategis Bea Cukai dan implementasinya, yang meliputi optimalisasi penerimaan, penguatan pengawasan, perluasan fasilitas, percepatan pelayanan, dan modernisasi kelembagaan. Acara diselenggarakan di Aula Utama Bea Cukai Tanjung Perak pada pukul 12.00 WIB. Anggota tim Komisi XI berjumlah 20 orang yang terdiri dari berbagai fraksi dan diketuai oleh M. Prakosa. Turut hadir Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim I, Decy Arifinsjah dan Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II, Nirwala Dwi Heryanto. Hal yang dibahas kali ini adalah masalah target dan realisasi penerimaan negara dari sektor Bea Cukai. Langkah-langkah seperti apa yang telah ditempuh Bea Cukai dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam APBN dan apakah target tersebut telah sesuai dengan potensi di Provinsi Jawa Timur. Acara diakhiri dengan kunjungan ke Terminal Teluk Lamong dengan menggunakan kapal patroli Bea Cukai.

**BEA CUKAI SINTETE
MUSNAHKAN MIRAS
ILEGAL SENILAI
RATUSAN JUTA RUPIAH**

SINTETE – Bea Cukai Sintete mengundang beberapa instansi di Kabupaten Sambas serta Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Barat untuk melakukan pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan pakaian bekas impor. Hasil tangkapan BKC ilegal periode 2016 yang beredar di wilayah pengawasan Bea Cukai Sintete sejumlah 333.840 batang rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA/ miras) sebanyak 1.683 botol/ kaleng dengan nilai barang sebesar Rp193.564.000. Setelah melakukan pemusnahan rokok dan MMEA dengan alat berat, acara dilanjutkan dengan konferensi pers yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Kepala Bea Cukai Sintete, Ka.KPKNL, Kapolres Sambas, Kejaksaan Negeri Sambas, Ka Pos TNI AL, dan Danramil Pemangkat. Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagbar dalam sambutannya mengungkapkan bahwa perlunya dijalankan sinergi yang baik antara beberapa instansi terkait di lingkungan Kabupaten Sambas juga ditekankan untuk menjaukan ego sektoral dalam menjalankan tugas, serta meningkatkan koordinasi serta birokrasi antar instansi pemerintahan.



PATROLI BERSAMA BEA CUKAI TEMBILAHAN DENGAN POLAIR POLRES INHIL

TEMBILAHAN - Bea Cukai Tembilahan dan Satpolair Polres Indragiri Hilir melakukan kegiatan "Patroli Laut Bersama Bea Cukai Tembilahan dan Satpolair Polres Inhil" pada tanggal 7-11 Juni 2016, dengan menggunakan 2 kapal patroli dari masing-masing instansi. Pembukaan patroli bersama dilakukan di Aula Sri gemilang Bea Cukai Tembilahan dihadiri oleh Kepala Bea Cukai Tembilahan beserta jajaran, Kapolres Inhil beserta jajaran dan para awak kapal patroli dari kedua instansi. "Patroli ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas antara Bea Cukai dan Polri di lingkup Kab. Inhil, sesuai dengan arahan pimpinan agar dalam pelaksanaan tugasnya Bea Cukai selalu meningkatkan sinergi, komunikasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu rawannya pesisir timur Kab Inhil menuntut dilakukannya pengawasan oleh Bea Cukai Tembilahan secara lebih intensif. Dengan dukungan dari Polres Inhil maka diharapkan patroli yang dilakukan akan semakin efektif untuk mengamankan perairan Inhil dari pelanggaran kepabeanan dan cukai" ungkap Kakantor Bea Cukai Tembilahan Sulaiman.

WORKSHOP ON WCO DATA MODEL

JAKARTA - WCO Data Model adalah seperangkat persyaratan data yang saling mendukung serta diperbarui secara teratur untuk memenuhi ketentuan hukum dan prosedur kepabeanan serta ketentuan instansi perbatasan lain terkait transaksi ekspor, impor, dan transit. Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan Bea Cukai atas WCO Data Model, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga menyelenggarakan workshop pada tanggal 31 Mei s.d. 3 Juni 2016 yang bertempat di Pusdiklat Bea dan Cukai. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat/pegawai Bea Cukai terkait pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi berbasis IT yang dijalankan oleh WCO serta bagaimana aplikasi tersebut dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi kepabeanan. Secara umum, workshop ini terbagi menjadi dua kegiatan yaitu teori dan praktik. Materi yang disampaikan oleh fasilitator antara lain yaitu pengenalan tentang WCO dan programnya, pengenalan tentang WCO *Data Model*, *Data Model Library*, *Information Package*, EDIFACT, XML Guideline, *Data Model Project Team and Data Maintenance Request*, serta *WCO Data Model Library: Published Components*. Selain itu, peserta juga memperoleh informasi mengenai penerapan *Netherlands Single Window* dan *E-Customs*.



BEA CUKAI MUSNAHKAN ROKOK DAN MIRAS ILEGAL

PANGKALAN SUSU - Bertempat di halaman gedung kantor, Jalan Pelabuhan No.1, Pangkalan Susu, Bea Cukai Pangkalan Susu menyelenggarakan acara pemusnahan Barang Milik Negara Hasil Penindakan yang telah memperoleh putusan dari KPKNL untuk dimusnahkan. Barang-barang yang akan dimusnahkan adalah Barang Milik Negara hasil penindakan dibidang cukai tahun 2014 dan 2015 yang terdiri dari Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok sebanyak 1.825 Bungkus (36.500 batang) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Dalam Negeri sebanyak 4.342 botol. Kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindakan pelanggaran di bidang cukai ini adalah Rp. 104.046.800,-.

Pelaksanaan pemusnahan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Bea Cukai terhadap penyelesaian administrasi penanganan Barang Hasil Penindakan (BHP) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pangkalan Susu.



Perdirjen BPIB (PER-22/BC/2016)

Balai Pengujian Identifikasi Barang atau biasa disebut dengan BPIB adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bergerak di bidang pengujian laboratoris dan identifikasi barang yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

dengan terbitnya regulasi terbaru mengenai pelabelan bahan kimia yang mengacu pada *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals* (GHS) EC NO.1272/2008 dan Adanya perubahan teknis pengambilan contoh barang untuk pengambilan contoh padatan serta contoh cair dan semi padat yang merujuk pada SNI 19-0428-1989 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Contoh Barang Padatan dan SNI 0429-1989-A tentang Petunjuk Teknis Pengujian Contoh Barang Cairan dan Semi Padat membuat BPIB harus menyesuaikan tata cara pengambilan contoh untuk pengujian laboratoris dan identifikasi barang.

untuk mengakomodir penyesuaian-penesuaian tersebut telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-22/BC.2016. Peraturan Direktur Jenderal tersebut bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan pedoman bagi petugas dalam melakukan pengambilan Contoh Barang.
2. Menjamin keamanan bagi petugas yang melakukan pengambilan Contoh Barang, pengiriman dan pengujian laboratoris dan identifikasi barang.
3. Menghindari kerusakan barang karena kesalahan penanganan.
4. Menjamin keseragaman pengujian pada tiap-tiap Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
5. Menjamin keakuratan hasil pengujian laboratoris dan identifikasi barang.

secara garis besar Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-22/BC.2016 mengatur tentang:

1. permohonan pengajuan pengujian laboratoris dan identifikasi contoh barang;
2. pengaturan mengenai aspek keselamatan saat pengambilan dan pengujian laboratoris barang contoh;
3. petunjuk teknis pengambilan Barang Untuk Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang
4. hal-hal yang perlu diperhatikan saat sebelum, saat pengambilan barang contoh dan setelah pengambilan barang contoh.

untuk detail lengkap mengenai pengaturan-pengaturan di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, peraturan dapat diunduh melalui direktori Peraturan pada website resmi DJBC.

SITUS BERSEJARAH MACHU PICCHU MASUK APLIKASI GOOGLE MAPS

Meningkatnya jumlah pengunjung, telah mengancam situs purbakala Machu Picchu yang berada di pegunungan Andes, Peru milik suku Inca. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir ancaman tersebut dengan menggunakan teknologi modern, para wisatawan bisa menikmati pemandangan keajaiban kuno cukup dari tempat duduk saja, karena kini Situs Machu Picchu sudah masuk dalam aplikasi google maps.

Kekhawatiran itu dikarenakan terlalu banyak orang berjalan-jalan di sekitar reruntuhan situs purbakala yang dapat merusak situs arkeologinya. Machu Picchu menjadi salah satu tempat paling bersejarah dan terindah di dunia. Sayangnya tak semua orang bisa ke sana, untuk itu Google ingin memperlihatkan keindahan dan kemegahannya pada dunia dengan menampilkan gambarnya secara online. Google Street View mengklaim program yang mereka buat bisa menjadi alternatif

yang luar biasa, selain berkunjung ke situs tersebut.

Terhitung sejak 3 Desember 2015 para teknisi dari Google Street View untuk pertama kalinya mengambil gambar jalan di Machu Picchu dan memasangnya di Google Maps, agar seluruh dunia bisa mengapresiasi dan terinspirasi untuk berkunjung ke Machu Picchu. Dan di Kantor Pusat Google di California, bagian Program Street

View Google Maps telah

mendemonstrasikan peralatan yang mendukung aplikasi Google Maps. Google terus berinovasi, agar bisa masuk ke area terpencil dan terpenting di dunia, agar bisa membuat peta sempurna, masuk ke area-area seperti Machu Picchu supaya masyarakat bisa melihat belahan dunia lain hanya dengan 1 klik, dan mengakses tempat-tempat seperti ini dari komputer mereka.

Pemandangan 360 Derajat

Pada tahun 1911 seorang professor sejarah dari Universitas Yale, Hiram Bingham III menemukan kota Inca yang hilang, Machu Picchu di Peru. Meskipun warga setempat mengetahui





bahwa situs tersebut berada di Pegunungan Andes, penemuan Profesor Hiram Bingham lah membuat situs ini dikenal dunia. Kini Google Street View menampilkan setiap sudut teras dan puncak Machu Picchu ke layar komputer.

Suku Inca membangun Machu Picchu di Puncak Pegunungan Andes di ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut. Dari atas di seberang jurang yang mengelilingi pemandangan begitu menakjubkan. Sejumlah pakar merasa yakin machu Picchu merupakan tempat perlindungan bagi seorang atau beberapa pemimpin suku Inca. Sementara sebagian pakar lain berpendapat bahwa Machu Picchu adalah tempat keagamaan suci.

Lokasinya yang terpencil dan biaya menuju ke tempat tersebut relatif mahal, membuat situs tersebut selama berabad-abad sulit dijangkau oleh wisatawan mancanegara. Belum lagi, pada tahun 1980-an wisatawan menghindari Peru karena terjadinya konflik dalam negeri yang kemudian berakhir di tahun 1999.

Popularitas negara tersebut kembali meningkat sejak berakhirnya konflik dan satu abad kemudian situs ini mulai

dikunjungi oleh rata-rata 4000 pengunjung setiap harinya. UNESCO pun memasukkannya Benteng Pertahanan Suku Inca tersebut dalam daftar warisan dunia . Pada tahun 1983 hal ini mampu mendongkrak ketenaran situs tersebut dan membuatnya layak mendapatkan dukungan teknis secara internasional.

Sejumlah gambar yang dirilis akhir bulan November tahun 2015 menjadi tambahan terkini dalam kumpulan foto yang melengkapi Peta Digital Google yang digunakan secara luas. Pilihan "Street View" pada peta sebagian besar menampilkan pemandangan kota dan kawasan sekitarnya yang menakjubkan. Pemandangan tersebut difoto dengan menggunakan sejumlah kamera yang dipasang pada mobil . Google pun punya cara kreatif untuk menampilkan sejumlah lokasi eksotis yang jauh dari jalanan dan sulit diakses dengan menggunakan mobil.

Sejak Google mengembangkan kamera trekker pada tahun 2012, alat ini kemudian dimanfaatkan dalam beberapa perjalanan unik lainnya. Kamera trekker digunakan dalam scuba diving di Kepulauan Galapagos. Untuk mengambil foto bawah laut di

kawasan cagar alam tersebut. Kamera ini juga dipasang pada kereta luncur anjing di kutub utara Kanada untuk memotret tundra atau padang di kawasan kutub. Yang terbaru kamera trekker meluncur menyusuri kawat di antara pepohonan di hutan Amazon.

Pemandangan 360 derajat mulai bisa diakses pada jam 11 siang sejak 3 Desember 2015 pada Peta Street View Google. Diluncurkan tahun 2007, Google Street View menyediakan layanan agar kita bisa menyusuri jalanan secara digital mendapatkan pemandangan 360 derajat saat berada di perempatan dan menunjuk ke suatu landmark. Google pun mengembangkan kamera trekker di tahun 2012. Kamera trekker adalah kamera sama dengan yang dipasang pada mobil Street View dengan sistem yang hampir sama, GPS, baterai, kamera. Ada 15 kamera yang membentuk pandangan 360 derajat. Pelindung kamera akan melindungi kamera dari segala kerusakan, dan mengurangi sorotan sinar matahari. Alasan utama Google membuat trekker, agar bisa menangkap gambar yang tak bisa ditangkap oleh mobil street view.

(Ariessuryantini)

Semarang Archery School (SAS)

Mendidik Karakter dari Kegiatan Memanah



Olahraga panahan memang tak setenar sepakbola. Bisa dibilang, panahan merupakan barang langka di Indonesia. Bahkan, di Jakarta tercatat hanya ada satu tempat berlatih memanah untuk menyalurkan hobi bukan sebagai atlet, yakni di Senayan.

Nyatanya, Indonesia masih membutuhkan banyak tempat berlatih panahan guna menyemai bibit-bibit muda atlet panahan nasional. Dari sekian banyak tempat latihan panahan di Indonesia, *Semarang Archery School* (SAS) layak menjadi rujukan. Berdiri pada 31 Januari 2016 membuat antusiasme masyarakat di sekitar Semarang Jawa Tengah cukup tinggi. Bagaimana tidak, jumlah anggota pada saat *launching* saja sebanyak 70 orang yang mendaftar. Saat ini

tercatat lebih dari 200 anggota telah bergabung. Terang saja, hal ini diluar ekspektasi pengelola.

Menurut pendiri sekaligus ketua umum SAS, Imam Sarjono, pihaknya sama sekali tidak mengira akan tingginya animo masyarakat Semarang pada cabang olahraga ini. "Kami mengira paling banyak hanya 30 orang yang bakalan mendaftarkan jadi member. Namun ternyata sambutan masyarakat luar biasa. Terlebih kami belum sama sekali melakukan promosi, seperti bikin spanduk, nyebar *flyer* ataupun brosur. Ini membuktikan bahwa

antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap olahraga sunnah ini. Ke depan kami berharap dan sudah menjadi visi besar kami untuk membumikan panahan khususnya di Kota Semarang," ujar Imam.

Dalam launching SAS pada 31 Januari lalu, hadir Ketua Harian Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Jawa Tengah, Mugiyo. Dia berharap, para orang tua sabar dalam mengikutkan anak-anak mereka dalam berlatih panahan. Khusus dalam pengejar prestasi, tidak bisa diperoleh secara instan, tetapi melalui perjuangan panjang."Kalau sudah bicara prestasi, jangan hanya memiliki target lokal, tetapi internasional. Semua ada tahapannya, tetapi jangan pula memberi beban berlebih kepada anak-anak," ujar Mugiyo.

SAS merupakan salah satu wadah atau tempat pembinaan dan pemasarkan olahraga panahan melalui swadaya masyarakat. SAS akan menjadi mitra pemerintah khususnya Perpani selaku induk organisasi resmi dalam upaya mengembangkan olahraga panahan nasional khususnya di Kota Semarang dan sekitarnya.

Di Kompleks Manunggal Jati yang sebelumnya lebih dikenal masyarakat Semarang sebagai tempat berenang dan melangsungkan resepsi pernikahan itu, tampak beberapa orang membawa alat panah. Sebagian diantaranya adalah anak-anak, sebagian lagi remaja hingga orang dewasa. Mereka memakai seragam kuning dengan logo target panah di punggung. Dengan gagah anak-anak itu mengangkat busur dan membidik anak panah. Mereka adalah sebagian kecil dari anggota SAS yang sedang berlatih. Dalam sesi latihan, pihak pelatih sesekali menggelar semacam turnamen dengan beberapa kategori,

disesuaikan dengan kelompok umur.

Panahan adalah olahraga yang melatih disiplin, fokus, dan konsentrasi, juga smoothness. Memanah bisa melatih mental karena hal terpenting adalah mengontrol emosi. Perlu ketenangan dan tidak boleh terburu-buru. Targetnya tidak bergerak, maka musuhnya adalah si pemanah itu sendiri.

Menurut berbagai literatur, anak mulai dari usia 8 tahun bisa mencoba olahraga ini. Dalam hal ini usia berkenaan dengan psikologi anak. Jika di bawah usia 8 tahun, ada kecenderungan anak susah dikontrol. Di SAS, anak-anak yang datang pertama kali diberikan free trial alias gratis selama 30 menit. Setelah itu, baru dilihat sejauh mana anak antusias untuk belajar panahan dan bisa bergabung dengan SAS. Mulanya, anak-anak diberi pengenalan mengenai alat dan bisa langsung mencoba.

Tak lupa sebelum mulai membidik, si kecil harus pemanasan terlebih dulu. Awalnya, aspek terpenting dari kegiatan memanah ini adalah fokus dan konsentrasi. Tapi, ternyata banyak hal lain yang terbangun dalam proses belajar memanah. Peningkatan fokus hanya salah satu dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam memanah.

Yang pasti, olahraga ini membuat kita berkeringat. Olahraga membuat fisik mereka semakin sehat dan bugar. Kebugaran itu penting dan berpengaruh pada kejernihan pikiran dan kecerdasan seseorang. Aspek terpenting dari memanah, menurut para penggiat panahan, justru pada ketenangan. Jadi, selain olahraga fisik, ternyata memanah sangat kuat unsur meditatifnya. Kita, terutama anak-anak diharapkan belajar tenang, tidak grusa-grusu, mengatur nafas, menjaga kestabilan emosi



agar anak panah melaju secara konsisten dan tepat menuju sasaran.

Manfaat Panahan

Sejatinya, panahan adalah olahraga yang mengajarkan sebuah prinsip bahwa keberhasilan seorang harus didahului oleh upaya dan usaha. Namun, tidak hanya itu. Olahraga ini juga mengajarkan proses untuk mencapai apa yang diidamkan.

Langkah selanjutnya, seorang pemanah haruslah membekali dirinya dengan ilmu dan persiapan teknis. Pemanah harus memahami



bagaimana gerakan tubuhnya dan fungsi alat panahan dalam membantunya mencapai target. Setelah bekalnya cukup, maka pemanah melaksanakan proses sampai akhir.

Setelah itu pemanah dapat melakukan urutan proses mulai dari memilih anak panah yang tepat, penarikan tali busur, membidik, melesatkan anak panah dan mengakhirinya dengan sikap badan sempurna (follow through). Pemanah akan menerima hasil kerjanya, baik mencapai angka tertinggi yakni 10 atau meleset dan mendapat angka terkecil

yakni 0 (nol).

Maka dari itu panahan adalah olahraga yang sangat inklusif. Dan, bagi banyak orang panahan adalah olahraga seumur hidup. Panahan sangat aman karena pemanah harus mengikuti urutan kerja untuk dirinya dan aturan di lapangan tembak. Panahan mempunyai variasi kegiatan yang memungkinkan atletnya dapat berlomba sejak tingkat intra sekolah hingga ke tingkat dunia.

Seorang pemanah sejatinya akan mendapatkan beberapa faedah dalam dirinya, yang pertama adalah fokus, kedua

kekuanan tubuh, dan kemudian yang ketiga adalah koordinasi mental dan fisik yang baik.

Fokus. Panahan melatih seorang untuk menepis semua pengalih perhatian, distraction. Baik itu bersifat visual, suara, bahkan mental. Pemanah berlatih fokus menjaga proses menembak yang dimulai dari sikap tubuh yang benar sampai melepas anak panah. Karena sedikit saja perubahan pada proses tersebut, maka hasil tembakan akan berubah. Latihan konsentrasi dalam panahan membantu kita agar bisa fokus di luar lapangan panahan; di sekolah, di tempat kerja, di rumah, di jalan raya, dan tempat lainnya. Selain itu, bila seorang pemanah sering ikut dalam lomba, maka dia melatih dirinya untuk dapat menghadapi situasi penuh tekanan mental. Dan tentu hal ini sangat berguna bagi kehidupan seorang.

Kekuanan tubuh. Seorang pemanah dapat memiliki tubuh yang kuat. Terutama pada lengan, inti tubuh, tangan, dada dan pundak. Hal ini diperoleh dengan latihan menarik tali busur secara tepat. Seorang pemanah yang mahir tahu ukuran busur yang tepat untuk dirinya.

Koordinasi mental dan fisik. Seorang pemanah hanya perlu sepuluh detik untuk menjalankan proses persiapan menembak sampai anak panah menancap di papan target. Padahal, dia perlu melakukan sepuluh langkah menembak secara sama agar hasil tembakan tidak menjauh dari lingkaran kuning di target yang ukurannya hanya 4 sentimeter. Dan, dia harus menembak dari jarak tertentu. Yang paling dekat adalah 18 meter, bila ia sedang berkompetisi. Untuk bisa melakukan ini semua, seorang pemanah harus berlatih teratur dengan bimbingan instruktur berpengalaman.

(supomo)



Bangunan Tua

Desa Pabean Indramayu - Jawa Barat

Saat ini tidak ada lagi kegiatan yang berhubungan dengan "kepabeenan" di Desa Pabean yang berlokasi di Kecamatan Indramayu, Jawa Barat. Namun penulis berhasil mengumpulkan beberapa informasi setelah menanyakan bagaimana sejarah Desa Pabean kepada beberapa orang tua, pamong desa dan Dinas Kebudayaan Indramayu serta menggali dari berbagai sumber.

Pada saat menanyakan dimana letak Desa Pabean, orang selalu balik bertanya, Pabean Udik atau Pabean Hilir ? Ternyata Desa Pabean telah dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Pabean Udik dan Desa Pabean Hilir. Pernyataan ini dibenarkan bapak **Setra** selaku Pamong Desa yang kami temui di

Kantor Kuwu, Desa Pabean Udik. Kantor Kuwu identik dengan Kantor Kelurahan.

"Dari dulu daerah ini dinamakan Desa Pabean, karena pada masa penjajahan Belanda, daerah ini daerah pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal niaga. Disebut daerah pabean karena di pelabuhan ada yang memungut bea, jadi disebut daerah pabean," kira-kira begitu cerita yang saya tahu kata Setra, serta menganjurkan menghubungi Dinas Pariwisata untuk menggali informasi yang lebih lengkap.

Ternyata di kantor Dinas Pora Budpar (Dinas Pemuda dan Olah Raga, Budaya dan Pariwisata) pun tidak banyak informasi yang dapat digali mengenai Desa Pabean. **Hadi Wibowo** selaku Kabid Pemuda

dan Olahraga mengatakan bahwa Pabean Udik dan Pabean Hilir berawal dari hilir mudik (pulang pergi). Dulunya sungai Cimanuk yang membelah kota Indramayu termasuk sungai besar yang bisa dilalui kapal para nelayan. Ada pelabuhan nelayan, sehingga ada kapal yang berangkat ke hilir dan pulang ke udik. Setelah daerah ini dimekarkan maka disebut Desa Pabean Hilir dan Desa Pabean Udik.

Bapak **Hatta** yang lahir pada tahun 1950 termasuk orang yang dituakan di Desa Pabean menceritakan bahwa Desa Pabean dulunya disebut Desa Pegagan (tempat orang berdagang dan berkebun). Namanya Pabean itu pada masa Belanda namanya Kepabeenan. "Kepabeenan kan tempat singgah kapal, jadi



Hadi Wibowo
Kabid Pemuda dan Olahraga



Hatta
Sesepuh Desa Pabean



Kantor Kuwu Desa Pabean

wilayah ini disebut daerah pabean, sekarang ada Pabean Hilir dan Pabean Udik, ke hilir dan ke udik. Itu sekedar sejarah Pabean Hilir dan Pabean Udik, tetapi kalau secara detail saya sudah tidak tahu," kata Hatta.

Menurut Hatta, Desa Pabean sebenarnya sudah terbagi tiga desa atau tiga Kelurahan. Desa Pabean Udik sendiri dibagi menjadi dua desa yaitu Desa Karangsong dan Desa Brondong. Sedangkan satu lagi Desa Pabean Hilir.

Karangsong adalah nama sebuah desa pecantilan, yang pada waktu itu masyarakat mengenalnya dengan nama karang kosong. Tempat kepemerintahannya berada di Desa Pabean Udik. Tetapi walaupun Karangsong hanya sebuah pecantilan namanya

lebih dikenal masyarakat luas dibandingkan dengan nama Pabean Udik yang menjadi desanya. Pedukuhan Karangsong dikenal sebagai kampung nelayan dan pengrajin kapal, sejak hadirnya banyak warga yang pandai membuat kapal nelayan.

Adapun asal mula Desa Karangsong terletak didekat pesisir pantai dimana alam telah menimbulkan tanah sejauh satu sampai dua kilometer. Pada saat itu sesepuh bersama tokoh masyarakat sepakat untuk menamakan desa pemekaran itu menjadi Desa Karangsong yang berarti karang itu tanah song, tidak berpenghuni atau tanah alam yang belum berpenghuni. Nama karangsong sendiri disematkan karena tempat ini

seolah menjadi lahan kosong.

Sedangkan nama Desa Brondong, Kecamatan Pasekan muncul ketika pada masa penjajahan tentara sekutu, yang waktu itu membakar lahan atau sawah masyarakat dengan cara menembakkan senapan ke sawah, akhirnya sawah yang kering terbakar habis. Dengan bahasa lain yang mungkin lebih familiar adalah "dibrondong" peluru.

Pada masa perperangan saat itu ada salah seorang pahlawan yang selalu dalam pengejaran Belanda masuk ke Desa Brondong, sampai kemudian dia pun tertangkap dan terbunuh di desa ini serta jasadnya dimakamkan di desa Brondong. Konon katanya, setiap pengunjung yang berdoa meminta sesuatu di makam tersebut, kebanyakan terwujud, maka kemudian orang memberi nama makam itu dengan nama "Ki Buyut Nyata". Namun masyarakat Desa Brondong sebelum terjadi perang dengan tentara sekutu juga sudah lebih dulu mengenal salah satu tokoh pejuang bernama "Ki Joko Dolog". Dia dianggap sangat berjasa tentang babat alas atau pembuatan lahan untuk masyarakat di daerah ini. Demikianlah nama daerah ini sampai sekarang disebut orang menjadi Desa Brondong.

Jejak Sejarah

Ada juga sejarah mencatat bahwa pengelana Portugis, **Tome Pires** (1513-1515) menyebut adanya pelabuhan terbesar kedua di pantai utara setelah Sunda Kalapa, yakni Cimanuk. Pelabuhan lainnya adalah *Bantam* (Banten), *Pomdam* (Pontang), *Cheguide* (Cigede), *Tamgaram* (Tangerang). Masyarakat sekitar pelabuhan Cimanuk sudah muslim, tetapi syahbandarnya penyembah berhala dari Kerajaan Sunda/Pajajaran.

Lokasi pelabuhan Cimanuk sekarang diperkirakan di Kabupaten Indramayu, tepatnya

di sekitar Desa Pabean Hilir, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Desa Pabean Udik, Pagirikan, dan Pasekan, Kecamatan Pasekan. Setelah hampir 500 tahun jejak-jejak pelabuhan tersebut nyaris tak diketemukan, artefak yang bisa "berbicara" adanya aktivitas pelabuhan, dermaga tempat bersandar kapal, bangunan bongkar-muat barang, atapun kantor syahbandar tak berbekas sama sekali.

Jejak sebagai kota pelabuhan secara historis memang tetap melekat pada nama-nama desa/kelurahan yang merujuk pada aktivitas pelabuhan, yakni Pabean, Pagirikan, Pasekan, dan Paoman. Nama Pabean berasal dari kegiatan "pabean" atau pengambilan bea masuk bagi kapal-kapal di pelabuhan. Pagirikan berasal dari kata "girik" atau surat-surat untuk kapal. Pasekan merujuk kosakata "pasek"-nya barang-barang ketika bongkar-muat. Paoman berasal dari kata *Pa-omah-an* atau perumahan para pegawai pelabuhan.

Ramainya pelabuhan Cimanuk dulu, menarik perhatian bangsa lain. Tak sedikit yang berasal dari Cina dan Arab kemudian menetap di Indramayu. Awalnya daerah *pecinan* berdiri di sebelah timur sungai Cimanuk, atau kini sekitar Kelurahan Lemahabang dan Karanganyar Kecamatan Indramayu. Perkampungan Arab di sebelah barat sungai Cimanuk, atau kini tepatnya di Desa Dermayu Kecamatan Sindang.

Cina dan Arab mendominasi urat nadi perdagangan saat itu. Beberapa bangunan milik warga keturunan Cina seperti bekas gudang beras, pabrik es, dan penggilingan padi menandai hal itu. Arsitektur khas Cina masih dijumpai pada bangunan rumah, toko, dan kelenteng. Sedangkan pengaruh bangunan Eropa tampak



Kali Cimanuk



Sekolah Pabean

pada gereja dan sekolah misi *zending*, meskipun didirikan oleh warga keturunan Cina.

Hingga kini jejak-jejak Cimanuk sebagai kota pelabuhan hampir hilang. Sungai itu tak lagi mengalir melintasi Kota Indramayu, tetapi dibelokkan ke luar kota. Alasannya sungai itu acapkali meluap dan menjadi penyebab banjir di kota. Cimanuk "dimatikan" sejak dekade akhir 1990 dan kini sepanjang sungai yang mengering sudah banyak dibangun rumah penduduk. Tidak seperti Sungai Musi di Palembang atau Sungai Chao Praya di Bangkok Thailand, yang dilestarikan menjadi objek wisata dan sejarah.

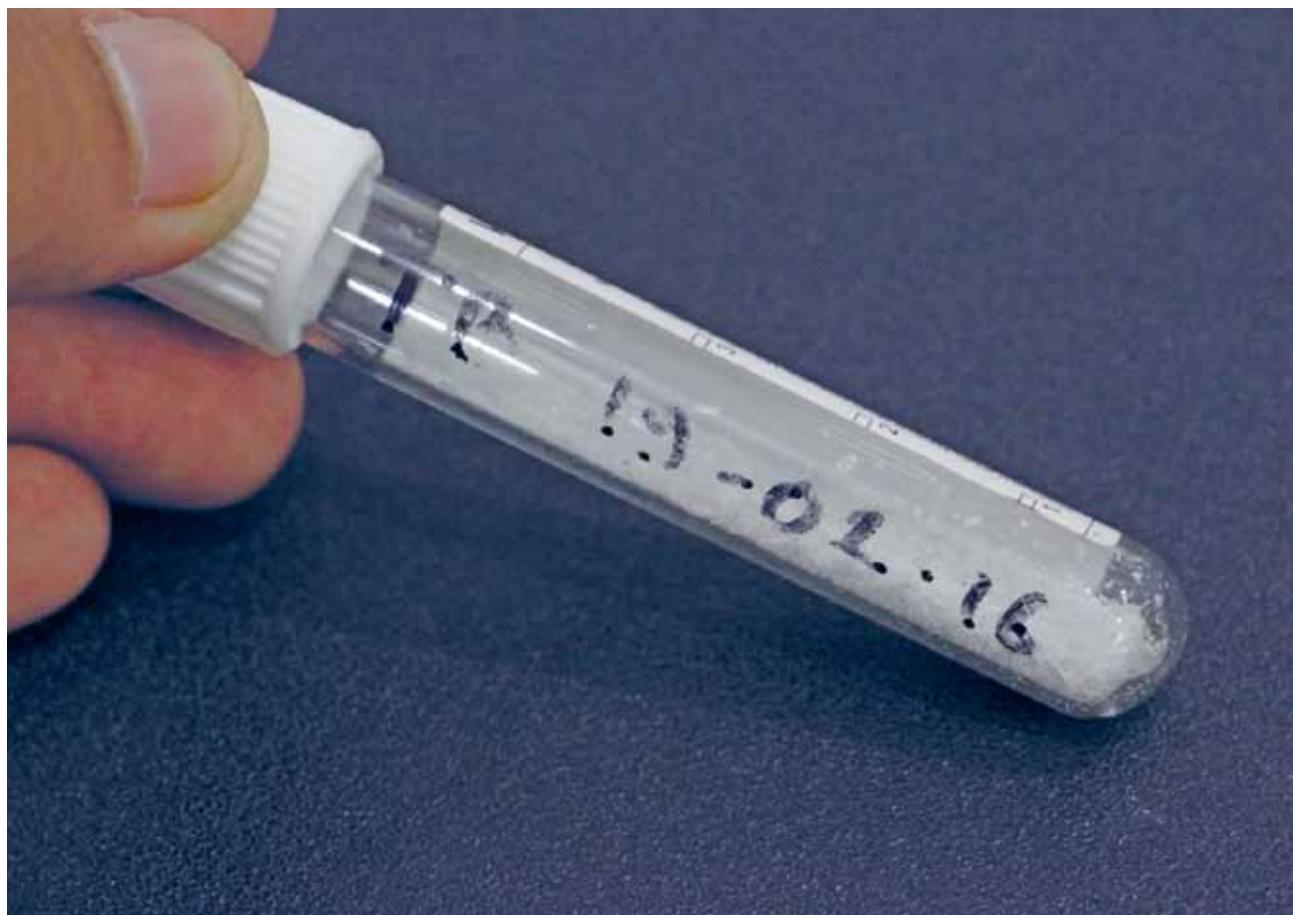
Hingga dekade 1970 sebenarnya Cimanuk menjadi ikon Kota Indramayu. Selain sungai dan perahu nelayan yang

hilir-mudik, juga ada jembatan yang bisa "buka-tutup" ketika perahu atau kapal melintas. Jembatan dengan sistem tersebut sudah berusia ratusan tahun, namun kemudian diganti menjadi jembatan biasa yang tentu saja tertutup bagi perlintasan perahu atau kapal.

Dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama, Cimanuk merupakan urat nadi kehidupan kota. Bangunan-bangunan lama berdiri di sepanjang tepiannya, seperti pertokoan, gudang, pabrik, perkantoran, tempat ibadah (mesjid, kelenteng, gereja), sekolah yang didirikan Belanda dan markas keamanan. Sebagian masih berfungsi atau direnovasi, sebagian terbengkalai, dan sebagian lagi hilang tak berbekas.

(Piter)

Ketika Barang Impor dan Eksport Harus Dilakukan Uji Laboratorium



Entah mengapa di pagi hari yang cerah ini, gairah kerja Seno tidak sesemangat seperti hari-hari sebelumnya. Sarapan pagi yang biasanya dia habiskan, hari ini hanya secangkir kopi dan satu potong pisang goreng saja yang dia andalkan untuk dapat beraktifitas di Pelabuhan Belawan yang sangat sibuk dengan pelayanan barang eksport impor. Sebagai

seorang staff ekspor impor di perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak mentah kepala sawit atau biasa yang disebut dengan *Crude Palm Oil* (CPO), Seno memiliki tugas untuk membuat dan mengajukan dokumen impor maupun ekspor untuk produk CPO yang dihasilkannya.

Namun pada beberapa hari terakhir ini, kegiatan pengajuan dokumen yang biasanya dilakukan dengan

cepat untuk proses keluar masuknya barang, kini terkendala karena harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini disadari Seno karena dan inovasi dari produk yang dibuat perusahaannya sehingga urairan jenis barang yang diajukannya pun kini bertambah beberapa poin.

Rupanya disinilah penyebab tidak semangatnya Seno menjalani aktifitas hari ini. Biasanya, dokumen yang dibuatnya selalu dapat diselesaikan dalam satu hari, namun untuk beberapa hari ini proses pembuatan dokumen di kantornya pun memakan waktu hingga lebih dari satu hari akibat adanya komponen atau jenis produk baru yang akan diimpor oleh perusahannya sebagai bahan tambahan dalam pengolahan produknya.

Seperti biasanya, perusahaan Seno hanya mengimpor satu jenis olahan CPO untuk dijadikan bahan baku makanan,

namun untuk mengembangkan produksi maka perusahaan membuat produk baru dengan menambahkan salah satu olahan minyak kepala sawit untuk produk barunya. Tentunya produk yang diimpor tidak sama dengan barang yang ada selama ini, untuk itu Seno sempat bingung untuk menentukan klasifikasi barang atau HS code untuk dicantumkan pada dokumen PIB.

Tentunya penentuan atau memasukan jenis klasifikasi barang ini tidak dapat serta merta kita masukkan sesuai kehendak kita, ada beberapa syarat agar jenis barang yang kita cantumkan memang benar-benar masuk dalam jenis klasifikasi barang tersebut dan masuk dalam HS code yang ditentukan sesuai dengan bea masuk yang harus dibayar. Dan Seno pun dituntut untuk cermat agar penetapan klasifikasi barang ini benar sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat

dikemudian harinya yang akan merugikan perusahaan atau negara.

Kekhawatiran Seno ternyata benar, saat dirinya menanyakan dokumen yang diajukan ke Kantor Pengawasa dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A (KPPBC TMP A) Belawan, ternyata dokumen PIB yang diajukanya harus diteliti lebih lanjut oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) untuk lebih memastikan jenis barang dan HS code yang dicantumkan oleh importir. Untuk itu pihak PFPD meminta agar jenis barang yang diimpor tersebut dilakukan uji laboratorium di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe B Belawan.

“Jadi bagaimana dengan dokumen PIB saya Pak? Kira-kira kapan saya bisa mendapatkan keputusan kalau barang yang saya impor bisa masuk?” tanya Seno kepada petugas *from desk*



Analis. Keakuratan pengujian selain ditentukan oleh peralatan yang memadai, juga kemampuan analis dalam menguji barang tersebut.



Uji Narkoba. Semakin banyaknya jenis narkoba yang masuk dalam pengawasan DJBC.

di KPPBC Belawan. "Maaf pak ,barang yang bapak ajukan harus kami masukkan dulu ke BPIB untuk memastikan lebih lanjut jenis maupun HS code dari barang itu, waktunya tidak lama ko hanya satu hingga dua hari saja," ujar petugas KPPBC Belawan menjelaskan kepada Seno yang terlihat lesu karena barangnya harus diuji terlebih dahulu.

"Bagaimana prosedur untuk mengikuti uji laboratorium itu, pak? Lalu berapa biaya yang harus kami keluarkan? Tanya Seno lebih lanjut untuk memastikan prosedur yang harus dilaluinya." Untuk prosedur uji laboratorium, bapak bisa tanyakan langsung ke BPIB, namun itu tidak harus diikuti oleh pengguna jasa karena prosedurnya dari kami yang ajukan bukan bapak. Dan untuk biayanya pun tidak ada lagi sekarang pak," jelas petugas menjawab keragu-raguan Seno.

Karena rasa penasarananya, dan



uk membutuhkan pengujian yang akurat dan BPIB menjadi andalan

untuk menambah pengetahuan akan prosedur pengujian barang di laboratorium bea cukai, Seno pun mendatangi BPIB Medan yang letaknya tidak jauh dari KPPBC Belawan."Maaf pak, tadi barang yang saya ajukan di KPPBC Belawan katanya harus diuji terlebih dahulu di lab ini, saya mau tanya bagaimana prosedur untuk pengujian barang itu ya," tanya Seno kepada petugas jaga di BPIB Medan yang kemudian diantar untuk menemui Kepala Seksi Pelayanan Teknis BPIB Medan, **Luki Kurniawan**, yang kebetulan saat itu sedang berdiskusi dengan Kepala BPIB Medan, **Indra Siswa**.

"Selamat pagi pak, saya Seno exim diperusahaan yang bergerak di bidang pengolahan CPO, kebetulan hari ini dokumen PIB saya tertahan kerana harus uji laboratorium terlebih dahulu, apa saya boleh tahu bagaimana prosedur uji laboratorium bea cukai itu," tanya Seno.

"Begini pak, sebenarnya untuk prosedur pengujian barang impor tidak perlu diketahui oleh importir itu sendiri karena semua sudah diajukan oleh KPPBC dan tidak dikenakan biaya. Namun, karena bapak ingin tahu bagaimana prosedur uji laboratorium bea cukai, kami dengan senang hati akan menjelaskannya," tutur Indra.

Dengan dibantu kepala Seksi Pelayanan Teknis, dijelaskanlah bagaimana prosedur uji barang di laboratorium bea cukai. barang impor maupun ekspor yang teknah diajukan dokumennya akan diperiksa oleh unit pengawasan di KPPBC, hal ini untuk mengetahui secara detail jenis uraian barang dan HS code yang dicantumkan dalam dokumen itu sendiri. Jika uraian barang sudah sesuai dengan klasifikasi barang maka HS code juga akan benar dan petugas bisa langsung mengeluarkan barang tersebut.

Namun, jika uraian barang yang dicantumkan masih

ada keragu-raguan oleh unit pengawasan atau PFPD, maka mereka bisa meminta contoh barang untuk diuji terlebih dahulu di laboratorium bea cukai untuk mengetahui secara detail uraian barang tersebut hingga masuk ke dalam klasifikasi mana." Jadi, uji laboratorium dilaksanakan untuk pengidentifikasi jenis barang sehingga dapat diklasifikasikan dalam pos tarif BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia), secara tepat terhadap impor yang berisiko tinggi yaitu barang yang berisiko menimbulkan perbedaan pembebanan tarif bea masuk, cukai, dan barang yang diduga sebagai barang larangan dan pembatasan yang diimpor melalui KPPBC TMP A Belawan," ungkap Indra.

Lebih lanjut dijelaskan, proses pemeriksaan tersebut dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor di TPS yang selanjutnya dilakukan pengambilan barang contoh oleh PFPD, yang selanjutnya barang contoh tersebut dikirim bersama berkas PIB ke BPIB Medan. Untuk lebih memudahkan proses pemeriksaan dan pengujian laboratorium, importir ada baiknya melampirkan *material safety data sheet* (MSDS) atau lembar data keselamatan bahan, CoA (*certificate of analysis*), dan label. Selain itu, menempatkan contoh barang dalam wadah berupa botol kaca yang berwarna gelap, apabila contoh yang disertakan berupa cair. Dan mengajukan minimal satu liter bagi contoh berupa minyak pelumas.

"Itu prosedur awal bagaimana barang impor itu harus dilakukan uji lab di BPIB. Sedangkan untuk kriteria barang yang harus diuji itu tidak ada. Jadi selama kebijakan di KPPBC untuk memastikan bahwa barang itu masuk pos tariff atau barang larangan pembatasan ya mereka akan ajukan. Namun demikian, barang yang diuji kebanyakan

adalah barang dari jalur merah sehingga bisa diminta untuk pengambilan contohnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk barang yang masuk jalur kuning atau hijau, sepanjang unit pengawasan membuat NHI maka barang itu bisa dilakukan uji laboratorium,” kata Luki.

Masih menurut Luki, sepanjang perintah uji barang dari KPPBC, maka kita tidak berhubungan dengan pengguna jasa, bahkan seharusnya pengguna jasa tidak tahu kalau barangnya di periksa laboratorium, namun pengguna jasa sering menanyakan kenapa barang belum keluar maka petugas akan menjelaskan kalau barang tersebut sedang diuji di laboratorium. Disinilah terkadang pengguna jasa mendatangi BPIB untuk menanyakan barangnya.

“Kalau dulu sebelum 2010, pengguna jasa akan dikenakan biaya apabila barangnya dilakukan pengujian oleh BPIB yang masuk kedalam PNBP, dan pengguna jasa mendapatkan salinan asli dari hasil laboratorium. Nah disitu baru ada hubungan antara BPIB dengan pengguna jasa, namun sejak tidak dipungut PNBP maka pengguna jasa tidak lagi diberikan salinan asli dari hasil uji laboratorium. Sedangkan hasil uji lab diberikan kepada pejabat yang mengajukan uji lab di KPPBC,” papar Luki yang juga menjelaskan kalau saat ini pengguna jasa sudah tidak dikenakan biaya lagi untuk proses pengujian barangnya, kecuali pihak eksternal yang memang sengaja ingin menguji barangnya di laboratorium bea cukai.

Lalu apa sebenarnya yang diuji oleh laboratorium bea cukai? secara umum pengujian yang dilakukan oleh laboratorium bea cukai berbeda dengan pengujian di laboratorium swasta. Seperti halnya di Succofindo, mereka akan menguji barang yang diberikan oleh pengguna jasa sesuai dengan permintaan dari pengguna jasa

itu sendiri. Sementara, pengujian yang dilakukan oleh laboratorium bea cukai lebih mengarah kepada pemenuhan ketentuan klasifikasi jenis barang. Jadi tidak ada laboratorium yang mengeluarkan hasil sesuai dengan spesifikasi HS code.

Jika hasil sudah ditetapkan namun pihak pengguna jasa tidak menerima hasil uji lab tersebut, apakah ada cara yang dapat dilakukan oleh pihak pengguna jasa? Menurut Luki, jika pihak KPPBC sudah menentukan hasil sesuaia dengan hasil uji laboratorium, dan pihak pengguna jasa tidak bisa menerima hasil tersebut, maka pihak pengguna jasa bisa melakukan keberatan selama 60 hari yang kemudian bisa dilanjutkan dengan proses banding di pengadilan pajak.

“Kalau di BPIB Medan ini lebih spesifik pada perkebunan kepala sawit maka lebih banyak ekspor CPO dan turunannya, kemudian juga untuk impor itu contoh yang diuji lebih banyak ke jenis pupuk. Untuk itu kami disini lebih banyak menguji turunan CPO dan pupuk untuk masuk ke klasifikasi mana yang sesuai dengan HS code nya,” tambah Luki.

Dari penjelasan yang disampaikan Kepala BPIB dan Seksi Pelayanan Teknis, Seno kini menjadi lebih tahu dan tidak menjadi khawatir kalau barangnya tidak bisa masuk. Pengujian ini ternyata penting untuk mengetahui lebih lanjut jenis maupun klasifikasi dari barang yang diimportnya. Sekarang ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan bagi Seno, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguji setiap barang yang diajukan oleh KPPBC.

Dari pertanyaan itu, menurut Indra secara SPO yang juga merupakan bagian dari IKU, untuk waktu pengujian suatu barang baik internal maupun eksternal itu maksimal tiga hari. Namun sampai saat sejauh

ini lamanya proses uji untuk satu jenis barang kurang lebih 1,14 hari.” Ada beberapa faktor yang menyebabkan lama atau lambatnya suatu proses pengujian. Pertama, cepat karena kami dekat dengan KPPBC. Kedua, variasi sample barang, kalau di Medan ini contoh variasi barangnya tidak terlalu banyak atau rutinitasnya hanya itu-itu saja jadi berulang-ulang. Ketiga, instrumen yang dibutuhkan tidak terlalu banyak sehingga ada kebijakan dari pihak pengujian kalau proses yang dilakukan sudah cukup,” kata Luki.

Namun demikian jika ada pengujian yang membutuhkan proses lebih lanjut lagi, biasanya BPIB Medan akan mengirimkan barangnya ke BPIB Jakarta yang memiliki peralatan lebih lengkap, sehingga untuk hasil yang didapatkannya pun akan lebih akurat dan mendalam dalam menentukan klasifikasi barang tersebut, dan akan dijadikan dasar untuk menentukan profiling dari penguna jasa itu sendiri.

“Kalau begitu sebenarnya berapa banyak tahapan dalam proses pengujian suatu barang itu pak?” tanya Seno yang semakin penasaran akan proses pengujian barang ini. Untuk tahapan proses pengujian, Luki mengatakan, secara ketentuan tidak ada batasan untuk tahapan proses pengujian suatu barang, karena sampai saat ini belum ada satu alat yang mampu menguji semua barang, jadi jika ingin menguji mineral ya hanya ada hasil mineralnya saja. Namun jika ingin mendapatkan hasil detailnya maka harus ada alat yang spesifik.

Karena dalam pengujian yang diajukan juga berbagai macam, bahkan dalam satu dokumen bisa mencapai lima jenis barang, atau hanya satu barang saja. Dan kesemuanya ini membutuhkan proses pengujian dengan alat yang ada saat ini dimana belum mampu memberikan hasil yang



Peralatan Yang Semakin Canggih. Semakin banyak jenis barang yang masuk untuk diteliti, semakin membutuhkan peralatan yang canggih dan akurat.

spesifik untuk menguji semua jenis barang. Atau masih membutuhkan beberapa alat uji untuk membuat hasil yang spesifik tersebut.

Untuk lebih jelasnya Luki memaparkan contoh alur pengujian CPO dan turunannya. Untuk menguji CPO dan turunannya maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan uji pendahuluan terhadap pemerian, kelarutan, FTIR (*fourier transform infra red*) untuk mengetahui dengan detail asam lemak bebas (*free fatty acid*), bilangan IOD (*iodine value*), bilangan asam (*acid value*), warna (*lovibond*), dan komposisi asam lemak (GC). Dari hasil ini maka akan diketahui produk CPO dan turunannya, seperti CPO, CPKO, PFAD, SPKFAD, dan lain-lain.

"Umumnya jika proses pengujian harus dikirim ke BPIB Jakarta jenis barang yang diuji adalah mineral atau batu galian dari Aceh. Disini kebetulan saat ini peralatannya sedang rusak sehingga tidak dapat dilakukan

dan biasanya kami kirim ke BPIB Jakarta," ungkap Luki.

Dengan pemaparan yang disampaikan oleh PBIB Medan akan proses pengujian suatu barang, kini Seno semakin paham kalau pengujian itu sangat penting untuk mengetahui jenis dan klasifikasi barang tersebut.

Adapun alur untuk pengujian suatu barang di BPIB Medan seperti yang dijelaskan oleh Indra adalah sebagai berikut. *Pertama*, pihak KPPBC mengirimkan surat pengajuan contoh barang atau permohonan pengujian dan identifikasi barang kepada Kepala BPIB, dimana kelengkapan dokumen pengajuan itu akan diperiksa oleh staff apakah ada surat aju, foto copy PIB, invoice/packing list, LHP, dan data yang dianggap perlu. *Kedua*, Kepala BPIB menyerahkan dokumen permohonan uji kepada Kepala Seksi Pelayanan Teknis (KSPT), dengan memberikan identitas contoh uji, agenda surat masuk, dan distribusi contoh uji. *Ketiga*, KSPT memberikan

dan mendistribusikan contoh uji kepada Penyelia Analis. Dan *keempat* Analis melakukan pengujian, membuat hasil pengujian pada LPL (lembar pemeriksaan laboratorium) dan melaporkan kepada Penyelia analis.

Kelima, jika Analis sudah melakukan pengujian maka memberikan laporan kepada Penyelia Analis, yang kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan (SHPIB) yang langsung diberikan kepada KSPT. *Keenam*, penyelia Analis memberikan hasil uji kepada KSPT. *Ketujuh*, KSPT memberikan hasil uji kepada Kepala PBIB. *Dan delapan*, Kepala BPIB mengeluarkan surat hasil pengujian dan identifikasi barang yang disampaikan kepada KPPBC.

Dari alur tersebut jelas sekali kalau untuk pengujian internal, pihak pengguna jasa tidak bisa berhubungan langsung dengan BPIB untuk mengetahui hasil pengujian barangnya. Dalam hal ini Seno tidak dapat melihat hasil



BPIB Medan. Untuk wilayah Sumatera menggantungkan pengujian barang kepada BPIB Medan.

pengujian yang dilakukan oleh BPIB terhadap barangnya. Hasil pengujian akan disampaikan langsung oleh KPPBC kepada pengguna jasa, apakah sudah benar uraian dan jenis barang yang tercantum dalam PIB atau ada kesalahan dalam pencantuman uraian dan jenis barang tersebut.

Sesuai dengan apa yang diberitahukan Seno pada dokumen PIB, dirinya berharap agar apa yang dicantumkan tidak berbeda dengan hasil yang akan disampaikan oleh BPIB, adapun jika ada perbedaan pada pengklasifikasian barang untuk HS code nya pastikan akan dilakukan perubahan, namun jika pihak perusahaan tetap mengakui akan HS Code yang dibuatnya maka pekerjaan lain sudah menunggu untuk Seno yaitu proses keberatan dan banding.

“Terimakasih pak, sekarang saya telah paham dan mengerti mengapa perlu dilakukannya pengujiana pada suatu jenis barang baik impor maupun ekspor, kesemuanya tentunya berharap agar tidak ada kerugian negara dalam hal ini, dan sebagai orang yang mengurusi ekspor impor, saya akan lebih teliti dan memahami dengan benar jenis barang dan masuk pada klasifikasi mana barang yang akan di ekspor maupun impor,” tandas Seno yang sekarang kembali semangat untuk menjalankan aktifitas hari itu karena telah mendapatkan ilmu baru mengenai proses pengujian barang di BPIB.

BPIB memang dibentuk untuk meneliti barang impor maupun ekspor agar negara tidak dirugikan dalam penetapan klasifikasi barang. Fungsinya yang sangat vital ini akan

menjadi ujung tombang di hari-hari kedepan nanti untuk negara dalam menentukan jenis barang yang masuk maupun keluar agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan, lebih dari itu BPIB juga menjadi andalan unit pengawasan untuk meneliti barang larangan pembatasan yang kian hari kian beragam bentuknya, termasuk beragam kegunaannya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sendiri memiliki tiga BPIB yang menampung semua penelitian suatu barang yang diberikan oleh seluruh KPPBC. Kini untuk lebih mendukung fungsi BPIB, di beberapa KPPBC atau wilayah kerja DJBC akan dibentuk laboratorium mini sehingga akan lebih cepat dalam penanganan uji lab suatu barang dan penetapan klasifikasinya pun dapat segera diketahui.

(Supriyadi)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk

Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghadapai tantangan berat, disatu sisi tuntutan untuk semakin menyelaraskan aturan nasional dengan *international best practices* tentang nilai pabean yang diatur dalam WTO *Valuation Agreement* semakin menguat. Karena sebagaimana diketahui Indonesia telah meratifikasi *Agreement on Implementation of Article VII GATT* (WTO *Valuation Agreement*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Namun disisi lain, kepatuhan importir dalam memberitahukan nilai transaksi secara benar masih rendah. Sebuah thesis yang ditulis oleh Untung Setyo Margono dengan judul "*Import Tax, Non-Tariff Barrier, Customs Reform and Evasion: Evidence from Indonesia Singapore Bilateral Trade*" mengkonfirmasi hal tersebut, bahwa praktek *undervaluation* masih terus menjadi modus menghindari atau memperkecil nilai pajak dengan cara ilegal (*tax evasion*). Saran yang diajukan untuk mengurangi *tax evasion* adalah "*deepening and enhancing customs integrity*", juga merekomendasikan tindakan-tindakan yang serius dan kalau perlu radikal. Thesis ini mendapatkan *Dean's Award* dari *National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)*.

Dengan mengadopsi methodologi Fisman and Wei (2004), salah satu *dependent variable* yang digunakan adalah menghitung *level discrepancy*

antara pemberitahuan ekspor di negara pengekspor dengan pemberitahuan impor di negara pengimpor sebagai proxy *tax evasion*. Dalam thesis tersebut dilakukan analisa terhadap data ekspor dan impor antara Indonesia dan Singapura. Hasilnya cukup mengejutkan. Hasil regresi sebelum dan sesudah reformasi ternyata tidak menunjukkan adanya penurunan *tax evasion* yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum reformasi (kepabeanan) belum memberikan dampak positif berkurangnya praktek manipulasi nilai pabean secara signifikan.

Kembali kepada tuntutan untuk menyelaraskan dengan *international best practices*, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk adalah jawaban atas tuntutan tersebut. Karena berdasarkan berbagai kajian, masih terdapat ketidakselarasan antara lain *pertama*, pengguguran nilai transaksi oleh pejabat bea dan cukai dapat dilakukan ketika pejabat bea dan cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti yang nyata dan/atau data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 huruf (d). Frasa *alasan berdasarkan bukti nyata dan / atau data yang obyektif dan terukur* tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga menimbulkan penafsiran

yang berbeda antara Pejabat Bea dan Cukai dengan Importir serta tidak memberikan kepastian hukum kepada *stakeholder*. Sementara dalam WTO *Valuation Agreement* pengguguran nilai transaksi hanya dalam hal nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7.

Kedua, penggunaan DBNP (Database Nilai Pabean) untuk penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai (Pasal 25), padahal semangat *article VII GATT* adalah menentang penggunaan harga patokan (nilai pabean minimum) dalam menetapkan nilai pabean.

Ketiga, Konsultasi Nilai Pabean antara Pejabat Bea dan Cukai dengan importir hanya diberikan kepada importir dengan kategori risiko menengah dan kategori risiko tinggi, tidak termasuk importir dengan kategori risiko sangat tinggi atau *very high risk* (Pasal 28) sedangkan dalam *article VII GATT* Konsultasi Nilai Pabean diterapkan terhadap semua importir (*equal treatment*).

Ringkasan perubahan PMK Nomor 160/PMK.04/2010 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Poin-Poin Penting yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016

1. Pengguguran Nilai Transaksi Pengguguran nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean harus melalui serangkaian proses



Penghapusan Pasal

Dasar Pengguguran Nilai Transaksi (pasal 8)

Penetapan Nilai Pabean). LPPNP dibuat hanya terhadap pemberitahuan pabean impor yang dilakukan penetapan nilai pabean yang mengakibatkan kelebihan/kekurangan pembayaran bea masuk.

8. Kesempatan *Voluntary Declaration* Terhadap barang impor yang terdapat kewajiban pembayaran royalti dan *proceeds* yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pendaftaran pemberitahuan pabean impor, dapat melakukan *voluntary declaration*.

Penutup

Dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2010 diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian dan penetapan nilai pabean di tingkat *customs clearance*, sehingga dapat meminimalisir kekalahan DJBC pada sidang banding keberatan penetapan nilai pabean yang diajukan oleh importir.

Teguh Iman S
Direktorat Teknis
Kepabeaan

Realized Revenue of Customs and Excise for the First Semester of 2016

Indonesia's state budget (APBN) has been set by the government based on the principles of fiscal policies under the theme of Strengthening Fiscal Management in order to Reinforce the Quality of Economic Growth and Development Fundamentals.

In the current state budget structure, customs and excise is one of the units that contributes to the revenue, specifically from taxes of approximately 1,546,664.6 billion rupiah and non-tax revenue of 273,849.4 billion. In the 2016 state budget itself, customs and excise is targeted to contribute to the state revenue 186.53 trillion rupiah, lower than the target in 2015 which was set in the revised state budget at 195 trillion rupiah, specifically 37.2 trillion rupiah from import duties, 12.1 trillion rupiah from export duties, and 145.7 trillion rupiah from excise.

Last year, customs and excise realized 92.5% of its targeted revenue, which was approximately 180.4 trillion rupiah. Revenue from excise was relatively high, yet, due to the weakened global economy, the revenue from duties declined significantly.

The global economy in 2016 is predicted to grow 3.6%, and 4.5% for the developing countries' economy. The growth, nevertheless, depends on the economic condition improvement in countries currently in crisis, such as Russia, some Middle East countries, and North Africa, as their economic performance is predicted to remain influential to developing countries' economic development, including Indonesia. If the global economic growth improves, it is expected that the same can be said with Indonesia's

economic development.

Up to 31 May 2016, revenue from duties and excise has only been realized 22% from the target, which is approximately 42.87 trillion rupiah. 13.4 trillion rupiah (36%) is contributed by import duties, 28.5 trillion rupiah (19.5%) excise, and 0.9 trillion rupiah (31.4%) export duties.

The realized duties and excise revenue is on average lower than that in the same period last year, which was 58.2 trillion rupiah, consisting of 12.5 trillion rupiah of import duties, 44.26 trillion rupiah of excise and 1.4 trillion rupiah of export duties. Total revenue from taxes up to 31 May was 406.2 trillion rupiah, which means that duties and excise contributed approximately 10.5%. When taking into account revenue from other import-related taxes (import value-added tax, import luxury tax, and import income tax Article 22) as DGCE contribution, however, the total contribution from DGCE to the state revenue from taxes is 108.8 trillion rupiah (26.7%).

Director General of Customs and Excise, Heru Tambudi, has addressed the concern about the current realized revenue by stating that the pattern of revenue from duties and excise in the early period of the year is traditionally low. Heru has predicted the low revenue because there has been no significant revenue from either duties or excise.

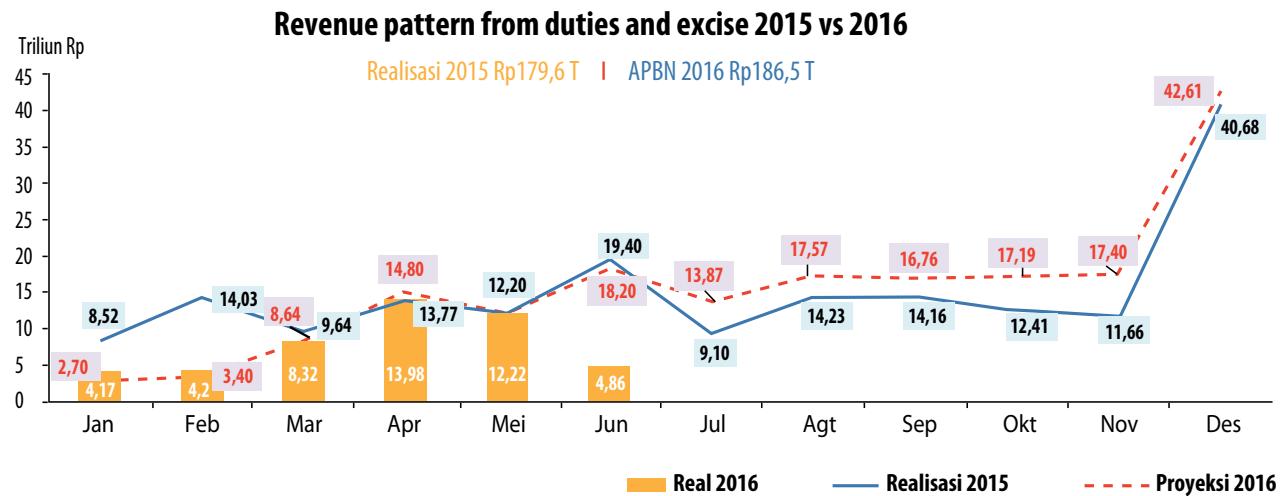


“

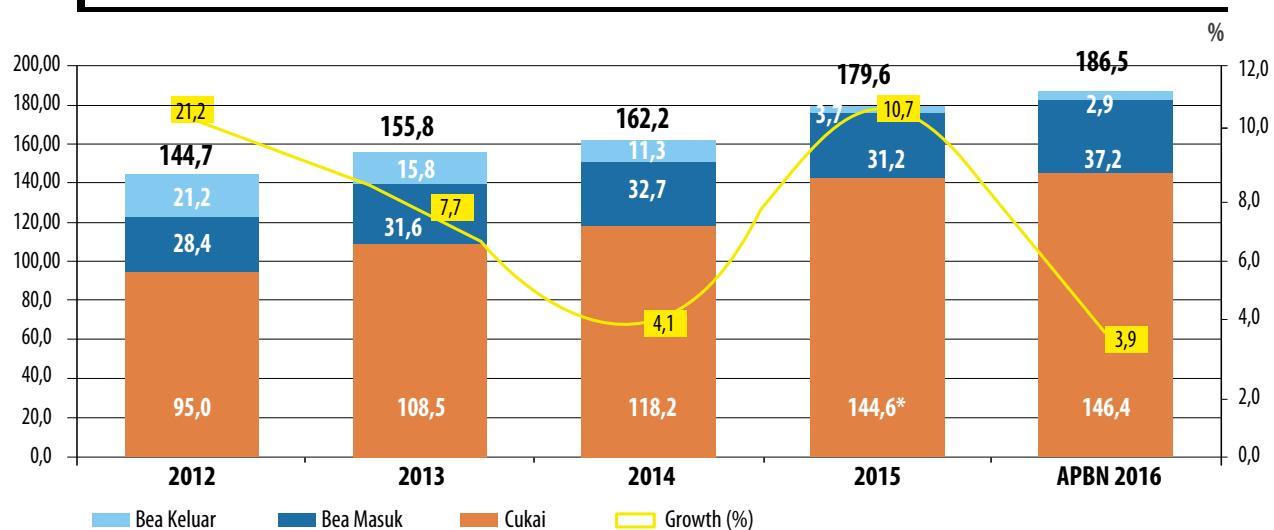
It is expected that when the four aspects of revenue management (revenue management, cash management, revenue administration management, and receivables collection management) have been integrated in the monitoring room, the analysis and policy recommendation with regards to revenue could be more timely and comprehensive.

Rudy Rahmadi
Deputy Director of Revenue

Similarly, Deputy Director of Revenue, Rudy Rahmadi, explained that it is normal that the flow of revenue in the early 2016 is slowing, especially as the impact of the issuance of the Minister of Finance Regulation Number 20 of 2015 which altered the payment mechanism of excise for tobacco products.



Revenue from duties and excise 2012 – 2016*



Moreover, as the anticipation for the excise increase in 2016, entrepreneurs ordered excise stamps for the products by the end of 2015, which naturally means less excise stamp orders in early 2016.

Compared to 2015, DGCE revenue technically declines 26.4% (yoY) in 2016. This is especially affected by the sharp decline (37.9%) of revenue from excise of tobacco products. The slowing national economic condition and increasing public awareness of the danger of smoking also impact the production of tobacco products which is down 3.9%.

Excise of tobacco products contributes to the majority (84%)

of the total revenue from customs and excise. This means that the fluctuating revenue from excise of tobacco products significantly affects the revenue from customs and excise as a whole, especially in January and February when the impact from the Minister of Finance Regulation Number 20 of 2015 were still apparent. For the period of April and May, however, revenue from excise of tobacco products has steadily improved and nearing its regular pattern.

"We will continue monitor the fundamental condition of revenue from excise of tobacco products and the fundamental performance of

other revenues from customs and excise and optimizing revenue in cooperation with relevant units of DGCE," stated Rudy.

Actions have been taken to boost revenue, such as:

1. Regional offices are expected to establish a Revenue Optimization Team to discover potential revenue in each unit, especially from re-examinations
2. Units are expected to optimize claims to receivables
3. Enforcement operations, such as Gerhana I and Gerhana II Operation, are to be encouraged, especially in regions that are prone to smuggling

Subdirectorate of revenue is also trying to identify the characters of revenue from customs and excise, such as import duties, excise (of tobacco products, of beverages containing ethyl alcohol, and of ethyl alcohol), and export duties, based on their technical and fundamental aspects. Rudy thinks that, in addition to monitoring the technical trend of revenue movement, it is also necessary to understand the fundamental principles of revenue in order to measure how sensitive our revenue performance and pattern are to the market/ economic condition, as well as to extra activities that can encourage compliance in the payment of revenue from customs and excise. In terms of economic performance, by utilizing macro modelling of the current revenue, *ceteris paribus*, we can identify that consecutively, every 1% of change in the economic development and inflation will positively affect revenue from import duties 0.1% and negatively affect 0.3%; every 100 point change in the currency exchange value will also positively affect revenue from import duties 0.72%. These statistics will prove beneficial in developing the macro revenue target in the state budget. Nevertheless, compliance level of importers and exporters, as well as excise goods entrepreneurs shall also be taken into account. This compliance factor is important to explore in order to discover its implication to revenue and what mitigating policies that should be developed in order to improve compliance in customs and excise.

To ensure the realization of the state's right in terms of revenue, the Subdirectorate of revenue is currently developing tools to monitor or identify revenue or revenue pattern from customs and excise that is affected by factors that are market-driven and compliance-driven. Factors that are compliance-driven have significant policy implication because market-driven factors are

beyond DGCE control.

"The tools are under development by relevant DGCE units, such as Directorate of Enforcement and Investigation (Intelligence), Directorate of Excise, and Directorate of Customs and Excise Information, by feeding data to us. Therefore, in the future, each unit will be able to do the monitoring, analysis, and utilization of information of revenue either individually or collectively in a team, such as with the Directorate of Audit for the coordination of the extra activities, or with Receivable Claim Team for the collection of receivables. In the future, it is expected that such integrated utilization and analysis of revenue information could involve more relevant units, both in the headquarters or regional offices of DGCE in order to improve the quality of planning, policy development, implementation, monitoring and evaluation, and information dissemination processes," stated Rudy.

A dedicated room in the Subdirectorate of Revenue is planned to be converted into an integrated monitoring room for revenue, which will carry out four revenue management objectives: revenue performance, cash management, revenue administration, and receivables collection management. Similar rooms, usually called the Dealing Room, have been around in the Ministry of Finance, specifically at the Directorate General of Treasury, to display information concerning cash management, and at the Directorate General of Financing and Risk Management, to manage state financing.

Rudy further explained that revenue performance management is designed to manage the realization of revenue target, including refining the quality of planning, targeting distribution, monitoring and revenue performance evaluation. As for cash management, it is projected to display the information on the quantity and pattern of daily revenue

for the present day, previous days, or projected revenue for the coming months. Such information will be fed to the Directorate General of Treasury to help manage the intra-day cash or intra-month cash, and to the Directorate General of Financing and Risk Management to plan and implement financing management.

"Intra-day or intra-month management is especially useful, for example, when we need to coordinate and synergize with the Directorate General of Treasury when we are required to safeguard the state account in specific days or months the payment of electricity and gasoline subsidy is due. If, for example, the payment due is in the morning, we can then register the revenue immediately to the state account early in the morning. Or on the contrary, if the revenue can only be realized in the afternoon, for example, the obligatory payment of salary and other payments will only be done later in the afternoon once the revenue is realized. Similar treatment applies for specific months, such as for the payment of salaries during Lebaran holiday, or specific quarters for the payment of electricity and gasoline subsidy. At the recent Minister of Finance Senior Officials' Meeting, Director General of Customs and Excise has agreed with the Director General of Taxes to cooperate in safeguarding state account with the revenue from duties and excise, as well as the revenue from taxes based on the account information received from the Director General of Treasury. This kind of cooperation is a concrete example of synergy among the leaders at the Ministry of Finance to safeguard the state account in terms of revenue," added Rudy.

Similar to enterprises where there are sales revenue (in cash or account receivables), expenses, and financing, our cash management is related to managing cash flow, both inflow and outflow. "Because customs and excise deals only with revenue, we



focus more on the cash inflow. With cash management we will be able to monitor the quantity and deviation pattern, and fundamental national and unit revenue.

Revenue administration management refers to the activity of monitoring the distribution of unmatched transactions in Indonesia, from the data of MPO and SPAN, SAI and SAU, and managing the matching process mitigation. Differences may happen because data from SPAN are based on the data that have been registered to the state account, whereas data from MPO are solely based on the available documents. The implementation of the latest electronic payment system, called MPN-G2, has helped to minimize issues in the matching process of payment and documents. However, there are customs and excise transactions occurring in units of DGCE that remain not integrated to CEISA and MPN-G2, which means that the recording and matching processes need to be managed more carefully.

Unmatching is inevitable, and is usually caused by incorrect data entry. The monitoring room is expected to help solve this problem.

"We will be able to identify the problem early. We can detect where the revenue unmatching happens earlier. Therefore, we can also reconcile the data early without having to wait for 3 or 6 month for the evaluation." In the end, this is expected to help DGCE achieve the status of "unqualified opinion" in the Government financial Report.

Receivable collection management is currently done through an application system, called SAPP (Application System for Receivables and Refund). The management, however, remains separate from the management of revenue and is limited to the administration of receivable record. The aspects of collection and evaluation should be encouraged in order to increase the contribution of revenue from customs and excise and evaluate extra effort activities in terms of revenue collection.

The establishment of the monitoring room serves as the refinement to the current analysis process as it integrates the revenue information systems currently existing in the DGCE, and makes it easier to comprehensively monitor the technical and fundamental

aspects of revenue, both that are market-driven (economic growth, industry condition, inflation, and exchange value, etc) and compliance-driven (payment compliance, production pattern, extra effort, etc); the information of which will be useful for senior officials, head of units, and other units in DGCE that require the data.

"It is expected that when the four aspects of revenue management (revenue management, cash management, revenue administration management, and receivables collection management) have been integrated in the monitoring room, the analysis and policy recommendation with regards to revenue could be more timely and comprehensive."

The tools will alert us if certain revenue declines and tell which units to boost to make up for the decline. The monitoring room is an ongoing program that is expected to be completed by the time the Revenue Optimization Team is established in the next couple of months.

"By the time the team is established, the tools should be ready to support the team's work. Say that revenue is a machine which consists of smaller machines, such as import duties machine, excise machine, and export duties machine, the monitoring room will serve to monitor the performance of those machines which is influenced by compliance-driven or market driven factors. The hardware is being prepared, the network is also being readied, and the installation process is ongoing. As for the human resources, we continuously prepare them with the capabilities to operate and manage the monitoring room. While the monitoring room is often called the dealing room, we may adjust the name to better reflect the spirit and characteristics of customs as a tax collector that is responsible to safeguard state revenue from customs and excise," ended Rudy.

(Desi Prawita/Jiwo/Zulva)



Excise on Tobacco Products which has been the crutch of DGCE's revenue.

Directorate General Of Customs and Excise Boosts Excise Revenue

The estimation of excise revenue on tobacco products (HT) in the first semester of 2016 is up to 40.8 T or 29.2% of the target, meanwhile in the same period in 2015 was up to 58.3 T or 41.9% of the target. In the first semester of 2016, it has decreased compared to 2015, it is caused the impact of Regulation of the Minister of Finance No. 20/PMK.04/2015 dated February 2, 2015 of which the repayment of excise duty towards excise bands bookings in 2015 which matured in January and February 2016 must be paid no later than December 31, 2015, so that revenues in January and February 2016 are relatively small. Besides these factors, the national economy slowdown and the increasing of public awareness about the dangers of smoking results the decreasing production of tobacco products (HT) during the first semester until 3.9%.

Excise sector has become one of the mainstays for revenue of customs and excise, although virtually not for

revenue even the target continues to increase. In response, the Director of Technical and Excise Facility, Marisi Zainudin S, said with a portion of excise which reached 9.5% of tax revenue so when Indonesia's state budget (APBN) target from taxation sector has to increase to finance state spending.

"The position of excise will always be expected to contribute. However, in practice, other aspects toward the purpose of imposition of excise duty is a control that should be considered. So far, based on existing data, control has gone as expected," said Marisi.

Generally, the most significant factor that affects excise revenue is excise production and rates of which these two factors play a direct role in excise revenue. However, other derivatives factors that affect both internally and externally, as follow:

Internally (under control): the policy in the field of excise (the rate increase and the retail price), the condition of forestalling toward the impact of tobacco products (HT)

excise rate policy issuance, and the intensity of enforcement in the field of excise.

Externally (uncontrolled): the market demand, the public purchasing power, the distribution of illegal cigarettes, and the provisions in the field of health (PP 109 and Permenkes 28) as well as the growth of macro-economic, etc.

Trend of Tobacco Products Excise Revenue

The pattern of revenue in 2014 was relatively stable, the increase in revenue in December 2014 was mainly due to the change factor of excise band design and tariff increases that came into force at the beginning of next year. Revenue pattern in 2015 seen with there was a significant surge in December because, at the year, it has been imposed PMK-20, so that the payment of excise bands bookings for the year were due in the next year should have been paid up to the date of December 31, 2015.



“

Excise position will always be expected to contribute. However, in practice other aspects of interest, like the imposition of excise is control that should be taken into consideration, so far based on existing data, control effort has gone as expected.

Marisi Zainudin Sitohang
Director of Technical and Excise Facilities

The same pattern will occur by the end of 2016, the difference of 2016 and 2015 is only at the beginning of the year (January and February), of which in 2015 there was still a revenue on excise band booking of 2014, whereas in early 2016 as it has been imposed PMK-20, revenue in January and February has been paid in December 2015.

Head of Sub-Directorate Excise Rate and Basic Price, Sunaryo, added that the efforts will be pursued to achieve excise revenue target are improving BKC manufacturers profiling, increasing service and surveillance in the field of excise, and issuing tariff policy.

Other efforts have also conducted towards the expansion of goods subject to excise object proposal, including plastic packaging containing the beverage. Based on the discussion result between Government and Parliament in term of State Budget 2016, it should be conducted the excavation of the sources of financing state by increasing goods subject to excise. Based on the case, It has been



“

Explained that there are many efforts which will be pursued to achieve excise revenue target.

Sunaryo
Head of Sub-Directorate of Excise rate and Basic Price

conducted a study by the Ministry of Finance Team on the few commodities that potentially subject to excise duty, the results have been narrowed to the plastic packaging of beverages/ food. As for the aspect of Public Policy (policy test) conducted in determining the excise object, as follows:

- a. Legal
 - Excise Act gives mandate for the addition of new goods subject to excise
 - Establishment of a new type of goods subject to excise (BKC) stipulated by Government Regulation
 - Determination of excise revenue on new goods subject to excise (BKC) outlined in Indonesia's State Budget (APBN/P) 2016
- b. Philosophical
 - The imposition of excise duty aims to control (instrument control)
 - The use of plastic packaging can adversely affect the environment and health
 - The use of plastics for packaging beverage/food of more than 65% (Ministry of Industry)
- c. social Economy
 - Support of the Ministry of Environment and Forests



“

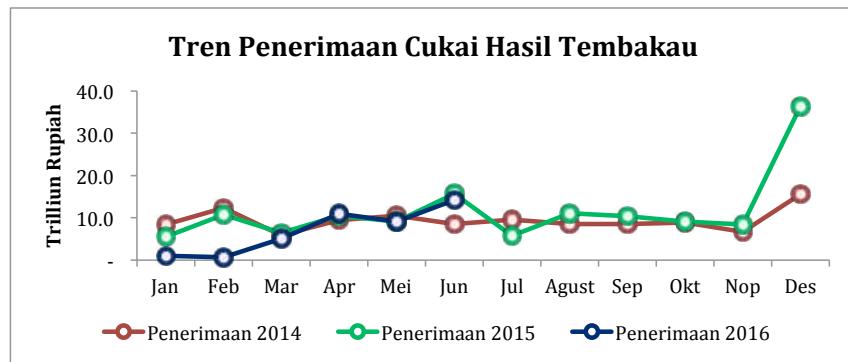
The assumption of effective enactment has begun in the last 4 months, and it will be obtained around Rp.1 Trillion.

Muh. Sutartib
Head of Sub-Directorate of Excise Potential and Compliance of Manufacturers of Excisable Goods

Environment and Forests

- Low community resistance to the practice of fee collection by the Government against plastic bags
- Implementation of the determination on goods subject to excise (BKC) in Indonesia is still very little
- The impact of the imposition of excise duty on plastic packaging for beverage/food is not economically significant to affect inflation, consumption and GDP.
- d. Reference (Best Practice)
 - The application of excise rates on plastic packaging by some countries (Great Britain, India, Scotland, Hungary, Ireland, Ghana, Kenya)
 - The collection (levy) of plastic bags by some Local Government (DKI Jakarta, Yogyakarta, etc.).
- e. Operational
 - Administrative Eligibility for collecting excise duty to the insurer

It was reported in the media that the Commission XI of the House of Representatives (DPR) is ready for discussing the proposed expansion of the object subject to excise goods



with the Ministry of Finance in order to secure state revenue. A Member of Commission XI DPR Indah Kurnia argued that Indonesia always dependent on tobacco excise revenue (CHT). While excise revenue from beverages containing ethyl alcohol (MMEA) and ethyl alcohol have small portion in donating to the state purse.

In the posture of State Budget (APBN) in 2016, excise payment targeted to contribute Rp. 146,4 trillion, or 78 percent of the total excise revenue target and import duties Rp. 186,5 trillion this year. Of the overall revenue target of excise, tobacco products targeted to contribute Rp. 139,8 trillion or it is equivalent to 95 per cent of excise target.

According to Indah, the government should expand the excised base in order to increase state revenue, all forms of additional state revenue would be supported. Indonesia is far behind compared to other countries which are more varied in imposing on excise objects for securing state revenue and protecting their citizens from the negative impact of goods subject to excise.

“Because there are only three kinds of excise objects, the government relies heavily on three. In fact, this excise not only has the potential to generate new revenue for the government but also to suppress the behavior of goods consumption which is not good in the community,” she said.”

The low realization of tax revenue and customs from the budget target in 2016, it prompts the government to seek other sources of income. This problem, according

to Director General of Customs and Excise Heru Pambudi due to the increase of cigarette excise rates in 2016. “Manufacturers withdraw the purchase to the end of 2015 so that revenue from January to February 2016 has been still low.”

This year, there has been reorganization under the Directorate of Technical and Excise Facility, one of the changes is the addition of a new Subdirectorate; Sub-Directorate of Excise Potential and Compliance of Manufacturers of Excisable Goods. With the new Sub-Directorate, we will continue to explore the new excise object so that we can increase the revenue sources in the field of excise.

The potential of extending is still very large, it needs political will from the relevant ministries to be able to achieve the extension. If you look at the best practice in other countries, bottled beverages, fuel, and plastic are common excised. It needs a heartened to accept this as part of the effort for controlling and finding revenue sources.

The Head of Sub-Directorate of Excise Potential and Compliance of Manufacturers of Excisable Goods, Muh. Sutartib, explained that the plan of replenishment policies BKC carried out in order to follow up the results of discussions between government and Parliament Meeting on Budget 2016 in order to explore the sources of state financing, of which the study narrowed in plastic packaging containing beverages with the consideration that the plastics packaging containing beverages meet the nature and characteristics to be charged excise

duty in accordance with Article 2 paragraph (1) letter c of Act Number 39 of 2007 on the Amendment of Act No. 11 of 1995 on Excise (Excise Act).

“Excise policy is always oriented on control, as mandated by Article 2 of the Act of Excise. However, when there is a new excise policy that the revenue will go up, because in practice both control and revenue are running parallel,” said Sutartib”.

The application of excise on plastic packaging has been applied by several countries such as UK, India, Scotland, Hungary, Ireland, Ghana and Kenya. In the ASEAN region, there has no countries been implementing. However, Indonesia tries to become a pioneer.

If excise revenue derived from the contents of beverage plastic packaging is defined as excisable goods based on the results of simulation performed under normal condition can contribute revenues of Rp. 2.6 to 3 trillion per year, at the beginning of the passing of discourse on imposition of excise rates on plastic packaging of beverages, DGCE and Fiscal Policy Agency (BKF) write a study including the simulation of the revenue potential and economic impact thereof. Based on these simulations, assuming the excise rates around Rp. 50 s.d. 300 per piece (depending on the size/volume of packaging) it estimated that there is excise potential around Rp. 2.67 trillion per year. The assumption of effective enactment is began in the last 4 months, and it will be obtained around Rp.1 trillion.

In terms of numbers, such revenue is far less than excise revenue obtained from the cigarette industry, but the imposition of excise duty on plastic packaging of these beverages has a secondary effect of the modalities for extending the excise subsequent that covers a wider plastic packaging and other commodities. “This value is not significant when viewed in excise revenue as much as Rp. 148 T, however, it will be the doors of revenue sources from other sectors like in other countries.”

(Desi Prawita/Jiwo/Zulva)



Optimizing Customs Revenue in 2016

Sugeng Apriyanto

Director of Revenue and Strategic Planning

The Directorate General of Customs and Excise continues to make efforts to achieve the 2016 National Budget (APBN 2016) that had been set by the government at the beginning of the year. Not only Customs, the Directorate General of Tax is also assigned to fill state coffers in terms of tax revenue. In APBN 2016, Customs itself is targeted around 186.53 trillion or about 12.05%, consisting of Import and Export Duties and Excise.

It is not easy to achieve because of many factors that influence such as economic growth that contributes to the export-import values, exchange of rate and so forth. Until today, or mid-year, revenue realization has only reached 30% although there was a slowdown trend in the beginning of the year. Therefore, Customs needs more efforts.

To learn more about the efforts of Customs to achieve the APBN 2016 target set by the government, the following explanation of the Director of Revenue and Strategic Planning, Sugeng Apriyanto;

The customs and excise target set by government is Rp. 186.53 Trillion. How much that has been realized until the

middle of this year?

As of 31 May 2016, customs and excise revenue reached Rp 42.87 Trillion (22.9%), which consists of Import Duties Rp 13.4 T (36%), excise Rp 28.5 T (19.5%) and Export Duties Rp 0.9 T (31.4%).

Estimated revenue performance in the first semester of 2016 is 61.1 T (32.8%) consists of import duties Rp. 16.45 T (44.2%), export duties Rp. 1.21 T (42.2%) and Excise Rp. 43.4 T (29.7%).

Is the realization of current revenue collection has been as expected?

By the numbers, customs revenue until today is still considered quite low, especially from import duties and export duties. Until May, the revenue from this sector is expected to reach 42% because basically there are no policies that change the pattern of payments as occurred in Tobacco Product Excise. Overall, revenues are generally performing below original estimate. It is not in spite of national economic conditions that work below target. National economic growth is only 4.92% from 5.3% expected. Economic growth slowdown is influenced by low

growth in the manufacturing sector, consequently the performance of raw materials and capital goods importation that contribute more than 75% of the revenues are also facing slowdown. Nevertheless, revenue performance of Import Duties in first quarter (Q1) is generally supported by growth in consumer goods imports.

Export Duties revenue performance is still low due to the low realization of mineral exports of PT Freeport, only 30% (327 thousand MT) of the quota given in the first semester of 2016 (1 million MT).

Nevertheless, we are still optimistic about the extra effort that will be carried out both from the aspect of policy and control, customs and excise revenue will increase in the second semester.

What factors that affect the revenue collection?

Some of the factors that affect the revenue collection for each kind of revenue, among others:

a. Import duty:

1. Global and domestic economic conditions are still declining (the realization of Q1 economic growth is 4.92% year on year (y-o-y) from 5.3% of budget assumption in 2016).
2. The foreign exchange value of imports (Billion US\$) is still declining 20.4% y-o-y per May:
 - Value in 2014: US\$ 166.3 billion; 2015: US\$ 128.2 billion; 2016 January-May: 44.1 billion US\$
 - non-oil imports decline 8.37% y-o-y
3. Utilization of FTA facility which reaches 26.7% of Import Declaration, higher than 2015 which was only 23%.
4. Imports of capital goods decline 11.4% and imports of raw materials and auxiliary goods decline 9.7%. In general, imports of capital goods, raw materials and auxiliary goods contribute more than 75% of the import duties revenue.
5. However, there are positive

factors so that the current import duties revenue is little better than the same period in 2015, namely:

- The increase in the average exchange rate from Rp12.851/USD to Rp13.473/USD
- The increase in average effective tariff from 1.79% to 2.26%
- The increase in import with specific tariff that considered as short phenomenon (rice)
- Imports of consumer goods remains stable and tends to increase before the feast

b. Export duty:

1. Export commodity price is low. CPO price is < 750 USD so that export duty tariff of CPO is still 0%.
2. Export duty revenues only come from palm oil oilcake, cocoa, wood and leather commodities that are relatively small and from mineral concentrates commodities;
3. Export duties of mineral concentrates only come from 2 Companies: Newmont and Freeport, with the amount of export quota determined by related Ministry/Institution.
4. The low realization of mineral exports by PT Freeport, only 30% (327 thousand MT) from the quota given in the first semester of 2016 (1 million MT).

c. Excise:

1. The production and excise tariff
2. The increase in alcoholic beverage production due to the increase of excise tariff of imported alcoholic beverage in the second semester of 2016
3. Changes in the pattern of excise payments (impact of Minister of Finance Regulation number 20 year 2015)
4. Other derivative factors that affect both internally and externally, among others:
 - Internally (under control): the policy in the excise matters (the increase in tariff and the export price), the existence of forestalling condition as

the impact of the issuance of Tobacco Product Excise policy, and the intensity of enforcement in excise matters.

- Externally (uncontrolled): the market demand, purchasing power, the circulation of illegal cigarettes, provisions in health matters (Government Regulation number 109 and Minister of Health Regulation number 28), macro-economic growth, and so on.

Is there any change of target in the second semester of this year?

Based on the achievements of the revenue until May 2016 and internal discussion in the Ministry of Finance, DGCE proposed to change the revenue target in the Revised State Budget 2016, particularly in the revenue collection of import and export duty. It is triggered by the global and domestic economic conditions that are not yet improved, it can be seen from the declining of foreign exchange value of imports in May 2016 (-20.4%) compare to 2015.

And referring to the results of the joint meeting of Budget Committee of the House of Representative on June 8, 2016, the excise revenue target raised from Rp146,4 T to Rp148,1 T, in which has included the addition of new excise object.

What is the Customs' proposal for the target revision?

The proposals are correct the target of import duty revenue target from Rp. 37.2 T becomes Rp. 33.37 T, and the target of export duties from Rp. 2.88 T to Rp. 2.5 T, while for the excise target increases from Rp. 146.4 T to Rp. 148, 1 T, where the additional 1 T comes from the extension of excise (plastic bottles containing drinks).

Another change is the increase of excise tariff of alcoholic beverages aligned with policy of imported alcoholic beverages tariffs, as well as efforts to increase the intensity of supervision both for excisable goods in form of alcoholic beverages

and tobacco product. Related to the addition of new excisable goods, Customs expects the synergy of stakeholders in order to accelerate the implementation of expansion of excise policy.

Is there any new Customs policy to encourage revenue collection considering the import and export duties component which progressively decrease?

In general, Customs policies to encourage the achievement of revenue targets in 2016 are as follows:

The factors that influence the policies for import and export duties can be divided into two, namely:

- a. Factors beyond the Customs control (market driven), the policies that can be done is to monitor and predict (commodity prices, economic growth, exchange rate)
- b. Factor controlled by Customs that is by enhancing compliance, either through regular activities (socialization and counseling) as well as in the form of extra effort (correction note re-examination, audit).

Excise sector becomes one of the mainstays for the revenue collection while in fact excise is not meant to be the revenue object, but the target continues to increase. How is your response?

Basically the purposes of excise imposition are:

- a. to restrict the circulation of

goods that are considered immoral or unhealthy.

- b. to internalize external diseconomies.
- c. to reduce or limit the consumption of luxury goods.
- d. to create the efficient use of natural resources.
- e. as the government revenue

In 2015, cigarette production growth was facing the slowdown and it is expected to continue in subsequent years. The slowdown was mainly caused by the increase of tariff imposed on tobacco product excise. It was in line with the Tobacco Industry Roadmap 2015-2020 which gives a higher priority on the public health aspects than labor aspects and state revenues.

The increase in excise revenue target is the general direction of tax policy in 2016 and 2017, where the taxation policy geared to controlling the consumption of certain goods and negative externality. This policy is implemented by:

- a. Taking enforcement action primarily associated with illegal cigarettes and alcoholic beverages;
- b. Adjusting tobacco excise tariff; and

- c. Adding new excisable goods.

Lately, Customs intensively conduct the enforcement against illegal goods/ contraband. Is there any impact on the revenue collection?

Enforcement

Operation conducted simultaneously through *Operasi Gerhana I* and *II* as well as other operations. Even though those operations do not directly improve the revenue, but they reduce illegal goods circulation and improve the compliance of service users to meet the payment obligations of customs and excise, which can increase revenues of DGCE.

According to the research by the University of Gajah Mada in 2015, the enforcement on excise matters contributed to excise revenues by 0.3% and contributed to production growth by 5.3%

Are you optimistic to achieve the revenue target for 2016? What would the revenue target be in the future (2017)?

DGCE is very optimistic that revenue target in 2016 (as proposed in Revised State Budget in 2016) can be achieved, and DGCE will conduct maximum effort to achieve that target.

For 2017, with better projections of economic growth, it is predicted that customs and excise revenue will also increase. Import duty and excise sectors are predicted to increase in line with the improvement of economic growth. Export duty revenue is predicted to decline as export of mineral concentrate is no longer permitted by the Government by 2017, so it will rely on the oilcake, cocoa, wood and leather commodities with only Rp. 350 billion potential revenues.

Customs and Fiscal Policy Board are currently reviewing the sustainable policy format so that the determination of target from year to year refers to the policy that had been determined before.

(DesiPrawita/Jiwo/Zulva)





KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu

PROFESSIONAL

Medan! If the Indonesian people were asked to name the city in Sumatra Island, they would always remember that provincial capital of North Sumatra. As one of the major cities of the tourist destination and business, it is certainly needed the convenience mean like an international airport. Formerly, International Airport in North Sumatra named Polonia International Airport. Along with the economic progress and development in the province of North Sumatra, Central and Provincial Government of North Sumatra have begun to proclaim to construct the new airport since 1997, namely Kuala Namu International Airport in Deli Serdang that is adequate and representative. However, the construction project has stalled due to the monetary crisis in 1998.

Airport construction project was continued in 2006 and completed as well as inaugurated on March 27, 2013. However, Kuala Namu International Airport recently had started operating normally since July 25, 2013, replacing Polonia International Airport in

Medan.

Kuala Namu International Airport has been projected as a hub airport among the western region of Indonesia with other countries regions and as a regional Hub in Southeast Asia in order to face the ASEAN Open Sky. Since it operated, the number of passenger flow that has arrived and departed in this Airport increased due to the business visit, tourism, socio-cultural, conventional, education, and health.

With the increase and complexity of Kualanamu International Airport, the role of DGCE is needed to be able to support the smooth of international passengers arrival/departure flow, goods and customs documents and to optimize a selective control and measured against the efforts of importation and exportation of prohibition and restriction goods as well as the state revenue. Taking into account the complexity of this case, it needs a Customs office that can handle Kualanamu International Airport.

Based on the Minister of Finance Regulation Number. 206.3/PMK.0 /2014 dated October 17, 2014, on Amendment to the Minister of

Finance Regulation Number. 168/PMK.01/2012 dated December 10, 2012, on the Organization and Work Agency of DGCE Vertical Institutions one of which has mandated the establishment of Customs Service Office of Kuala Namu (KPPBC TMP B Kuala Namu). While by the Director General of Customs and Excise decree No. KEP-63/BC/2015 dated April 1, 2015, and the date of July 1, 2015, the establishment of KPPBC TMP B Kuala Namu has been operationally inaugurated by Director General of Customs and Excise to conduct surveillance and service of Customs and Excise in Kuala Namu International Airport region.

The History of KPPBC TMP B or Customs Service Office of Kuala Namu closely related and inseparable presence of the Customs Service Office of Medan (d/h Polonia). As explained by the Head of Customs Service Office of Kuala Namu, Zaky Firmansyah, that since operated, Kuala Namu International Airport replaced Polonia International Airport's function. However, customs service and surveillance activities still were carried out by the Customs Service Office of

Medan, precisely July 25, 2013, until June 30, 2015. "Just since July 1, 2015, most of the working area of Customs Service Office of Medan switched its authority to the Customs Service Office of Kuala Namu. Until now we are still clean up the administration up to 30-40% from Customs Service Office of Medan," Zaky said.

The Office which is located at Kualanamu International Airport Area Offices has a motto of "P R O F E S S I O N A L". It implies that all services; surveillance and administration are conducted with high knowledge, skills, and competencies with concerning and prioritizing on care in achieving service user satisfaction and perseverance in carrying out official duties.

In an interview conducted in his office, Zaky has admitted that in the early stages, we would not be able to claim the advantages of this office because the office was still relatively new. There were still many things need to be refined as the improvement of infrastructure and office facilities in order to qualify it for the modern office either related to services and surveillances; the completion of business process or the office activity procedures system such as enhance SOP, standard time service, innovation produced, and the empowerment of human resources. "We are confident that at the beginning of office establishment, it should be a blueprint for careful planning and viewing the former experience as well as the remarkable necessary effort, so the acceleration of this office to become a modern office can be realized properly and to improve the image of DGCE."

Nevertheless, Customs Service Office of Kuala Namu continues to innovate to improve service and surveillance, some innovations that conducted as follows:

1. Innovation Application System which incorporated in HORAS Kuala Namu (Home of Revolution Application System) where there are sub-applications such as PIBK-Off Line, Rush Handling Systems Applications (Sarah) System

Application Archive, and System Applications TPP.

2. Innovation surveillance system called SI-Popai (System Application Investigation & Reporting Airlines) where the application system used as a system of report and analysis of passengers coming from abroad to Kuala Namu.
3. Official website of Customs Service Office of Kuala Namu, in this website, there is a unique thing in which there is a section of North Sumatra feature that displays everything uniqueness in North Sumatra. This conducted because Kualanamu International Airport as one of the main entrance of the tourist destinations in Indonesia.

There are some services that performed by the Customs Service Office of Kuala Namu such as import and export service of cargo goods at the Temporary Storage (TPS) Area of Warehousing Kualanamu, surrounding areas, passenger service at Terminal Arrival and Departure of Kuala Namu International Airport, customs administration services conducted at the Customs Service Office of Kuala Namu, and goods settlement services in the customs storehouse (TPP), customs service of The Duty Free Shop.



The spirit, experience, awareness and innovation, as well as uphold the values of the Ministry of Finance that makes this office can achieve success together.

Ade Zirwan
Kepala Sub Bagian Umum

Transportation means that become the main of Customs Service Office of Kuala Namu surveillance is an aircraft. Surely, there are forms of surveillance such as; before the arrival of transport means, at the arrival of transport means, imported goods demolition, store, and surveillance, physical surveillance of imported and exported goods, passengers, and passengers luggage surveillance.



Surveillance in the airport would become one of the main tasks of the Customs Service Office of Kuala Namu.

Naturally, DGCE duty and functions are also applied in Customs Service Office of Kuala Namu like Trade Facilitation, by working with Temporary Storage (TPS) Administrator related to business service until the last flight (midnight) to be a form of trade facilitation. For the export sector, Customs Service Office of Kuala Namu encourages SMEs in North Sumatra that export-oriented mainly in seafood and agricultural products.

In terms of Industrial Assistance, many owners of Bonded Zone (KB) and non-Bonded Zone (KB) in North Sumatra and Riau send imported goods (mainly spare parts) through Kuala Namu International airport, our role gives the speed of service. The tourism industry has begun to improve because Lake Toba, Nias, and Sabang have become the main tourist destinations in Sumatra, so the role of Customs Service Office in giving a good response to passengers in terms of hospitality is needed.

Protecting community is also a part of the duties and functions of DGCE (Community Protector). Customs Kuala Namu during 2015 (July-December) has produced 32 times enforcement with the dominant

type of goods are beauty products, medicines/supplements, Narcotics Psychotropic and Substances and Precursor (NPP). While the period of 2016 has been resulting 36 times of enforcement with the type of goods NPP, beauty products, medicines/supplements, Crabs, Fishes Hickey, former mobile phones, medical equipment, swallows' bird's nests, beverages containing ethyl alcohol (MMEA) and tobacco products, etc.

As a function of Revenue Collector, during the year 2015 (July-December), Customs Service Office of Kuala Namu charged a duty revenue target of Rp 10,260 billion with revenue realizations of import duty achieved Rp 13,135M or achievement level of 125.75%. In 2016, Customs Service Office of Kuala Namu given a duty revenue target of Rp. 28,924M and realization until May 31, 2016, amount to Rp. 11,825M or 40.88%.

"We believe until the end of the year, we will achieve import duties revenue target that imposed by optimizing the sources that can produce import duty revenue," Zaky said.

When viewed from the region of Kualanamu International Airport today, it is quite spacious where

there will be a subsequent service development plan that compared to the volume of passengers and cargo is currently at 30-40% of the installed capacity, Zaky sure that North Sumatra Province which has a Hub Airport in Indonesian western region will be much more developed again. "As a precaution, we have been doing and we will continue to increase the communication to the airlines, AP II, Airfreight Forwarding, Hospitality, tourist agencies, universities, consulates located in Medan, and local government."

The presence of Customs Service Office of Kualanamu certainly welcomed by public and stakeholders as it will speed up service to the community and business. If we see the development of business courier service in Kuala Namu International Airport since taking up an office is experiencing an increasing trend up to 20%.

Community complaints still happen related to passengers goods because the provision of prohibited and restricted as well as the obligation of import duties and taxes on import payment. Therefore, Customs Service Office of Kuala Namu continues to do the good public relation activities in radio, greeting passenger, and other that information on customs that needed by the public can be well received.

Customs Service Office of Kualanamu as a member of the committee FAL Airport Affairs, a part of agencies community located at an airport must always be active in giving advice and opinion concerning on airport in Kualanamu, that related to the best service for passengers arrivals and departures in Kualanamu as well as in enhancing the role of hub airports to abroad and domestic.

Customs Service Office of Kualanamu plays a dominant role as the motor of providing Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) facilities that are adequate, and the fulfillment of CIQ regulatory in Kualanamu International airport. In law enforcement synergy, particularly interdiction, Customs Service Office



The Customs Services at the airport.



All activities such as service, surveillance and administration are conducted with high knowledge, skills and competencies as well as prioritizing awareness.

of Kuala Namu has been cooperating actively with National Anti-Narcotics Agency (BNN), National Anti-Narcotics Province Agency (BNNP), and Local Police Force of Deli Serdang (POLDA), as well as judiciary in the framework of law enforcement of Narcotic, Precursors and Psychotropic Substances. Customs Service Office of Kuala Namu also provides a special room as Interdiction room shared by law enforcement authorities in the field of combating and enforcing narcotics.

Head of General Sub Division, Ade Zirwan, added that Customs Service Office of Kuala Namu has the main building as a center of administration of public services and currently continues to be improved in order to fulfill the concept of modern office. Then, it also has completed by an archives room, customs storehouses, a private dining room, and a prayer room which managed independently.

In service side to employees, it is provided a service polyclinic, a cooperative, and a haircut or barber shop for the physical tidiness of employee in providing services to the public. Customs Service Office of Kuala Namu has also been equipped with the dormitory for employees which can load 20 employees and used as a resting place for employees who serve at night and place for Narcotics Tracker Dogs Cages.

"The total of human resources in Customs Kuala Namu are 121 employees of which the composition

is 60% aged under 45 years, and 40% predominantly senior employees. I have instructed that the collaboration between senior and junior employees by promoting the advantages of each employee and not concerned about the weakness of them. The spirit, experience, awareness, and innovation as well as uphold values of Ministry of Finance are things that make this office can achieve success together," said Ade".

Activities to external parties like public must continue to be conducted due to Customs Service Office of Kuala Namu need to introduce as a new entity to spread the information related to Customs and Excise well. "Forms of activities that have been done is the publication to the education world both High School and University, the site visit activities to major media in North Sumatra province, and join in following the exhibition activities organized by the local government."

Togetherness activities are also conducted among fellow employees but still focused on compactness, increasing employee skill, religiousness, and sport. Forms of activities that have been carried out are English Club, religious lecture, and motivation, as well as exercise together. "The highlight of external and internal activities have been projected at the International Customs Day this year. We have planned that every year there is two moments convergence

of internal and external activities except the role and function carried out at the moment of Customs Service Office of Kuala Namu's Birthday and at International Customs Day," said Ade".

As described earlier, the improvement continues improved like in service field with enhancing the layout and support representative facilities in the international arrival terminal, activating cashiers and EDC in the arrival terminal of Kuala Namu International Airport and applying a quality management system based on ISO 9001: 2008 as a guarantee of public service standard. For the field of surveillance, it conducted by building a good intelligence service system and developing an SI-Popai application.

Hope to DGCE towards the Customs Service Office of Kuala Namu that Zaky wants is the service and surveillance functions at the airport should get more attention, especially for improving regulations of the shipment and provision of goods of passengers as well as basic standard goods of handling passengers needs the same standard in all airports and database customs valuation for the customs valuation fixing by Head of PKC Section (official assessment) should be drafted.

The high demand of service users and community towards service speed and customs officers' attitude are the main case in the airport, One-day time is not enough in the airport, even for the cargo needs minutes.

"I urge that spirit and motivation have been given in this time, it should be continued in the future. I also emphasize to all customs officers in Customs Service Office of Kuala Namu to do the best for this office and they should not be afraid to make a positive innovation to remove the barriers. You know, innovation makes something does not exist, it can be exist, from the existing, it will be enhanced continuously to achieve a better result. Change the barriers become the opportunities to go ahead, and make the work into something fun to be enjoyed," Zaky lid.

(Desi Prawita/Jiwo/Zulva)

Welcome to Jordan, the Hashemite Kingdom!



Ivery white tents with taper-shaped roof looked so charming. I watched a few moments before boarding to Air Arabia. "I must have missed this country," I muttered to myself.

A pointed-nosed youth with thick eyebrows greeted us pleasantly. He said that he has Palestinian blood. It's just that he never returned to Palestine, even though he missed his country of origin. Now he has settled and become citizens of Jordan. Together with a stewardess, he deftly carried out his duties as a steward.

Somehow the people we met were all friendly. On the bus that took us from the waiting room to the plane, we also met a Palestinian woman. She came from Jerusalem, but lived in Amman since her husband's nationality was Jordanian. Occasionally she took a visit to her home to meet her relatives. In English, she explained us why she could easily come in and out of Palestine where she must pass through strict inspection by the Israeli army, "Because I am a woman. It is different for the youth, especially bearded guy; he will be

difficult to enter Palestine."

"What about us? We are beardy," asked one of his friends.

"No problem. You are safe. You can enter Jerusalem because you do not have the Palestinians blood."

Monitor screens opened on the right and left of the cabin above our seats. Some cute boys and girls appeared on the screen. With Arabic and English they involved in small talk about how to wear a seat belt, how to use a life vest, and how to use breathing apparatus in case of force majeure. The instruction video ended

with the guidance of a prayer prior to traveling (safar), after that, our plane took off from King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia, to Queen Alia International Airport, Amman, Jordan.

Just when *Adzan Zhuhur* (the call to Zhuhur prayer) reverberated, we arrived in Amman. A temperature of 13°C breeze gently welcomed our skins. Mahdi Yanes led us to begin the visit by reading a Safar prayer. In quite good *Bahasa*, he introduced to us many sides; geographical location, demographic composition, the potential of nature and life. He told the story of 20 (twenty) years ago when he went to Indonesia. So for the sake of love to Indonesia and his happiness for meeting Indonesian, Mahdi graciously gave *barazek*, pastry crisp contours Syrian typical wrapped with roasted sesame, honey and pistachio. Together with Ali Abu Shakra, Mahdi became our guide during in Jordan.

"Jordan has no petroleum, but it is rich in olive oil. Economic Jordan relies on cement, potassium, and sulfate. Rain only 10 (ten) times a year in Jordan. 95% of the population is Jordan Sunni Muslim. The rest is Orthodox Christians and Jews," said Mahdi.

In line with what was said by Mahdi, we saw large olive garden along the road from the airport to the downtown of Amman. The scenery reminded me to one verse of the Qur'an, "Wat tini waz zaitun."

We prayed jama 'Dhuhr and' Asr at Masjid Ahlul Kahf, Amman. The afternoon sun was quite hot, but the wind was very cold. Brrrrr ... it was like ice water when we washed our hands and feet for ablution. Actually the faucet for ablution could be set to hot or cold water, but unfortunately it was not working.

Masjid Ahlul Kahf had a tower with a dome on top of it. The yard was clean and spacious. There were several faucets with drinkable water in the courtyard. The prayer room for men and women were separated so we could not see each other. Near the mosque there was a hill with green

trees. There were many caves built in the style of Roman architecture on the hill. One was Cave of the Seven Sleepers or Ash-habul Kahfi Cave whose story immortalized in the Qur'an in Surah Al-Kahf.

Some people argued Ash-Habul Kahf Cave was in Ephesus, Anatolia, Turkey, and the bodies of the kahf young men were in Syria. However, historians agreed that Ash-habul Kahf was originally located in Amman, the place we visit.

Ash-habul Kahf Cave became the witness of the faith of 7 (seven) youths in saving Islamic values from the cruelty of the king at that time. They were accompanied by a dog named Qithmir. Allah got the kahfi youths sleeping in the cave for 309 years as proof of Allah's majesty. When they woke up, the dog had become bones. Feeling so hungry one of them came out of the cave to buy food to the market which was not far from there. It turned out the money they had already expired. The young man went back to the cave to tell it to his friends. Arriving in the cave, Allah took their live.

Our guide, Ali Abu Shakra explained, "About 100 years ago, archaeologists discovered human bones that believed to be the bones of young kahfi and dog bones in this cave. The bones of man were buried in the cave, while the dog bones were stored in one of the museum in Jordan. Archaeologists also found a market that was buried in the ground not far from this cave and found the money-coins."

Following from the cave, we stopped to Tawaheen al-Hawa Restaurant, a Lebanese restaurant serving Middle Eastern menu. Mahdi explained, the Jordanian regularly had lunch at around 3-4 pm. It was not surprising when we entered the second floor of the restaurant and found it very was crowded. There were many tables in the room that spacious enough for 8 (eight) people. In the middle of the room there was a very beautiful crystal chandelier. The walls were adorned with paintings of artistic canvas. A male waiter with a long-sleeved white shirt, black vest and

a bow tie greeted visitors. From the variety of food that was served, there was no such thing called rice! The lunch cost \$ 20 per person.

Drizzle combined with cold temperatures in that night made our body shivering. We stayed at the Arena Space Hotel, a four star hotel in the center of Amman. Photos of King Abdullah and his Palestinian wife Rania displayed in the lobby. Ali and Mahdi told us the schedule for dinner at 8pm and breakfast at 6am. There was no rice in the menu, there were tomatoes, cucumbers, olives, cheese, cakes, boiled eggs, scrambled eggs, carrots, fresh vegetables, seeds, melon, papaya, and some types of drinks; mineral water, milk, tea, and orange juice.

After breakfast we continued the journey to Petra, it was over five (5) hours from Amman. If Amman is located in North Jordan with green field contour, then Petra is located in the South of Jordan with desert contour. Arabian Desert was surrounded us. In the middle of our way to Petra, we visited the souvenir shop in Abu Shakra to buy souvenirs, to bowel, and to pray.

Petra also called with Wadi Musa, in Greek it means rock. In Arabic, it called Al Batra. Petra was famous because in there, we could find 800 individual sculptures, ancient buildings, tombs, baths, temples, arched gates and the roofed-streets that mostly carved from sandstone. Around Petra, there were many inns. When our bus entered into the parking lot, dozens of teenage Jordan girls were waving and smiling cheerfully to us. They friendly greeted us, "Hello, Indonesia! Welcome to Jordan!"

According to historical records, Petra was the capital of the *Nabatean* Kingdom in the time before Christ. They sculpted buildings and caves on giant rocks in that place. One of the most beautiful and large sculpture was so-called Treasury; a sculpture building resembled a palace. According to the information of Mahdi, the Nabatean sculpted Treasury from top to bottom so that the sculpture was not destroyed



since the stones in that location were actually only solidified sandstone. At that time, Petra was known as a modern city that had a strong defense, the building was beautiful, and the irrigation systems were complicated or sophisticated. Ali explained, "Some people said that the caves were used to bury dead bodies. The better and more intricate carvings indicated the higher social strata. And the most magnificent sculpture is the Treasury."

Around the Treasury there were many sellers of souvenirs of silver bracelet with the price of USD 1 per bracelet, horse-drawn carriage and camel rental for visitors.

At dusk, we reached Wadi Rum (read: Wadi Ram). Wadi means valley, while Rum is the name of the tribe who inhabited the region. Wadi Rum desert is an area which is very pretty decorated proof exotic rocks. In the spring, the national flower of Jordan, Black Iris, grew up in this area. The Martian movie starring Matt Damon, which is about the planet Mars expedition, also filmed in Wadi Rum because of its red sand looks like the surface of Mars.

We spent the night at Sun City Camp. The tents we used were little bit away from the main tent. The main tent was used as a dining area. Each tent occupied by 2-3 people. The road between the camp with another tent and the main tent connected with a

short wooden bridge that reminded us when we crossed a wooden bridge over the River Kapuas, Pontianak. Inside the tent there were 2-3 soft beds with a thick blanket. Inside the tent there was a bathroom and toilet with hot and cold water.

In the cold of the desert we were treated with cooking attraction. The sensation of taste was incredible. It was presented by the young chef wearing white *gamis* (an Arabian long white cloth) and red turban. After dinner, we were warmed by the fire we made near the main tent. "This is the first Indonesian group who visited Wadi Rum. People often mention Petra-Petra when they visited Jordan. Sun City Camp is the most expensive camp in Wadi Rum for the bathroom is inside the camp. There is no such thing in other tents. It is small thing, but important," said Mahdi.

The temperature reached 8°C. After performing Subuh prayer, I and some friends climbed to the top of the rock in order to see the sunrise, while some friends were playing with sand and taking photographs. After finishing breakfast, we continued with the desert tour using a jeep. Each car was maximum for 6 (six) passengers. Our heart skipped a beat when the jeep we were riding suddenly down into the valley of Wadi Rum. The sensation seemed to ride a roller coaster! We were like a grain of sand in the middle

stretch of desert. I wondered what would happen if we were left alone there.

That day was the last day of our visit in Jordan, the country where Prophet Yusya ‹bin Nun and Prophet Shoaiib and the Companions of the Prophet Muhammad sallallaahu ‹alaihi wa sallam, namely Muadh ibn Jabal, ‹Abd Allah ibn Rawahah, Zaid ibn Haritha, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah were buried. Jordan is also a country where the Companions of the Prophet Muhammad sallallaahu ‹alaihi wa sallam still alive in the form of a tree named Shahabi tree or as-syajarah al-Mubarakah or a blessed tree that grows in the middle of the desert named Buqaawiyya. Many leading scholars of this century also came from Jordan, they were Sheikh Salim bin ‹Eid Al-Hilali and Sheikh Ali bin Hasan Abdul Hamid al-Halabi the disciples of Shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, hadith scholars of this century.

Before leaving Jordan, we visited the Dead Sea which was located at 400 m below sea level, a place that became the lowest point in the world. Although it named «sea», the actual Dead Sea was a lake. The salt content of that sea reached 30%, contrasting with salt levels in other sea that only about 3%. For security reasons, visitors were not allowed to swim or dive in the Dead Sea, but only allowed to float on the Dead Sea. We did not worry about drowning! The high salinity made us floating. A gift that must be taken from there was the Dead Sea mud for it was the material to make cosmetic products.

Our guide, Ali and Mahdi, took us off at King Hussein Border (Allenby), the Jordan and Palestinian border. By invoking the blessings of God Almighty, that night we would continue our journey to the Aqsa Mosque, Jerusalem, Palestine, a country located on the west side of the Dead Sea. Jordan, I would miss you. One day, *Inshaa Allah*, I will come to visit again.

Siddiq Gandhi
Staff of Directorate of Audit of
Customs and Excise

RUN AND CHASE YOUR DREAM

Roy Maihendra Wijaya

Running is in his blood. Running, for this Malang-born 32-year old gentleman, is not merely about stepping forward, but it is also about maintaining his spirit and consistency. Even the smallest difference in his steps will be influential in the finish line.



There is nothing that can make Roy happier than to be able to run. In his childhood, while all his peers were busy playing football, Roy was unaffected and chose running instead. His love to running began when he was still in the elementary school in Malang.

Roy, who graduated from STAN in 2006, admitted that he previously did swimming more often and began running only out of curiosity. Over time, he became addicted to running. “I was not serious about running and I thought it was a simple sport. Now, though, I realize that running is not that simple. There are a lot of techniques,” said Roy.

The first event he participated in was Mandiri Run 2014. He was in the top 10 and won the rights to participate in Jakarta Marathon 21 Kilometer free of charge. “I could not stop since then. In my office in Halim there is a regular Customs Jakarta Runner event, every Wednesday morning,” he said.

Of the tens of events that he has participated in, Roy managed to win three of them, Marine Customs Run 2015; Marine Customs Run 2016 in Tanjung Balai Karimun, Riau Island; and Samosir lake Toba Ultra in North Sumatra at the 25K race. He even defeated the previous winner of Marine Customs Run in 2015 in the category of customs officers, namely Khaerul Syah. His best time in that 10K event is 40 minutes and 27 seconds.

Roy realized that as a customs officer he must be able to balance his work and running life, especially considering that he is not a professional runner. “I work as usual and train when I can. It can be in the morning, afternoon or at night.”

People often judge and underestimate Roy from his physical appearance. His colleagues even joked about his capability of running in a championship. Now that he had won Marine Customs Run in 2015, he is often under pressure because his colleagues now often ask if he wins or not whenever he is participating.

Roy also participated in trail run events, and he would almost always took the wrong way or get lost in the mountain, even in places where nobody else get lost, such as when he ran at the slope of Lawu Mountain. Nevertheless, he once became the fourth Indonesian to finish in a trail run event called Bromo Tengger Semeru 30K in 2015. Giving up is not in his dictionary and he will continue to practice and run as long as he can.

Speaking of practice, Roy now understands that each type of practice has its own merits. They can be to improve speed, increase endurance, and speed up recovery. There are also times when he should be running every day in a week, or, rather, rest from running for the whole week.

Roy, the second child of four, has the ambition of finishing a road run marathon in under 3.5 hours. “My best time is still over 4 hours,” he said. To improve his ability, he often participates in international running competition, such trail runs in Vietnam and Singapore that he participated in in 2015.

He also ran at Lintas Sumbawa 100K, Lintas Merapi, Bromo-Tengger-Semeru, Salak, Sibayat, and Pangrango Mountain. He is also planning to participate in Rinjani Ultra event in Lombok Island in the near future. “(I will participate because) in addition to running, I will also travel to new places and the reward is not half bad,” he added.

“I am not familiar with mountains. I am not a mountain climber. I am from the city and more familiar with malls,” he joked. Finally, Roy shares his tip to readers aspiring to be a runner like him that for runners, sufficient nutrition and rest are crucial. “I would rather dehydrate than be sleep-deprived,” closed the calm guy who loves all Indonesian traditional foods. (**Jiwo/Zulva**)



PEMINDAI KONTAINER

HI-Co Scan X-Ray Container Inspection System menggunakan radiasi sinar-X dan dikhkususkan untuk memindai kontainer-kontainer impor. Yaitu container yang berisikan barang impor sejenis atau barang impor yang dikemas dalam kemasan berpendingin (*refrigerated container*). Pemindaian ini sebagai salah satu bentuk pemeriksaan fisik barang impor, sesuai KEP 97/BC/2003.



**SEIAMAT HARI RAYA
IDUL FITRI 1437H**

Mohon Maaf Lahir dan Batin